



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
INSPEKTORAT

. Lintas Sumatera KM.2 Pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : <http://www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id> Email :
lrda_dharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor: 700/ 63 /Reviu/Inspektorat-2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pulau Punjung, 17 Maret 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Drs. ANDY SUMANTO, CfrA
NIP.19681220 199009 1 001

EKSEKUTIF SUMMERY

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2021-2026. Keberhasilan/kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 18 sasaran strategis dengan 33 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024. Dari 33 indikator kinerja utama, sebanyak 20 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, sebanyak 10 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat berhasil, 1 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori cukup berhasil, dan 2 indikator kinerja utama yang tidak bisa dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Strategis **“Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat”** yang di ukur oleh indikator kinerja Persentase Penerima Zakat berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 323.09%. Akan tetapi, sasaran strategis **“Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat”** yang diukur oleh indikator kinerja Jumlah nagari beradat dan berbudaya dengan capaian kinerja terendah sebesar 66.67%.

Rincian pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata and Berkualitas

Sasaran I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	63%	54.60	86.67	Sangat Berhasil
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89.07%	89.64	100.64	Memuaskan
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97%	92.45	95.31	Sangat Berhasil

Sasaran II : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	68%	69.76	102.59	Memuaskan
5	Rasio pemukiman layak huni	94.25%	86.29	91.55	Sangat Berhasil

Sasaran III : Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76.36%	69.57	91.11	Sangat Berhasil
7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	29.12%	-	0.00	-

Tujuan II : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**Sasaran IV : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
8	Angka Harapan Hidup	72.24 Tahun	74.25 Tahun	102.78	Memuaskan

Sasaran V : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
9	Angka rata-rata lama sekolah	8.71 Tahun	8.98 Tahun	103.10	Memuaskan
10	Harapan lama sekolah	12.68 Tahun	12.89 Tahun	101.66	Memuaskan

Sasaran VI : Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
11	Indeks Pembangunan Gender	89.34	89.58	100.27	Memuaskan

Tujuan III : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing**Sasaran VII : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
12	PDRB Per Kapita	55.95 Juta Rupiah	58.71 Juta Rupiah	104.93	Memuaskan
13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.05 %	8.83	109.70	Memuaskan

Sasaran VIII : Mengurangi pengangguran

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.3%	6.02	86.42	Sangat Berhasil

Sasaran IX : Mengurangi Kemiskinan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
15	Tingkat Kemiskinan	5.4%	5.32	101.48	Memuaskan

Tujuan IV : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik**Sasaran X : Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
16	Indeks perilaku antikorupsi	3.92	3.83	97.70	Sangat Berhasil
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100.00	Memuaskan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
18	Hasil evaluasi AKIP	70	67.24	96.06	Sangat Berhasil
19	Nilai LPPD	3.75	3.5036	93.43	Sangat Berhasil

Sasaran XI : Birokrasi yang berkualitas

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
20	Indeks Kelembagaan	0	-	0.00	-
21	Indeks SPBE	2.83	3.61	127.56	Memuaskan
22	Indeks Profesionalisme ASN	71.7	82.77	115.44	Memuaskan

Sasaran XII : Pelayanan publik yang prima

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
23	Publik service indeks	3.21	3.21	100.00	Memuaskan
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.35%	84.65	100.36	Memuaskan

Tujuan V : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran XIII : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8464	0.8651	102.21	Memuaskan
26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7436	0.7798	104.87	Memuaskan
27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.6667	0.7154	107.30	Memuaskan

Tujuan VI : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Lingkungan (*Green Development*)

Sasaran XIV : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	10 %	10.87	108.69	Memuaskan

Sasaran XV : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	65.79	99.68	Sangat Berhasil

Sasaran XVI : Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
30	Indeks Resiko Bencana Daerah	130	130.03	99.98	Sangat Berhasil

Tujuan VII : Meningkatkan Pembangunan Mental dan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Nilai Nilai Agama, Adat, dan Budaya

Sasaran XVII : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
31	Persentase peningkatan zakat	31.6	19.39	323.09	Memuaskan
32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90.47	90.48	100.01	Memuaskan

Sasaran XVIII : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama. adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKET
33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	3 Nagari	2 Nagari	66.67	Cukup Berhasil

Rincian Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	99.06	94.21	-4.85	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	99.13	97.07	-2.06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	91.17	91.11	-0.06	Tidak Efisien
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	61.67	102.78	20.00	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	58.44	102.38	20.00	Efisien
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	94.32	100.27	5.95	Efisien
7	Meningkatkan pendapatan Masyarakat dan daya saing daerah	73.46	107.32	20.00	Efisien
8	Mengurangi pengangguran	84.69	86.42	1.72	Efisien
9	Mengurangi kemiskinan	99.21	101.48	2.27	Efisien
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	63.69	96.80	20.00	Efisien
11	Birokrasi yang berkualitas	92.81	121.50	20.00	Efisien
12	Pelayanan publik yang prima	98.55	100.18	1.63	Efisien

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	98.18	104.79	6.61	Efisien
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	43.72	108.69	20.00	Efisien
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	89.46	99.68	10.22	Efisien
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	99.22	99.98	0.76	Efisien
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	49.96	211.55	20.00	Efisien
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	97.00	66.67	-20.00	Tidak Efisien
Total		78.01	105.16	27.15	Efisien

Efisiensi penggunaan anggaran diukur berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021, dengan mempertimbangkan pencapaian terhadap 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan 18 sasaran strategis tersebut, sebanyak 14 sasaran strategis telah dinyatakan efisien berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Sementara itu, terdapat 4 sasaran strategis yang masih dikategorikan sebagai tidak efisien. Namun, apabila dilihat secara keseluruhan dalam konteks evaluasi efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024, hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan, secara agregat, penggunaan anggaran tetap memenuhi prinsip efisiensi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2024 berada dalam kategori efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat kami selesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M.
Bupati Dharmasraya



Leli Arni, S.Pd., M.Si.
Wakil Bupati Dharmasraya

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Bupati Dharmasraya atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2021-2026. Materi laporan menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Substansi laporan ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif agar ke depan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya,

mulai dari tahap perumusan kebijakan hingga implementasi dan pengawasannya. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga dapat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami juga berharap laporan ini dapat semakin memperkuat komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Atas kontribusi dan kerja sama dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Pulau Punjung, Maret 2025



ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

EKSEKUTIF SUMMERY

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1	LATAR BELAKANG.....	1
1.2	SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA.....	1
1.3	GAMBARAN UMUM DAERAH.....	2
1.4	PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA.....	4
1.4.1	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	4
1.4.2	SUMBER DAYA APARATUR.....	5
1.5	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	6
1.5.1	PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA.....	6
1.5.2	ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	6
1.6	DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.....	7
1.7	MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.7.1	MAKSUD.....	8
1.7.2	TUJUAN.....	8
1.8	TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024.....	8
1.9	SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	13
BAB 2.	PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.....	14
2.1.1	VISI.....	14
2.1.2	MISI.....	14
2.1.3	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	15
2.2	PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024..	16
BAB 3.	AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1	METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	21
3.2	HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	21
3.3	ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	25
3.4	REALISASI ANGGARAN.....	149
BAB 4.	PENUTUP.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.....	5
Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 2.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2024	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024.....	26
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	26
Tabel 3.4 Volume Capacity Ratio Jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.....	28
Tabel 3.5 Daftar Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2024.....	31
Tabel 3.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	31
Tabel 3.8 Cakupan Pelayanan Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak tahun 2024	33
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2024	35
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama 4 tahun terakhir	36
Tabel 3.11 Akses Limbah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.....	37
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2024.....	39
Tabel 3.13 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	39
Tabel 3.14 Data Kawasan Lingkungan Kumuh Tahun 2024.....	40
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2024.....	43
Tabel 3.16 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	43
Tabel 3.17 Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024.....	44
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2024.....	45

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	46
Tabel 3.20 Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024.....	46
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2024.....	49
Tabel 3.22 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	49
Tabel 3.23 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2024.....	50
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024.....	54
Tabel 3.25 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	54
Tabel 3.26 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024	56
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024	57
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	57
Tabel 3.29 Persentase Partisipasi Masyarakat Dharmasraya mengikuti pendidikan dasar	58
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2024.....	59
Tabel 3.31 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	60
Tabel 3.32 Indikator Perhitungan IPG menurut Jenis Kelamin (Usia Harapan Hidup, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan) tahun 2024.....	61
Tabel 3.33 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2024.....	62
Tabel 3.34 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	63
Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	63
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB berdasarkan target tahun 2024	66
Tabel 3.37 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	67
Tabel 3.38 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Dharmasraya (miliar rupiah)	68
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2024.....	71
Tabel 3.40 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	72

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2024	76
Tabel 3.42 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	77
Tabel 3.43 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2024	79
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2024.....	81
Tabel 3.45 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	81
Tabel 3.46 Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2024.....	85
Tabel 3.47 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	85
Tabel 3.48 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	88
Tabel 3.49 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	89
Tabel 3.50 Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat.....	90
Tabel 3.51 Komponen Penilaian SAKIP.....	91
Tabel 3.52 Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B.....	92
Tabel 3.53 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2024	96
Tabel 3.54 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	96
Tabel 3.55 Perbandingan capaian kinerja LPPD DharmaSraya dengan Kabupaten Nilai LPPD Tertinggi dan Provinsi Sumatera Barat	97
Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2024.....	100
Tabel 3.57 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	100
Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2024.....	104
Tabel 3.59 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	104
Tabel 3.60 Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2024	105
Tabel 3.61 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2024.....	108
Tabel 3.62 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	108
Tabel 3.63 Hasil IPP 2024 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat.....	108

Tabel 3.64 Nilai Kepatuhan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	110
Tabel 3.65 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2024	111
Tabel 3.66 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	112
Tabel 3.67 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial berdasarkan target tahun 2024	115
Tabel 3.68 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	116
Tabel 3.69 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi berdasarkan target tahun 2024.....	118
Tabel 3.70 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	119
Tabel 3.71 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan berdasarkan target tahun 2024	121
Tabel 3.72 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	122
Tabel 3.73 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2024..	125
Tabel 3.74 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	125
Tabel 3.75 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2024	129
Tabel 3.76 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	129
Tabel 3.77 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2024	132
Tabel 3.78 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	133
Tabel 3.79 Rekomendasi Perbaikan Indeks Resiko Bencana Daerah.....	136
Tabel 3.80 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2024.....	139
Tabel 3.81 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 2 (Dua) Tahun Terakhir	139
Tabel 3.82 Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya	140
Tabel 3.83 Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif berdasarkan target tahun 2024.....	143
Tabel 3.84 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	143

Tabel 3.85 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2024.....	146
Tabel 3.86 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	146
Tabel 3.87 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024.....	149
Tabel 3.88 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	151
Tabel 3.89 LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED ANGGARAN TAHUN 2024	152
TABEL 3.90 ANGGARAN DAN PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024	155

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024	27
Grafik 3.2 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	27
Grafik 3.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024	32
Grafik 3.4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024	36
Grafik 3.5 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024.....	50
Grafik 3.6 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	55
Grafik 3.7 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	58
Grafik 3.8 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	60
Grafik 3.9 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 (PDRB Dharmasraya)	64
Grafik 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024.....	72
Grafik 3.11 Penduduk Dharmasraya Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2024	73
Grafik 3.12 Tingkat Kemiskinaan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	77
Grafik 3.13 Persentase Penduduk Miskin Dharmasraya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, 2024.....	78
Grafik 3.14 Nilai SAKIP Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024.....	89
Grafik 3.15 Nilai LPPD Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	97
Grafik 3.16 Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat tahun 2024	101
Grafik 3.17 Komponen Penilaian IP ASN dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	106
Grafik 3.18 Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	116
Grafik 3.19 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	119
Grafik 3.20 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	122

Grafik 3.21 Jumlah Lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya.....	126
Grafik 3.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024	130
Grafik 3.23 Indeks Kualitas Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	133
Grafik 3.24 Tingkat Paparan Penduduk Dharmasraya terhadap Berbagai Bencana.....	134

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek nya.

1.2 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia yang merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat kerajaan Malayapura. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemerintah Kabupaten membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan, dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dalam perkembangannya Kabupaten Dharmasraya terbentuk atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

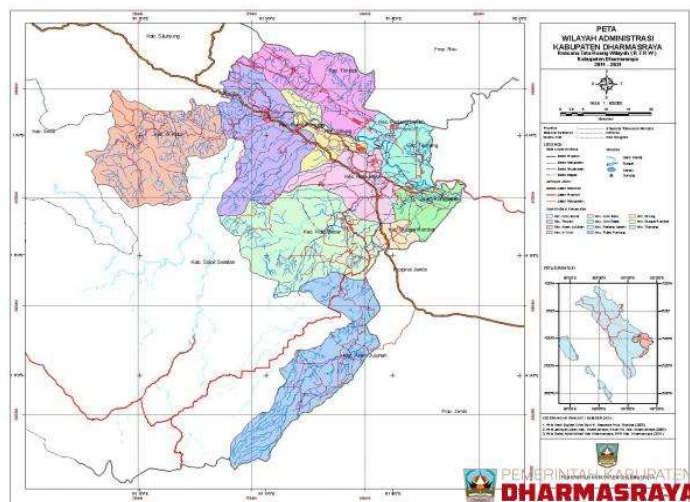
A. Geografi Kabupaten Dharmasraya

Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung dan Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Propinsi Jambi
- Sebelah Timur dengan Kab. Tebo dan Bungo Propinsi Jambi
- Sebelah Barat dengan Kab. Solok dan Solok Selatan.

Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"- 101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha. Peta Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1-1 Peta Kabupaten Dharmasraya



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa letak geografis Kabupaten Dharmasraya sangat strategis. Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

B. Wilayah dan Geografi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya

Suhu berkisar antara 210 C -- 330 C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolic Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Hutan seluas 133.186 Ha (44,98 %), perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) dan lain-lain sebesar (14.90 %).

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strateginya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

C. Demografi Kabupaten Dharmasraya

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sebanyak orang dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai (479 Jiwa/Km²), Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Dilihat dari sisi kependudukan di Dharmasraya, komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut

tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

1.4 PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

1.4.1 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai Berikut:

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintah dan Kesra, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan SDA,
 - 2) Bagian Administrasi pembangunan,
 - 3) Bagian pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perencanaan,
 - 2) Bagian Protokol dan TU Pimpinan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas;

12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Peratanian, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Pangan dan Perikanan , dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan ;
25. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur RSUD;
26. Kecamatan dipimpin oleh Camat terdiri dari 11 Kecamatan terdiri dari;
 - a. Kecamatan Sungai Rumbai membawahi 4 Nagari,
 - b. Kecamatan Koto Besar membawahi 7 Nagari,
 - c. Kecamatan Asam Jujuhan membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Baru membawahi 4 Nagari,
 - e. Kecamatan Koto Salak membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Tiumang membawahi 4 Nagari,
 - e. Kecamatan Koto Sitiung membawahi 4 Nagari,
 - f. Kecamatan Koto Timpeh membawahi 5 Nagari,
 - g. Kecamatan Padang Laweh membawahi 4 Nagari,
 - h. Kecamatan Pulau Punjung membawahi 6 Nagari,
 - i. Kecamatan Sembilan Koto membawahi 4 Nagari,
27. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari terdiri dari 52 Nagari

1.4.2 SUMBER DAYA APARATUR

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Kepegawaian	Σ Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		P	L	SD-SLTA	D1-D3	DIV/ S1	S2	S3
PNS	2979	2098	898	146	449	2118	262	4
P3K	1605	1285	303	33	312	1249	11	0
TOTAL	4584	3383	1201	179	761	3367	273	4

Sumber Data : BKPSDM Dharmasraya, 2024

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Sedangkan isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang tidak dimanfaatkan.

1.5.1 PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, beberapa permasalahan di Kabupaten Dharmasraya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)
2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia
3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

Ini hanyalah sebagian dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu, dengan fokus pada pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5.2 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan di analisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah di intefikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 , Dengan adanya Pandemi Covid-19, antisipasi akan difokuskan untuk penanganan isu terkait :

1. Peningkatan ekonomi,
2. Pembenahan sektor kesehatan,

3. Peningkatan kualitas pendidikan,
4. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan lebih difokuskan pada 3 sektor yaitu;

1. Sektor pertanian,
2. Sektor industri pengolahan dan,
3. Sektor akomodasi dan makan minum dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta
4. dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
12. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN

1.7.1 MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi berdasarkan pencapaian dan tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

1.7.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan keparipayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten. Akhirnya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.8 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/112/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, telah disusun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan <i>cascading</i> (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan <i>critical success factor</i> (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	1. Penyusunan RPJMD beriringan dengan Penyusunan Kerangka Logis dan Cascading yang memperhatikan CSF pada masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan penyusunan Renstra, RKPD, Renja yang selaras.	4 Dokumen (Perda RPJMD, Perbup Renstra, RKPD, Renja)	Februari - Agustus 2025	BAPPERIDA
		2. Penyusunan turunan kinerja dari jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pencapaian kinerja	37 OPD	Triwulan 1	
		3. Evaluasi triwulan terhadap indikator output dan outcome.	4 kali	Triwulan 1,2,3,4	
2	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada <i>cascading</i> kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	1. Menentukan OPD yang mengampu Kinerja Outcome atau Outcome Intermediate dalam rangka pemetaan <i>crosscutting</i>	2 kegiatan	Triwulan 1	BAPPERIDA DAN BAGIAN ORGANISASI
		2. identifikasi terhadap indikator kinerja yang berpotensi adanya irisan atau <i>Crosscutting</i> .			
3	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran	1. pelaksanaan review dokumen perencanaan kinerja mulai RPJMD, RENSTRA, RKPD DAN RENJA OPD	3 dokumen review	Triwulan 3	Inspektorat

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (<i>result oriented</i>) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i>) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya	2. Perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan hasil review			
4	Mereview kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Pelaksanaan review rencana aksi yang telah disusun serta melakukan kegiatan penyelarasan rencana aksi dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam PK	38 OPD	triwulan 1 dan triwulan 4	Bagian Organisasi
5	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap rencana aksi PD untuk memastikan kualitas pencapaian kinerjanya secara berkala	Pelaksanaan monitoring evaluasi rencana aksi perangkat daerah	4 kali	triwulan 1,2,3,4	Bagian Organisasi
6	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kabupaten Dharmasraya diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD, serta memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari untuk media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara <i>real time</i>	1. Koordinasi aplikasi E-SAKIP ke Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat.	2 Kali	Januari, Maret 2025	DISKOMINFO
		2. Bimtek Pengisian aplikasi e-SAKIP Dharmasraya.	1 Kali	April 2025	
		3. Monev Pengisian aplikasi e-SAKIP	3 Kali	Triwulan 2,3,4	

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik	Penyusunan Anggaran dan review Anggaran fokus pada kinerja yang dilakukan saat penyusunan anggaran bersama tim TAPD	2 kali (perubahan 2024 dan anggaran 2025)	triwulan 4	Inspektorat
8	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan efisiensi anggaran telah mengukur seluruh biaya capaian kinerja	menambahkan pengukuran efisiensi anggaran dalam LAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	39 Dokumen	Desember 2024	Bagian Organisasi
10	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi	Memfokuskan memberikan rekomendasi pada LHE yang dikeluarkan oleh inspektorat pada aspek kualitas dan pemanfaatan kinerja	37 OPD	April- Juni 2025	Inspektorat
11	Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkan nya kepala pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1. Setiap OPD diwajibkan untuk menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat 2. Monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut Evaluasi Internal	4 kali	triwulan 1,2,3,4	Bagian Organisasi

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD	Pembahasan bersama tim TAPD untuk kemungkinan menyusun SK Bupati atau Peraturan Bupati terkait penetapan reward dan Punishment dalam rangka percepatan peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	2 Kegiatan	Februari 2025	Bagian Organisasi
13	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	1. Konsultasi evaluator langsung ke Kementerian PAN RB untuk peningkatan kualitas Laporan Hasil Evaluasi.	1 kali	Triwulan 2	Inspektorat
		2. Diklat evaluator dalam meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal	6 Orang		
		3. Inspektorat membentuk tim review atau monitoring terhadap hasil evaluasi tim internal OPD	1 Tim	Triwulan 1	

1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Serta menguraikan mengenai rencana strategis, prioritas Nasional dan rencana kerja tahun bersangkutan serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja Organisasi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan melakukan analisis yang memuat perbandingan antara target kinerja tahun -n dengan realisasi kinerja tahun -n, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun -n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan standar Nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan menampilkan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun bersangkutan.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran serta strategi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

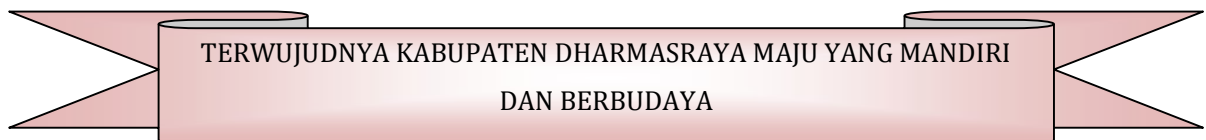
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1.1 VISI

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun.



Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju: Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri: Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja menentukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai alat ukur terhadap kinerja, tujuan dan sasaran kinerja Dharmasraya dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		2 Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		3 Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	4 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		5 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		6 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
3	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	7 Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		8 Mengurangi pengangguran
		9 Mengurangi kemiskinan
4	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	10 Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		11 Birokrasi yang berkualitas
		12 Pelayanan publik yang prima
5	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	13 Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
6	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	14 Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		15 Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		16 Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah

7	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Dharmasraya Tahun 2021-2026

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

Penetapan kinerja bupati merupakan bagian penting dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan visi, misi, serta program kerja pemerintahan daerah. Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja dan target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		SKPD Penanggung Jawab
			AWAL	Perubahan	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1 Rasio kemantapan jalan kabupaten	63	63	DPUPR
		2 % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	80	89.07	DPUPR
		3 % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97	97	DPUPR
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4 % lingkungan permukiman kumuh	50.67	68	PERKIMTAN
		5 Rasio pemukiman layak huni	94.25	94.25	PERKIMTAN
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	71.3	76.36	DPUPR
		7 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	29.12	0	DPUPR
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8 Angka Harapan Hidup	72.05	72.24	DINKES/BPS
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9 Angka rata-rata lama sekolah	8.49	8.71	DISDIK/BPS
		10 Harapan lama sekolah	12.45	12.68	DISDIK/BPS
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	11 Indeks Pembangunan Gender	89.34	89.34	DINSOS/BPS
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12 PDRB Per Kapita	45.76	55.95	BAPPERIDA/ BPS
		13 Rasio Net Ekspor	3.6	8.05	BAPPERIDA/

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		SKPD Penanggung Jawab
				AWAL	Perubahan	
			terhadap PDRB			BPS
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.29	5.3	NAKERTRAN S/BPS
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.97	5.4	BAPPERIDA/ BPS
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.45	3.92	INSPEKTORA T
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	BKD
		18	Hasil evaluasi AKIP	70	70	SETDA
		19	Nilai LPPD	3.75	3.75	SETDA
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	0	-
		21	Indeks SPBE	2.45	2.83	KOMINFO
		22	Indeks Profesionalisme ASN	71	71.7	BKPSDM
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.21	3.21	SETDA
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84.35	BAPPERIDA
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8437	0.8464	DPMD
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7198	0.7436	DPMD
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.607	0.6667	DPMD
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	15	10	PUPR
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	66	DLH
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	120	130	BPBD
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran	31	Persentase peningkatan zakat	2	6	SETDA/ BAZNAS

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		SKPD Penanggung Jawab
				AWAL	Perubahan	
	agama dalam kehidupan masyarakat	32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90	90.47	SETDA
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	10	3	BUDPARPOR A

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya. 2024

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, beberapa indikator kinerja utama mengalami penyesuaian target. Perubahan ini dilakukan karena capaian tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga targetnya dinaikkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam mencapai sasaran strategis. Beberapa target yang berubah antara lain:

Tabel 2.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target		Keterangan
		RPJMD	PK	
% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89.07	80	89.07	Target dinaikkan karena Realisasi Tahun 2023 telah melebihi target RPJMD Tahun 2024
% lingkungan permukiman kumuh	67.99	50.67	68	
% Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76.37	71.3	76.36	
Angka Harapan Hidup	72.24	72.05	72.24	
Angka rata-rata lama sekolah	8.71	8.49	8.71	
Harapan lama sekolah	12.68	12.45	12.68	
PDRB Per Kapita	55.626	45.76	55.95	
Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.05	3.6	8.05	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.22	5.29	5.3	

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target		Keterangan
		RPJMD	PK	
Tingkat Kemiskinan	5.56	5.97	5.4	
Indeks perilaku antikorupsi	3.92	3.45	3.92	
Indeks SPBE	2.83	2.45	2.83	
Indeks Profesionalisme ASN	71.70	71	71.7	
Indeks Kepuasan Masyarakat	84.35	83	84.35	Target dinaikkan karena Realisasi Tahun 2023 telah melebihi target RPJMD Tahun 2024
Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8464	0.8437	0.8464	
Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7436	0.7198	0.7436	
Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.6667	0.607	0.6667	
Indeks Resiko Bencana Daerah	130.02	120	130	
Persentase peningkatan zakat	6.31	2	6	
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90.48	90	90.47	
Kesesuaian pemanfaatan ruang	7.74	15	10	Target diturunkan karena Tidak dapat mencapai sesuai target karena perubahan strategi dan prioritas pembangunan daerah
Jumlah nagari beradat dan berbudaya	2	10	3	

Dari seluruh indikator kinerja, terdapat 19 indikator yang mengalami perubahan target dari target RPJMD, 17 target mengalami peningkatan dan 2 target mengalami penurunan target yang dikarenakan perubahan strategi serta terkait ketersediaan sumberdaya. Perubahan ini mencerminkan kinerja positif dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta efektivitas pembangunan di berbagai sektor.

Selama tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.015.028.916.052,00,-.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. untuk mengukur pencapaian visi dan misi tersebut maka telah ditetapkan setiap tahunnya sasaran dan indikator kinerja Bupati ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang tertuang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber dana lainnya.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja kepala dinas dengan Bupati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud. digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja. ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 99.9%	Sangat Berhasil
3	75% - 84.9%	Berhasil
4	55% - 74.9%	Cukup Berhasil
5	<55%	Kurang Berhasil

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian terhadap target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2024 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut menyajikan data mengenai sejauh mana target indikator dari setiap sasaran strategis telah berhasil direalisasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, berikut pembahasannya:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Tujuan I : Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata and Berkualitas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1 Rasio kemantapan jalan kabupaten	63%	54.60	86.67
		2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89.07%	89.64	100.64
		3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97%	92.45	95.31
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4 Persentase lingkungan permukiman kumuh	68%	69.76	102.59
		5 Rasio pemukiman layak huni	94.25%	86.29	91.55
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76.36%	69.57	91.11
		7 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	29.12%	-	0.00

Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8 Angka Harapan Hidup	72.24 Tahun	74.25 Tahun	102.78
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9 Angka rata-rata lama sekolah	8.71 Tahun	8.98 Tahun	103.10
		10 Harapan lama sekolah	12.68 Tahun	12.89 Tahun	101.66
6	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	11 Indeks Pembangunan Gender	89.34	89.58	100.27

Tujuan III : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing					
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI %
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12	PDRB Per Kapita	55.95 Juta Rupiah	58.71 Juta Rupiah 104.93
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.05 %	8.83 109.70
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.3%	6.02 86.42
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.4%	5.32 101.48

Tujuan IV : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI %
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.92	3.83 97.70
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP 100.00
		18	Hasil evaluasi AKIP	70	67.24 96.06
		19	Nilai LPPD	3.75	3.5036 93.43
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	- 0.00
		21	Indeks SPBE	2.83	3.61 127.56
		22	Indeks Profesionalisme ASN	71.7	82.77 115.44
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.21	3.21 100.00
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.35%	84.65 100.36

Tujuan V : Meningkatnya Kemampuan Nagari dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Nagari

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI %
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8464	0.8651 102.21
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7436	0.7798 104.87
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.6667	0.7154 107.30

Tujuan VI : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Lingkungan (*Green Development*)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	10 %	10.87	108.69
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	65.79	99.68
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	130	130.03	99.98

Tujuan VII : Meningkatkan Pembangunan Mental dan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Nilai Nilai Agama, Adat, dan Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31	Persentase peningkatan zakat	6	19.39	323.09
		32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90.47	90.48	100.01
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	3 Nagari	2 Nagari	66.67

Sumber : Data Perangkat Daerah di olah Oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI 1. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 1.1 Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Untuk Pencapaian misi 1 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tetapkan 1 tujuan yaitu “Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkualitas” Tujuan misi 1 memiliki sasaran yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja Utama, Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR

1. RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

$$= \frac{\text{Jumlah Jalan dalam keadaan layak (Kecepatan kendaraan } \pm 40 \text{ km per jam)}}{\text{Seluruh Jumlah Jalan di Dharmasraya}} * 100\%$$

$$\text{RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN} = \frac{574.8}{1.052.6} * 100\% = 54.60 \%$$



1.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah tabel Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
51.25 %	63	54.60	86.67%	Sangat Berhasil	68 %	80.3%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja tahun 2024 yang mencapai 86,67% dari target menunjukkan progres yang baik meskipun belum sepenuhnya terealisasi. Dengan predikat "Sangat Berhasil", hasil ini telah mencapai 80,3% dari target akhir RPJMD 2026 sebesar 68%, yang mengindikasikan bahwa pencapaian saat ini sudah mendekati sasaran yang direncanakan. Untuk memastikan target akhir RPJMD dapat tercapai, diperlukan upaya optimal dalam dua tahun ke depan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan strategi yang telah ditetapkan.

Untuk memahami perkembangan capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir serta sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, berikut disajikan tabel perbandingan kinerja:

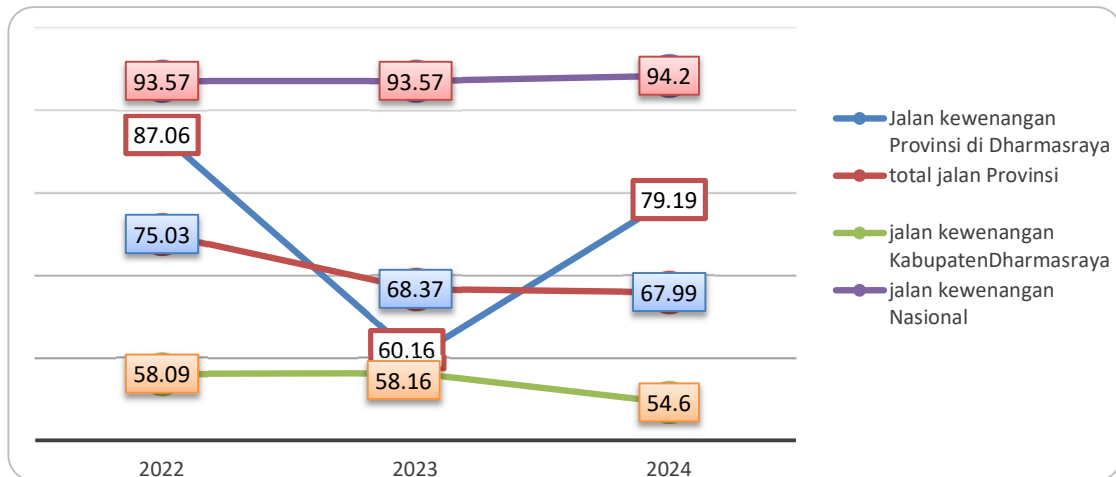
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	53%	50.19%	94.70%	➡	Sangat Berhasil
2022	57%	58.09%	101.90%	⬆	Memuaskan
2023	60%	58.16%	96.93%	⬇	Sangat Berhasil
2024	63	54.60%	86.67%	⬇	Sangat Berhasil

Sumber data : Dinas PUPR Dharmasraya.2024

Berdasarkan data dalam tabel, capaian kinerja menunjukkan fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 94,70% dari target dengan predikat "Sangat Berhasil" dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022, melampaui target dengan 101,90% dan predikat "Memuaskan". Namun, pada tahun 2023 dan 2024, tren capaian mengalami penurunan, masing-masing menjadi 96,93% dan 86,67%, meskipun masih dalam kategori "Sangat Berhasil". Penurunan tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi dan efektivitas program agar capaian kinerja tetap optimal dan selaras dengan target RPJMD 2026.

Grafik 3.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

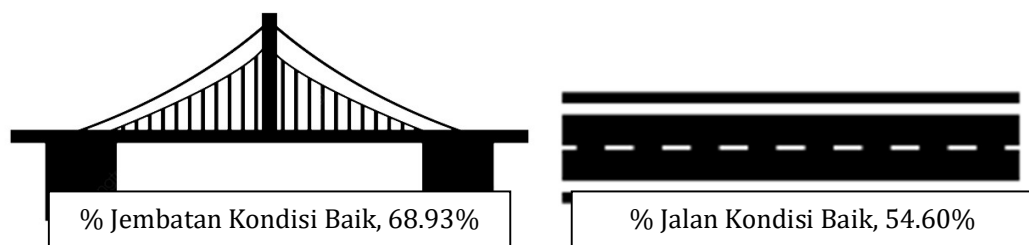


Sumber : BPS Sumatera Barat dan Kementerian PUPR, 2024

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), kinerja infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan jalan provinsi dan Nasional. Pada tahun 2022, kondisi jalan kewenangan Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 58,09, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 58,16 pada tahun 2023, dan kembali turun signifikan menjadi 54,60 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kualitas jalan kabupaten cenderung memburuk, sehingga diperlukan langkah strategis dalam hal perencanaan, pemeliharaan, serta alokasi anggaran yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

Pada grafik diatas terlihat bahwa kondisi jalan nasional dan provinsi lebih terjaga dibandingkan dengan jalan kewenangan Kabupaten Dharmasraya, yang mengalami penurunan kualitas secara bertahap. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan perencanaan dan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten agar kualitas jalan dapat meningkat dan mendukung aksesibilitas masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

Grafik 3.2 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024



Sumber: Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Saat ini, 54,60% jalan dan 68,93% jembatan

berada dalam kondisi baik. Meskipun capaian ini cukup positif, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut, terutama pada infrastruktur jalan, agar aksesibilitas dan konektivitas wilayah semakin optimal. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan pembangunan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kondisi mantap pada suatu ruas jalan dapat dibuktikan dengan menganalisis Volume Capacity Ratio (VCR), yang menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas jalan dibandingkan dengan volume lalu lintas aktual. Dalam kondisi jalan yang baik, permukaan yang rata, serta minim hambatan, kapasitas jalan berada pada angka optimal. Hal ini memungkinkan VCR tetap berada di bawah 0,75, menandakan lalu lintas yang lancar dan efisien. Sebaliknya, jika jalan mengalami kerusakan atau hambatan, kapasitasnya menurun, sehingga meskipun volume lalu lintas tidak berubah signifikan, nilai VCR dapat meningkat, yang berisiko menyebabkan kemacetan.

Tabel 3.4 Volume Capacity Ratio Jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Kecamatan	PANJANG JALAN (KM)	LEBAR LAJUR EFEKTIF (M)	Lebar Jalur (M)	Lebar Bahu (M)	KAPASITAS JALAN (C) Smp/Jam	VOLUME (V) Smp/Jam	V/C Ratio (Smp/Jam)
Pulau Punjung	123.987	104	208	11.5	2493.7	592.7	0.24
IX KOTO	121.8	74	148	9	2473.3	607.3	0.25
SITIUNG	84.39	100	200	4	2641.3	581.2	0.22
TIMPEH	113.1	59.5	119	3	2553.1	537.3	0.21
KOTO BARU	101.913	101	202	3	2451.3	600.4	0.25
PADANG LAWEH	46.42	46	92	5.5	2438.7	659.1	0.27
TIUMANG	80	72	144	4.5	2617.3	610.2	0.24
KOTO SALAK	62.5	51.5	103	6	2382.5	553.3	0.23
SEI RUMBAI	68.7	61	122	2.5	2430.3	645.7	0.27
KOTO BESAR	153.85	77	154	5.5	2532.8	564.3	0.23
ASAM JUJAHAN	96	41	82	0	2650.1	561.9	0.21
RATA - RATA	1052.7	71.5	143.1	5.0	2514.9	592.1	0.24

Sumber : Dinas Perhubungan Dharmasraya, 2024

Secara keseluruhan, kondisi kapasitas jalan di Kabupaten Dharmasraya masih dalam batas aman dengan rata-rata V/C Ratio 0,24, yang menunjukkan bahwa lalu lintas masih lancar. Namun, beberapa kecamatan seperti Padang Jaya dan IX Koto memiliki rasio V/C lebih tinggi dari rata-rata, yang mengindikasikan potensi kepadatan lalu lintas di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi hal ini dengan perencanaan infrastruktur yang lebih optimal guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kemacetan di wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan lalu lintas.

1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Jalan Kabupaten yang telah ada sudah banyak rusak karena pengaruh keadaan cuaca yang ekstrem dan karena peningkatan volume lalu lintas serta beban berlebih kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan untuk klas jalan. Untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Kendala yang dihadapi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah :

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan
2. Mutu dan kemandapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan

Solusi atau faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya pemeliharaan jalan dengan mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim URC harus dibentuk. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur jalan raya yang meliputi Penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment).

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap, dari target 63 % terealisasi 54,60 %. Hal ini dapat diartikan bahwa dari Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di targetkan sepanjang 574,80 km dari 1.052,60 dari panjang jalan kabupaten seluruhnya pada Tahun 2024.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a) SDM Teknis yang memadai
- b) Sarana Prasarana yang memadai

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja rasio kemandapan jalan kabupaten antara lain:

Tabel 3.5 Daftar Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2024

No	Kegiatan	Sumber Dana
<u>PEMBANGUNAN JALAN</u>		
1	Sungai Rumbai-Blok D Sit 2	DAK
2	Pulau Mainan - Blok C Sitiung II (R.144)	DBH 2023
3	Simpang Blok C Sitiung II - Blok C Sitiung II (R.145)	DBH 2023
4	Blok D Sitiung IV - Blok A Sitiung IV (R.176)	DBH 2024
5	Jalan Lingkar Sopan Jaya (R.111)	DBH 2024
6	Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru (R.003)	DBH 2024

7	Paket I DAU 2024	
	- Aspal Hotmix Jorong Sungai Nabuan, Koto Tuo dan Cendana Nagari Koto Ranah (Lanjutan)	DAU 2024
	- Aspal Jalan Lingkar Sungai Rumbai	DAU 2024
	- Jalan Lingkar Blok A Koto Laweh Sitiung IV	DAU 2024
	- Jalan Lingkar Sinamar Sungai Limau	DAU 2024
8	Paket II DAU 2024	
	- Jalan Lingkar Nagari Kurnia Koto Salak	DAU 2024
	- Peningkatan Jalan Nagari Ampalu	DAU 2024
	- Rigid Beton Bahu Jalan Sitiung V - Ampang Kuranji	DAU 2024
9	Paket III DAU 2024	
	- Lanjutan Rigit Beton Jr.Kulin Basisiak Nag.Sungai Kambut Kec Pulau Punjung	DAU 2024
	- Sambungan Jalan Nagari Banai Koto Hilalang	DAU 2024
10	Paket IV DAU 2024	
	- Aspal Hotmix Jalan Kodim	DAU 2024
	- Jalan Pendekat Jembatan Kec.Padang Laweh	DAU 2024
	- Peningkatan Jalan Pulai - Simpang Tabek	DAU 2024
11	Rigit Beton Jr.Lagan Jaya I - Sumber Mulya (RT.3 ke RT.4) Nagari Sipangkur	
12	Rigit Beton Jr.Ranah Bakti Blok D Sit.IV	
13	Rigit Beton Jr.Ranah Makmur Blok D Sit.IV	
14	Pelebaran Bahu Beton Kurnia Koto Salak	
15	Pengerasan jalan dari SMP 3 Sungai Rumbai menuju Gardu Induk PLN Sei Rumbai	
	<u>PEMELIHARAAN JALAN</u>	
16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung & Kec.Sitiung)	
17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Koto Salak, Kec.Timpeh, Kec.Padang Laweh & Kec.Tiumang)	
18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Besar, Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan)	

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

2. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

$$\begin{aligned}
 & \text{PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN} \\
 & = \frac{\text{jumlah rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100 \\
 & = \frac{52.462 \text{ Rumah Tangga}}{58.526 \text{ Rumah Tangga}} * 100\% = 89.64 \%
 \end{aligned}$$

2.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
59%	89.07%	89.64%	100.64	Memuaskan	100 %	89.64%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Pada tahun 2020, kondisi awal capaian berada di angka 59%. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 89,07%, sementara realisasi yang berhasil dicapai mencapai 89,64%, melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 100,64%, yang menunjukkan hasil memuaskan. Meskipun demikian, untuk mencapai target akhir RPJMD 2026 sebesar 100%, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kinerja dan efektivitas program yang telah dirancang.

Tabel 3.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

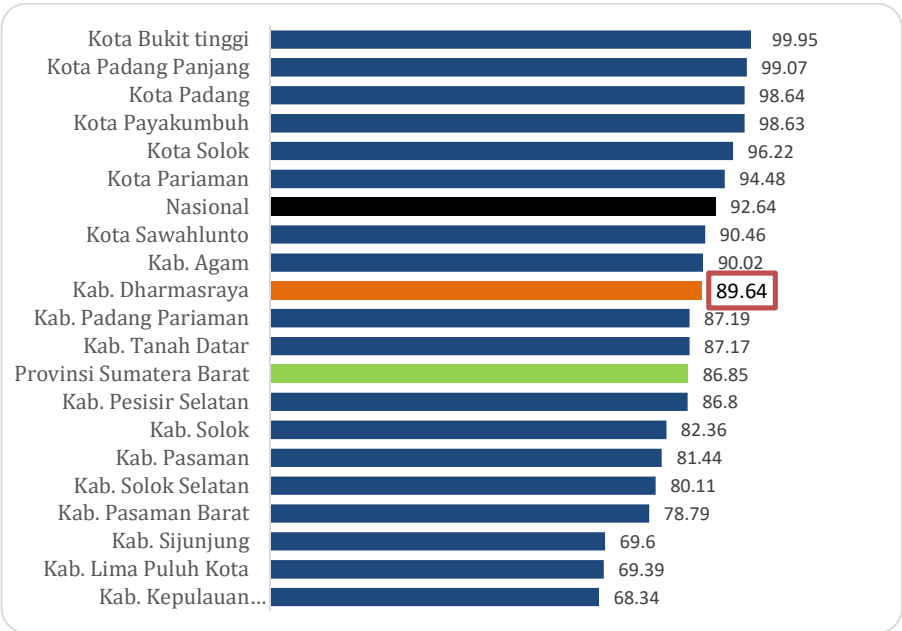
Tahun	Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	61.00%	60.82%	99.70%	→	Sangat Berhasil
2022	65%	88%	135.90%	↑	Memuaskan
2023	89.00%	89.07%	100.08%	↓	Memuaskan
2024	89.07%	89.64%	100.64%	↑	Memuaskan

Sumber Data : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian 60,82% hampir memenuhi target yang ditetapkan. Kemajuan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 88% atau 135,90% dari target, yang dikategorikan memuaskan. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian tetap tinggi, masing-masing 89,07% dan 89,64%, dengan tingkat pencapaian di atas 100%, menunjukkan keberlanjutan hasil yang baik.

Perbandingan kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan tingkat Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2024

Kabupaten Dharmasraya mencatat capaian 89,64% dalam indikator yang diukur, menempatkannya pada peringkat menengah di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten seperti Padang Pariaman (87,19%), Tanah Datar (87,17%), dan Pesisir Selatan (86,8%), tetapi masih berada di bawah Kabupaten Agam (90,02%), Kota Pariaman (94,48%), serta rata-rata nasional (92,64%). Meskipun sudah mencapai kategori memuaskan, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan peringkat Kabupaten Dharmasraya dalam skala provinsi dan nasional.

2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja penduduk mendapatkan air minum yang layak, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain perluasan SPAM jaringan perpipaan di

kawasan perkotaan yang merupakan kegiatan operasional upt SPAM, berikut sebaran layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 3.8 Cakupan Pelayanan Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak tahun 2024

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
Ix Koto	Silago	578	92	317	169
	Banai	866	0	344	522
	Koto Nan Iv Dibawuah	710	330	284	96
	Lubuk Karak	322	97	98	127
Pulau Punjung	Iv Koto Pulau Punjung	2287	104	1900	283
	Sungai Dareh	1767	234	1350	183
	Tebing Tinggi	206	49	150	7
	Sikabau	2444	375	2069	0
	Sei. Kambut	2199	0	1954	245
	Gunung Selasih	1361	152	952	257
Sitiung	Gunung Medan	1366	70	1255	41
	Sungai Duo	1786	740	961	85
	Siguntur	1404	367	980	57
	Sitiung	2033	636	1065	332
Timpeh	Ranah Palabi	437	425	12	0
	Panyubaringan	836	490	346	0
	Tabek	1227	804	402	21
	Taratak Tinggi	1315	665	460	190
	Timpeh	219	218	1	0
Padang Laweh	Muaro Sopan	180	135	45	0
	Sopan Jaya	397	301	96	0
	Batu Rijal	459	146	306	7
	Padang Laweh	284	139	106	39
Koto Baru	Koto Baru	3725	138	3352	235
	Sialang Gaung	1795	227	1516	52
	Ampang Kuranji	1114	0	986	128
	Koto Padang	5436	194	4729	461
Tiumang	Sipangkur	717	623	56	38

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
	Tiumang	1078	755	312	11
	Sungai Langkok	690	642	16	32
	Koto Beringin	503	311	70	122
Koto Salak	Ampalu	839	143	486	210
	Simalidu	716	279	322	115
	Pulau Mainan	1114	717	335	62
	Koto Salak	995	296	653	46
	Padukuan	965	691	326	0
Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	1227	511	663	53
	Kurnia Koto Salak	1117	802	226	89
	Kurnia Selatan	2065	1810	189	66
	Sungai Rumbai	1497	510	845	142
Koto Besar	Koto Ranah	972	735	237	10
	Koto Gadang	1169	203	856	100
	Koto Tinggi	769	482	281	6
	Koto Laweh	885	86	617	182
	Abai Siat	1227	0	932	295
	Bonjol	527	31	115	381
	Koto Besar	213	78	37	98
Asam Jujuhan	Tanjung Alam	200	0	40	160
	Sinamar	791	55	489	
	Alahan Nan Tigo	744	0	528	
	Sungai Limau	426	0	255	
	Lubuk Besar	327	84	196	
Total *)	Total *)	58526	16972	35118	

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara lain:

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan. Pemberdayaan. Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPERIDA sebagai coordinator

2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Air Minum.
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Air Minum berbasis masyarakat

Beberapa Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

3. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN $= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100\%$ $= \frac{54110}{58.526} * 100\% = 92.45\%$
--

3.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
87.25 %	97%	92.45%	95.31%	Sangat Berhasil	100 %	92.45%

Sumber Data: Dinas PUPR. 2024

Capaian indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 87,25% pada tahun 2020 menjadi 92,45% di tahun 2024. Meskipun target tahun 2024 sebesar 97% belum sepenuhnya

tercapai, namun capaian 95,31% dari target akhir RPJMD 2026 (100%) menunjukkan tren yang sangat positif. Dengan kategori sangat berhasil, diharapkan upaya peningkatan terus dilakukan agar target akhir dapat tercapai sesuai rencana.

Berikut adalah perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir.

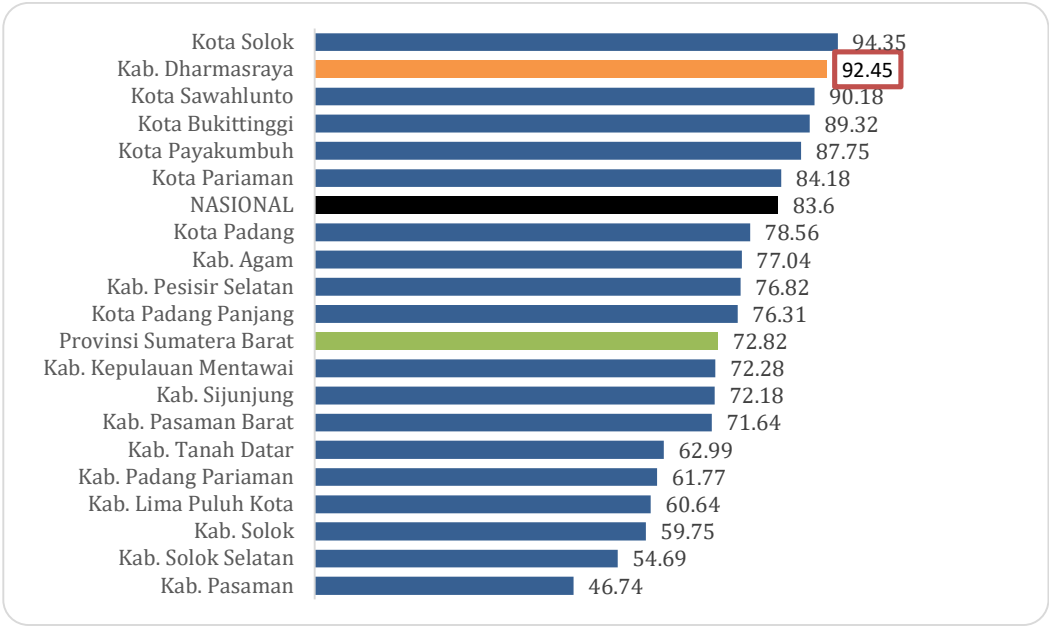
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	87.25%	80.00%	91.70%	→	Sangat Berhasil
2022	92%	91.73%	99.70%	↑	Sangat Berhasil
2023	95%	92.50%	97.36%	↓	Sangat Berhasil
2024	97%	92.45%	95.31%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya 2024

Capaian akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir. Meskipun target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, realisasi terus meningkat dengan capaian kinerja yang konsisten dalam kategori Sangat Berhasil. Pada 2021, capaian mencapai 91,70%, meningkat signifikan pada 2022 hingga 99,70%. Namun, sejak 2023, tren sedikit menurun, dengan capaian 97,36% di 2023 dan 95,31% di 2024. Hal ini menunjukkan perlunya strategi lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan akses sanitasi layak.

Grafik 3.4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2024

Kabupaten Dharmasraya memiliki persentase akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 92,45%, yang merupakan peringkat kedua tertinggi di Sumatera Barat, hanya di bawah Kota Solok (94,35%). Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (72,82%) dan nasional (83,6%), capaian Dharmasraya jauh lebih baik, menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki akses sanitasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Dharmasraya berada di posisi terdepan di antara kabupaten, dengan hanya kota-kota besar yang memiliki akses lebih tinggi, seperti Kota Solok. Kabupaten lain seperti Pasaman (46,74%), Solok Selatan (54,69%), dan Lima Puluh Kota (60,64%) memiliki akses yang jauh lebih rendah.

Secara keseluruhan, Dharmasraya menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan akses sanitasi layak, melampaui rata-rata provinsi, nasional, serta sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan antara lain:

- 1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat berupa pembangunan tangki septik individual setempat 16 unit
- 2. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
- 3. pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) berupa pemeriksaan sampel air limbah ipal komunal
- 4. operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), berupa :
 - a. Pemeriksaan Sampel Air Limbah IPLT Sitiung V Ragusa
 - b. Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

Tabel 3.11 Akses Limbah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

KECAMATAN	TARGET RT	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
IX KOTO	2,476	1,617	-	859	-	-
PULAU PUNJUNG	10,264	486	-	8,768	1,035	-
SITIUNG	6,589	723	-	5,265	601	-
TIMPEH	4,034	14	347	3,292	383	-
PADANG LAWEH	1,320	-	119	1,090	111	-
KOTO BARU	12,070	70	29	11,961	10	-
TIUMANG	2,988	-	148	2,179	30	631
KOTO SALAK	4,629	150	92	4,176	51	160

KECAMATAN	TARGET RT	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
SUNGAI RUMBAI	5,906	105	121	5,200	376	104
KOTO BESAR	5,762	324	125	5,335	3	-
ASAM JUJAHAN	2,488	979	247	1,262	-	-
TOTAL	58,526	4,468	1,228	49,387	2,600	895

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

Permasalahan yang terdapat pada pencapaian kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah antara lain :

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi air limbah POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koodinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPERIDA sebagai coordinator
2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan membangun sarana dan prasarana lainnya dibanding pmbangunan sarana dan prasarana Sanitasi
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

Solusi :

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koodinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey sanitasi
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN

4. PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

= Luas Kawasan kumuh yang terlayani (luas Kawasan kumuh tahun 2021-luas Kawasan kumuh tahun 2024)/Luas Kawasan Kumuh Yang Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati Berdasarkan Kriteria Teknis Tertentu *100

$$= \frac{(337.36 - 102.02 \text{ Ha})}{33.36 \text{ ha}} * 100\%$$

$$= 69.76\%$$

4.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dalam rentang waktu dua tahun, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan dalam luas kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Luas kawasan kumuh telah berkurang sebesar 235.34 hektar, menunjukkan upaya yang sukses dalam program penurunan kawasan kumuh. Dengan penurunan sebesar 235.34 hektar dari total luas kawasan kumuh pada tahun 2021 yang mencapai 337.36 hektar, persentase kawasan kumuh yang berhasil diperbaiki mencapai 69.76%. Hal ini mencerminkan kesuksesan program-program rehabilitasi kawasan kumuh yang telah diterapkan. Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
22.7 %	68	69.76	102.59%	Memuaskan	68.66 %	101.6%

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Capaian indikator menunjukkan peningkatan signifikan dari 22,7% pada tahun 2020 menuju target 68% di tahun 2024, dengan realisasi mencapai 69,76% atau 102,59% dari target yang ditetapkan, sehingga mendapat predikat Memuaskan. Selain itu, dengan target akhir RPJMD 2026 sebesar 68,66%, capaian tahun 2024 sudah mencapai 101,6% dari target tersebut, menandakan bahwa sasaran hampir tercapai lebih awal. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan serta keberhasilan dalam melampaui perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	36.14%	22.70%	63.05%	→	Cukup Berhasil
2023	43.03%	68%	157.99%	↑	Memuaskan
2024	68	69.76	102.59%	↓	Memuaskan

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Tren capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, di mana realisasi naik dari 22,70% menjadi 68%, melampaui target dengan capaian 157,99%,

sehingga mendapat predikat Memuaskan. Namun, pada tahun 2024, meskipun realisasi meningkat menjadi 69,76%, capaian terhadap target mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 102,59%, meski tetap dalam kategori Memuaskan. Secara keseluruhan, kinerja menunjukkan progres yang baik, dengan lonjakan signifikan di tahun 2023 dan sedikit perlambatan di 2024, yang tetap perlu dimonitor agar tren positif dapat dipertahankan.

Tabel 3.14 Data Kawasan Lingkungan Kumuh Tahun 2024

No	Kecamatan	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (2024)		Luas Yang Ditangani (Ha) (2024)		Sisa Permukiman Kumuh
		Nama	Luas (Ha)			
1	Sembilan Koto	Silago	1.68			1.68
2	Pulau Punjung	Tarandam Sungai Kambut	3.59	0.65		2.94
		Lambau	3.7			3.7
3	Sitiung	Siguntur 2	8.31	0.15		8.16
		Koto / Sungai Duo	7.32	0.35		6.97
4	Timpeh	Marga Makmur	2.13	0.65		1.48
		Sungai Bulian	8.82	0.55		8.27
5	Koto Baru	Lubuk Agam	3.37			3.37
		Koto Gadang	5.24	0.15		5.09
		Cangkir batu	3.63			3.63
		Teluk Alai	9.53			9.53
7	Tiumang	Sungai Langkok	3.4	0.5		2.9
		Sipangkur	5.81			5.81
8	Padang laweh	Sopan Jaya	2.04			2.04
9	Sungai Rumbai	Balai Tengah	6.25	0.3		5.95
10	Koto Besar	Tuo	4	0.25		3.75
		Ranah	3.13			3.13
		Padang Bungur	7.29	2.4		4.89
11	Asam Jujuhan	Bukit Sembilan /Lubuk Baru	9.75			9.75

	Sungai Limau	8.99	8.99
TOTAL		107.98	5.7
			102.28

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dari kondisi awal (2020) RPJMD hingga realisasi tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya perbaikan atau pengembangan lingkungan permukiman kumuh selama periode tersebut.

1. PENYEBAB KEBERHASILAN

- a. Implementasi Program yang Efektif. terdapat implementasi program yang efektif dalam meningkatkan kondisi lingkungan permukiman kumuh. Program-program ini mungkin mencakup upaya rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, atau penyediaan layanan dasar yang memadai.
- b. Komitmen Bupati dengan adanya alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
- c. Partisipasi Masyarakat yang aktif dari masyarakat setempat dalam program-program yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanggulangan sampah.

2. ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penguatan Program yang Berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat program-program yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Ini termasuk alokasi sumber daya yang cukup, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pemeliharaan lingkungan.
- c. Kolaborasi dengan instansi Pemerintah maupun swasta untuk penanggulangan Kawasan lingkungan kumuh

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh, serta memastikan keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Dinas Perkimtan telah menetapkan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani. Program yang dijalankan adalah Program Kawasan Permukiman dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Analisis mendalam terhadap program dan kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan peremajaan/pemugaran permukiman kumuh memainkan peran penting dalam mencapai target indikator. Kegiatan ini melibatkan pembenahan fisik lingkungan permukiman. seperti infrastruktur. akses jalan. dan fasilitas publik lainnya. yang secara langsung mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal.
2. Keterbatasan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan. seperti proses pengadaan yang lambat. kurangnya koordinasi antar instansi terkait. atau perubahan kebijakan yang tidak terduga. dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program.
3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. termasuk identifikasi dan penanganan sumber daya yang tidak efisien atau terbuang. untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian. diperlukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dengan lebih baik di masa mendatang.

5. RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI $= \frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Pemukiman}} * 100\% = \frac{2128.69 \text{ Ha}}{2467 \text{ Ha}} * 100\% = 86.29 \%$

5.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Luas Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya sekitar 2.467 hektar dan 84.24% dari total luas wilayah permukiman di Kabupaten Dharmasraya telah dianggap layak huni. Ini menunjukkan tingkat kelayakan yang cukup tinggi dalam wilayah permukiman. namun juga menyoroti potensi untuk meningkatkan kondisi hunian di sisa wilayah tersebut. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor seperti infrastruktur. aksesibilitas. dan kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan proporsi permukiman yang layak huni di masa mendatang. Capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
83.88%	94.25%	86.29%	91.55%	Sangat Berhasil	100%	86.29

Sumber Data: Dinas Perkimtan. 2024

Capaian indikator menunjukkan peningkatan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 83,88% menuju target tahun 2024 sebesar 94,25%, dengan realisasi mencapai 86,29% atau 91,55% dari target yang ditetapkan. Predikat yang diperoleh adalah sangat berhasil. Dengan target akhir RPJMD 2026 sebesar 100%, capaian tahun 2024 telah mencapai 86,29% dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa progres menuju target akhir berjalan dengan baik, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran penuh pada tahun 2026, perbandingan dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Permukiman Layak Huni			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	85.85	83.99	97.83%	→	Sangat Berhasil
2022	88.65	84.15	94.93%	↓	Sangat Berhasil
2023	91.45	84.31	92.19%	↓	Sangat Berhasil
2024	94.25	86.29	91.55%	↓	Sangat Berhasil

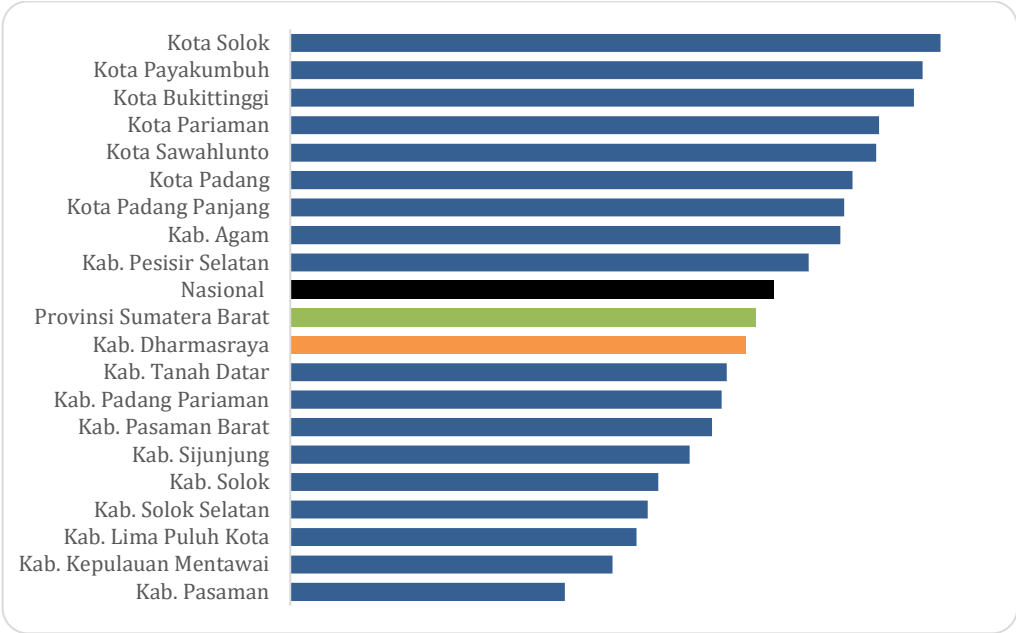
Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Rasio permukiman layak huni menunjukkan tren peningkatan realisasi dari 83,99 pada tahun 2021 menjadi 86,29 pada tahun 2024, meskipun capaian kinerja terhadap target mengalami sedikit penurunan dari 97,83 persen pada 2021 menjadi 91,55 persen pada 2024. Meskipun tren menunjukkan perlambatan, capaian setiap tahun tetap berada dalam kategori sangat berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, perkembangan yang konsisten terus mendekatkan pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya dibandingkan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa capaian Dharmasraya masih perlu ditingkatkan untuk mendekati atau melampaui rata-rata provinsi. Dibandingkan dengan daerah lain, Dharmasraya memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan strategi pembangunan dan kebijakan

yang lebih efektif. Upaya perbaikan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan indikator yang diukur, dapat membantu Dharmasraya naik peringkat dan mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang, posisi Dharmasraya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2024

5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah permukiman layak huni, seiring dengan kebijakan nasional yang mendorong akses hunian yang lebih baik bagi masyarakat. Program nasional seperti **100-0-100**, yang bertujuan mencapai 100% akses air minum layak, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan kebijakan daerah. S

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor utama, seperti adanya regulasi yang jelas, alokasi anggaran daerah yang cukup memadai, serta koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk program permukiman telah terserap hampir sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung perbaikan permukiman. Melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau pendekatan berbasis komunitas, revitalisasi kawasan kumuh dapat

dilakukan lebih cepat dan menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Dharmasraya dapat mencapai target RPJMD 2026 dan semakin mendekati tujuan nasional dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni dan bebas dari kawasan kumuh.

1. Penyebab keberhasilan mencapai indikator
Adanya kerjasama dengan developer untuk penyediaan rumah yang layak huni di daerah.
2. Penyebab kegagalan pencapaian indikator
 - a. Karena tidak dapat mengetahui kepastian jumlah rumah swadaya yang terbangun di nagari-nagari setiap tahunnya.
 - b. Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai
3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - a. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik.
 - b. Aspirasi dewan yang ada pada Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang lokasinya berada di kawasan kumuh. maka akan dimasukkan pada DPA untuk peningkatan dan pembangunan rumah layak huni.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

6. PERSENTASE LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN KONDISI BAIK

Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

$$= \frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} * 100\% = \frac{1.612 \text{ km}}{2.31 \text{ km}} * 100\% = 69,57\%$$

6.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Luas daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 1683.95 km. dari total luas seluruh daerah irigasi dalam kewenangan Kabupaten Dharmasraya. yang mencapai 2205 km. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi luas daerah irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total daerah irigasi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah sekitar 76.34%. Capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.36 %	76.36%	69.57%	91.11%	Sangat	73.5 %	91.11%

Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Capaian indikator dalam tabel menunjukkan peningkatan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 67,36% menjadi realisasi 69,57% pada tahun 2024, meskipun masih di bawah target tahun 2024 sebesar 76,36%. Dengan capaian sebesar 91,11% terhadap target akhir RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 73,5%, indikator ini telah masuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama periode berjalan cukup efektif, namun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan, untuk melihat perkembangan kinerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	67.36%	70.40%	104%	→	Memuaskan
2022	71%	73.85%	104%	→	Memuaskan
2023	76.37%	76.37%	100.00%	↓	Sangat Berhasil
2024	76.36%	69.57%	91.11%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Tren capaian persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan hasil yang memuaskan pada tahun 2021 dan 2022, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 104% dari target. Pada tahun 2023, capaian mencapai 100% sesuai target dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Namun, pada tahun 2024, realisasi mengalami penurunan menjadi 69,57%, atau 91,11% dari target yang ditetapkan, meskipun masih dalam kategori sangat berhasil. Penurunan capaian ini menunjukkan perlunya evaluasi dan upaya lebih lanjut untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal di tahun mendatang.

Tabel 3.20 Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

Kewenangan	Luas Daerah Irigasi Berdasarkan Permen 14/2015	Berfungsi dengan Pemetaan IGT	%
Kabupaten Dharmasraya	2.317 Ha	1.612 Ha	69.57
Provinsi Sumatera Barat	65.007 Ha	32.787 Ha	50.43
Nasional	7.1juta Ha	3.8juta Ha	53.52

Sumber Data: data.sumbarprov.go.id, Dinas PUPR Dharmasraya dan Kementerian PUPR, 2024

Kabupaten Dharmasraya memiliki luas daerah irigasi sebesar 2.317 hektare, dengan 1.612 hektare di antaranya berfungsi sesuai pemetaan IGT, mencapai 69,57%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 50,43% dari total 65.007 hektare, serta rata-rata nasional sebesar 53,52% dari total 7,1 juta hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan daerah irigasi di Dharmasraya lebih optimal dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas irigasi secara menyeluruh.

6.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan

- a. Konsistensi dalam Perawatan dan Pemeliharaan: Terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat konsistensi dalam upaya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Realisasi capaian kinerja selalu melebihi atau setidaknya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perawatan infrastruktur irigasi dilakukan secara konsisten dan efektif selama periode tersebut.
- b. Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat: Peningkatan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh pengalokasian sumber daya yang tepat, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun peralatan. Adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif memungkinkan pelaksanaan program perawatan infrastruktur irigasi berjalan dengan baik.

Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas yang saling mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

- a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan.
- b. Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan

3. Solusi atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarap nya sudah siap.

- b. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk terwujudnya persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam Kondisi baik di dukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2026 mempunyai kriteria penilaian yang tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang mencapai 100 %. Setelah dicermati lebih mendalam ternyata penentuan target capaian indikator yang memang terlampau kecil, yaitu hanya 2 persen dari kondisi tahun sebelumnya.

7. INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Tidak ada penilaian dan data terkait pengendalian daya rusak air, sehingga tidak dapat diukur untuk ketercapaian indikator kinerja ini

MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

8. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup = Rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x
= 74.25 Tahun

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Angka ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program, seperti layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam evaluasi kinerja, UHH digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan

berkelanjutan telah tercapai dan menjadi dasar perencanaan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

8.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
71.33	72.24	74.25	102.78%	Memuaskan	72.42	102.53%

Sumber : BPS. diolah oleh Dinas Kesehatan Dharmasraya. 2024

Berdasarkan data indikator kinerja usia harapan hidup, terjadi peningkatan signifikan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 71,33 menjadi 74,25 pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 ini tidak hanya melampaui target tahun 2024 sebesar 72,24 (102,78%) tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 72,42 (102,53%). Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan usia harapan hidup yang lebih cepat dari proyeksi awal. Untuk mendapatkan gambaran tren perkembangan ini, penting untuk melihat capaian kinerja usia harapan hidup dalam empat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Harapan Hidup			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	71.51	71.53	102.74%	→	Memuaskan
2022	71.69	71.9	100.30%	↓	Memuaskan
2023	71.87	72.24	100.50%	↑	Memuaskan
2024	72.24	74.25	102.78%	↑	Memuaskan

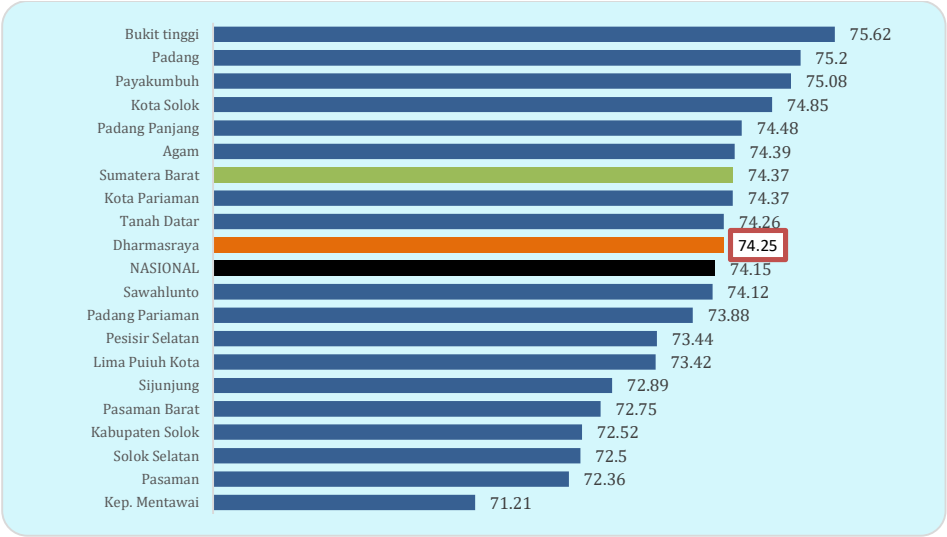
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh Dinas Kesehatan. 2024

Pada tahun 2024, capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 74.25 dari target 72.24, menghasilkan capaian kinerja sebesar 102.78%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perbaikan yang substansial dalam kinerja daerah. Tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan serta komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan predikat *Memuaskan*, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Dharmasraya mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan performanya dari tahun ke tahun.

Untuk melihat bagaimana capaian ini dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat serta tingkat nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.5 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024

Data pada grafik menunjukkan angka harapan hidup di berbagai daerah di Sumatera Barat, dengan Bukit tinggi memiliki angka tertinggi sebesar 75,62 dan Kepulauan Mentawai yang terendah dengan 71,21. Kabupaten Dharmasraya mencatat angka 74,25, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di 74,15. Angka harapan hidup di Sumatera Barat secara umum cukup baik, dengan sebagian besar daerah mencatat nilai di atas rata-rata nasional, menunjukkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang relatif tinggi di wilayah tersebut. Namun, terdapat variasi antar daerah yang mencerminkan perbedaan dalam akses layanan kesehatan, infrastruktur, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.

8.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja usia harapan hidup, Dinas Kesehatan mendukung melalui dua sasaran kinerja dengan sembilan indikator kinerja. Dengan tercapainya sasaran kinerja tersebut, usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya turut mengalami peningkatan. Berikut adalah capaian kinerja yang mendukung pencapaian usia harapan hidup pada tahun 2024.

Tabel 3.23 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	183	187	97,8
		Angka Kematian Bayi (AKB)	16	13	118,7
		Prevalensi Malnutrisi	9%	5,5%	138,8
		Presentase Rumah Tangga PHBS	55%	55,20%	100,4
		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75%	75%	100
		Presentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	100%	100%	100
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100%	100%	100
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	99,46%	99,46
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Visite Rate	5	5,32	101
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	100%	100%	100
		Presentase UPT RSUD Terakreditasi	100%	100%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2024

Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Dukungan pemerintah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir secara jelas tergambar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan No 1. 2 dan 3 dimana Seluruh Ibu Hamil. ibu melahirkan. ibu nifas dan bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. selain itu. dukungan berupa anggaran dari Dana Alokasi Khusus non Fisik seperti Jaminan Persalinan atau yang lebih sering disebut Jampersal diberikan dalam mendukung peningkatan keselamatan ibu melahirkan sehingga mengurangi Angka Kematian Ibu dan bayi karena keterlambatan merujuk.
2. Komitmen kepala daerah dengan seluruh camat dan OPD terkait yang menyatakan tidak ada lagi BABS di Kabupaten Dharmasraya.

3. Adanya alokasi anggaran dana alokasi khusus bidang kesehatan DAK Non Fisik yang membantu pembiayaan kegiatan program baik di dinas kesehatan maupun puskesmas untuk akreditasi dan re akreditasi puskesmas. termasuk pembiayaan kepesertaan JKN bagi Masyarakat ekonomi menengah ke bawah. selain itu alokasi anggaran yang cukup memastikan pemenuhan sarana dan prasarana bidang Kesehatan dapat perlahan dipenuhi
4. Terdeteksi secara dini kasus – kasus potensial KLB di lapangan. karena adanya laporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) mingguan puskesmas berbasis aplikasi
5. Sudah adanya 3 Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) Kabupaten Dharmasraya untuk penjangkauan dan pengobatan kasus HIV
6. Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan. dimana dijelaskan semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus segera melakukan persiapan dan survey akreditasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan paling lambat tanggal 31 desember tahun 2023 semua FKTP sudah terakreditasi.
7. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya 94.2% pengelolaan keuangan dengan BLUD. tinggal 1 puskesmas yang masih berproses untuk BLUD. dan 15 UPT sudah bekerjasama dengan BPJS.
8. Adanya program nusantara sehat. sehingga dapat memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas. khususnya di puskesmas kawasan pedesaan dan kawasan terpencil

Dalam analisis kinerja indikator usia harapan hidup. kami menemukan beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target yang ditetapkan antara lain:

1. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan. Masih ada persalinan yang ditolong non Kesehatan. serta belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin. selain itu Masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi dan Masih ditemui remaja anemia. ibu hamil KEK dan Bayi dengan BBLR
2. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan ke daerah sulit/terpencil.
3. Kurangnya SDM Kesehatan. kurangnya pelatihan dan diklat kepada SDM Kesehatan yang mendukung kegiatan program. serta kurangnya memadai nya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan kepada ibu maternal dan bayi belum maksimal.
4. Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait. tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan

5. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat serta partisipasi Masyarakat dalam rangka mengentaskan penyakit tidak menular dan penyakit menular yang ada di lingkungan sekitar Masyarakat
6. Sedangkan untuk mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dapat dianalisa beberapa masalah antara lain kurangnya komitmen puskesmas dalam melaksanakan implementasi kegiatan program dan pelayanan pasca akreditasi. sarana. prasarana dan alkes di Puskesmas yang belum memenuhi standar serta tenaga Kesehatan di puskesmas belum memenuhi sembilan ketenagaan yang wajib ada di puskesmas sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas
7. Minimnya alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan termasuk pengadaan prasarana dan alat Kesehatan. karena saat ini. Sebagian besar anggaran perbaikan sarana. prasarana dan pengadaan alat puskesmas serta perbaikan kualitas mutu pelayanan Kesehatan dibebankan kepada anggaran DAK. BOK. serta APBN.

Dalam rangka menangani permasalahan ini. diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama lintas sektor. peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer. program pendidikan kesehatan yang terfokus. serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan mengidentifikasi akar masalah ini. diyakini bahwa tindakan yang tepat dan terkoordinasi dapat diambil untuk meningkatkan kinerja indikator usia harapan hidup dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam mencapai kinerja ini, Penggunaan sumber daya dibutuhkan untuk mencapai kinerja usia harapan hidup. beberapa Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah adanya kelompok- kelompok pos bindu di sekolah dan di perkantoran
2. Adanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/JPTS-BUP/2022 tertanggal 1 November 2022. Dimana masing –masing OPD terkait mengambil peran penting dalam rangka penanggulangan ODGJ berat. sehingga kendala dalam merujuk pasien ODGJ berat karena factor ekonomi dan tidak adanya kartu JKN sudah mulai dapat teratasi.
3. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya. dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/65/KPTS-BUP/2022. tanggal 19 Januari 2022
4. Evaluasi Infrastruktur Kesehatan dengan melakukan analisis jumlah. lokasi. dan kapasitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas. rumah sakit. dan posyandu. Hal ini digunakan untuk menganalisa ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya kesehatan.
5. Penilaian Alokasi Sumber Daya yaitu meninjau alokasi sumber daya kesehatan. termasuk anggaran. tenaga medis. dan peralatan medis. untuk menilai efisiensi penggunaannya. hal

ini dilaksanakan untuk memeriksa apakah sumber daya tersebut dialokasikan secara proporsional untuk mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan penyakit.

6. Ketersediaan Layanan Kesehatan Primer, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan konseling kesehatan. Kami mengevaluasi efisiensi operasional puskesmas dan posyandu dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
7. Penggunaan Teknologi dan Inovasi
8. Kerjasama dan Koordinasi Antar instansi, Pemerintah Daerah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

9. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

= JUMLAH TAHUN YANG DIGUNAKAN OLEH PENDUDUK DALAM MENJALANI PENDIDIKAN FORMAL (data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik = 8.98 tahun

9.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
8.47	8.71	8.98	103.10%	Memuaskan	8.50	105.65%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Capaian indikator pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 8.98 tahun, melampaui target yang ditetapkan yaitu 8.71 dengan tingkat pencapaian 103.10%, sehingga memperoleh predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 8.50, realisasi tahun 2024 telah mencapai 105.65% dari target tersebut. Hal ini menunjukkan progress yang sangat baik dalam pencapaian sasaran, bahkan melampaui ekspektasi yang direncanakan, untuk melihat tren pencapaian kinerja, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.25 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

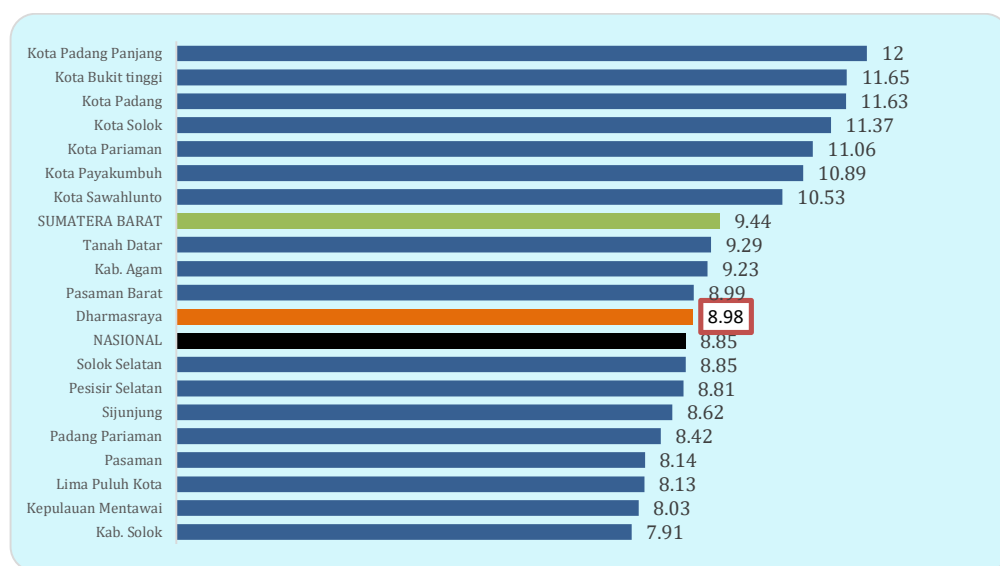
Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	8.48	8.55	100.83	➡	Memuaskan
2022	8.48	8.56	100.94	⬆	Memuaskan

2023	8.56	8.71	101.75	↑	Memuaskan
2024	8.71%	8.98%	103.10%	↓	Memuaskan

Sumber Data: BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan capaian kinerja yang selalu melebihi target dan memperoleh predikat memuaskan. Pada tahun 2024, meskipun capaian masih lebih tinggi dari target dengan persentase 103.10%, tren menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, indikator ini mengalami perkembangan positif, namun perlu perhatian agar peningkatan tetap berkelanjutan dan tidak mengalami perlambatan di tahun-tahun mendatang.

Grafik 3.6 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Badan Pusat Statistik, .2024

Kabupaten Dharmasraya mencatat angka rata-rata lama sekolah sebesar 8.98, yang berada di atas angka nasional (8.85) dan sedikit di bawah Pasaman Barat (8.99). Dibandingkan dengan rata-rata Sumatera Barat (9.44), Dharmasraya masih berada di bawah angka provinsi, tetapi tetap menunjukkan capaian yang baik. Posisi ini mencerminkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akses pendidikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mendekati atau melampaui rata-rata Provinsi.

9.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 antara lain:

Tabel 3.26 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA
Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	APK PAUD	72.44%
	APK SD/MI	89.28%
	APK SMP/MTs	85.78%
	APM SD/MI	94.23%
	APM SMP/MTs	84.92%

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya . 2024

Hasil pengukuran atas target dan realisasi indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan sudah melebihi target RPJMD tahun 2026 Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Di tahun 2024. sudah tidak ada lagi Penduduk yang tamat SD lebih dari 6 tahun. tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun. Selain itu. hal yang mendukung pemenuhan angka rata-rata lama sekolah seperti terpenuhinya ruang kelas baru. terbangunnya sekolah baru dengan jarak tempuh dekat dengan warga serta kecilnya angka putus sekolah di tahun 2024.

Selain itu, pencapaian kinerja angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Berkurangnya tingkat kemiskinan pada masyarakat berdampak pada peningkatan akses pendidikan. Masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.
2. Pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang layak, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar semakin meningkat berkat program wajib belajar 9 tahun. Program ini memastikan bahwa anak-anak menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar dan menengah pertama.
4. Adanya anggaran yang cukup untuk mendukung operasional pendidikan, baik dari APBD maupun dana BOS, membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.
5. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan turut berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru telah mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif

10. HARAPAN LAMA SEKOLAH

HARAPAN LAMA SEKOLAH

= LAMANYA SEKOLAH (DALAM TAHUN) YANG DIHARAPKAN AKAN DIRASAKAN OLEH ANAK PADA UMUR TERTENTU DIMASA MENDATANG

= 12.89 Tahun

10.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian(%)			
12.43	12.68	12.89	101.66	Memuaskan	12.46	103.45%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan angka pada indikator ini, dengan realisasi tahun 2024 mencapai 12.89, melebihi target yang ditetapkan sebesar 12.68 dengan capaian 101.66%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 sebesar 12.46, pencapaian tahun 2024 sudah mencapai 103.45%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dengan predikat memuaskan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan sektor terkait, meskipun tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga tren positif hingga akhir periode RPJMD. Untuk melihat perkembangan kinerja harapan lama sekolah dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

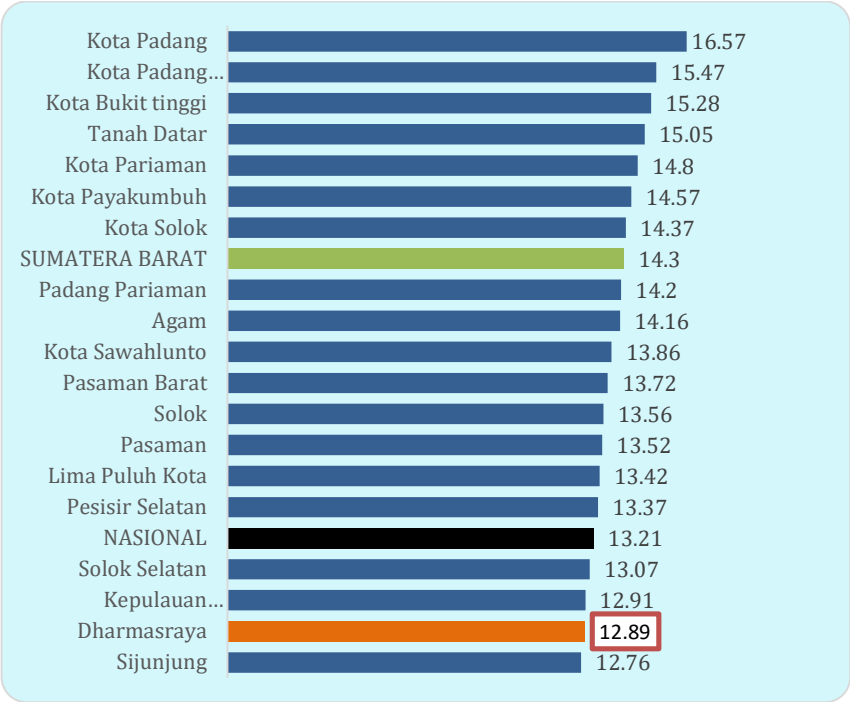
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	12.44	12.44	100.00%	→	Sangat Berhasil
2022	12.44	12.51	100.56%	↑	Memuaskan
2023	12.51	12.68	101.36%	↑	Memuaskan
2024	12.68	12.89	101.66%	↑	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan capaian kinerja yang selalu melampaui target. Pada 2021, realisasi sesuai dengan target, sementara tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan, mencapai 101.66% pada 2024 dengan predikat memuaskan. Tren positif ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga perlu dipertahankan agar terus memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.

Grafik 3.7 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Badan Pusat Statistik Nasional,2024

10.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 yaitu Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 3.29 Persentase Partisipasi Masyarakat Dharmasraya mengikuti pendidikan dasar

Indikator	Realisasi Kinerja
Persentase warga negara 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91.09%
Persentase warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	66.76%

Sumber : Dinas Pendidikan Dharmasraya, 2024

Tingkat partisipasi pendidikan dasar bagi warga negara usia 7-15 tahun mencapai 91,09%, menunjukkan bahwa mayoritas anak dalam rentang usia tersebut telah mengakses pendidikan dasar. Sementara itu, partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk usia 5-6 tahun sebesar 66,76%, yang mencerminkan masih adanya tantangan dalam mendorong anak-

anak untuk mengikuti pendidikan di usia dini. Keterlibatan dalam PAUD berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan harapan lama sekolah.

Selain itu, beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Dharmasraya berperan besar dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah. Akses ke fasilitas pendidikan yang layak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Kebijakan wajib belajar 9 tahun mendorong peningkatan angka harapan lama sekolah karena semakin banyak anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
3. Tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi faktor utama. Masyarakat lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.
4. Adanya anggaran yang dialokasikan dari APBD dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) turut membantu dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

SASARAN STRATEGIS 2.1.3 MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

11. INDIKATOR SASARAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
= PERBANDINGAN (RASIO) CAPAIAN ANTARA IPM PEREMPUAN DENGAN IPM LAKI-LAKI.
= 89.

11.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
88.31	89.34	89.58	100.27%	Memuaskan	89.67	99.9

Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Tingkat capaian kinerja yang diukur dari indikator tertentu menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian awal sebesar 88,31 meningkat menjadi 89,58 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,34 dengan capaian 100,27% dan memperoleh predikat "Memuaskan". Dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 89,67, capaian saat ini telah mencapai 99,9% dari target tersebut, menunjukkan bahwa

kinerja pemerintah daerah berada pada jalur yang tepat dan hampir mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

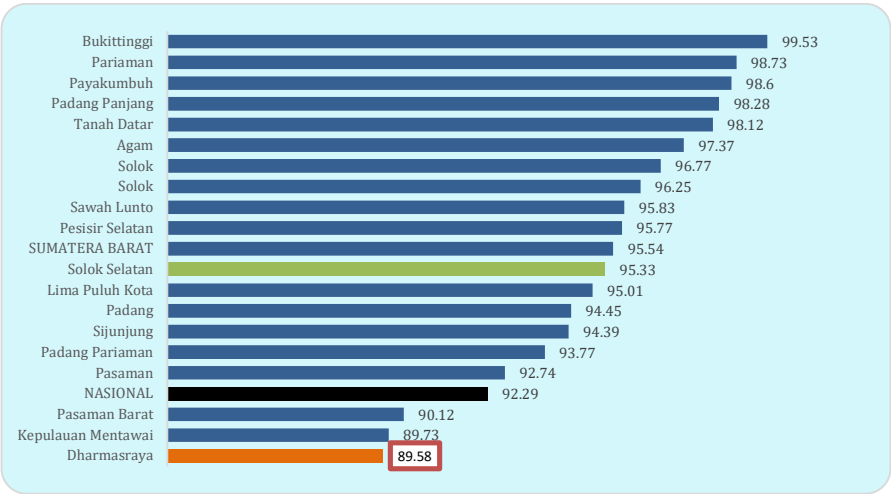
Tabel 3.31 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Gender			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	88.35	88.32	99.97%	→	Sangat Berhasil
2022	89	88.56	99.23%	↓	Sangat Berhasil
2023	89.17	88.56	99.32%	↑	Sangat Berhasil
2024	89.34	89.58	100.27%	↑	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Indeks Pembangunan Gender mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, namun tetap berada dalam kategori pencapaian yang tinggi. Meskipun realisasi tahun 2021 dan 2022 sedikit di bawah target dengan capaian kinerja masing-masing 99,97% dan 99,23%, tren kembali meningkat pada 2023 dengan capaian 99,32%. Pada 2024, indeks mencapai 89,58, melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,34 dengan capaian 100,27% dan memperoleh predikat "Memuaskan". Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang mendukung kesetaraan gender terus mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan target pembangunan daerah.

Grafik 3.8 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Catalog Analisis Gender Sumatera Barat, Vol-1, 2024

Di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/kota dengan kategori kesetaraan menengah ada 4 (empat) yaitu Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat ada pada kategori kesetaraan menengah rendah,

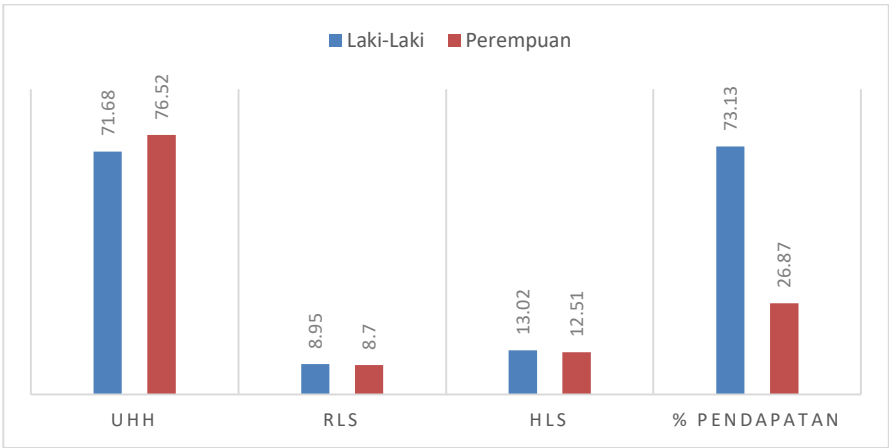
sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya masih pada kategori kesetaraan gender rendah.

11.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung berdasarkan data pembangunan IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021-2024 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Kabupaten Dharmasraya telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Hal ini didukung dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat setiap tahun namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Tabel 3.32 Indikator Perhitungan IPG menurut Jenis Kelamin (Usia Harapan Hidup, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan) tahun 2024



Sumber : Catalog Analisis Gender Sumatera Barat, Vol-1, 2024

Berdasarkan data Indikator IPG Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki (76,52 tahun berbanding 71,68 tahun), serta kesenjangan dalam pendidikan relatif kecil, namun Indeks

Pembangunan Gender (IPG) masih tergolong rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan.

Persentase pendapatan perempuan hanya mencapai 26,87%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 73,13%. Kesenjangan ini menunjukkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi, baik dalam hal pekerjaan, penghasilan, maupun peran dalam sektor produktif.

Meskipun perempuan memiliki potensi untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan, namun ketimpangan dalam akses ekonomi menjadi faktor utama yang menahan peningkatan IPG. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Dharmasraya perlu difokuskan pada peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan, peluang usaha, serta dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

MISI 3. MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Tujuan 3.1 Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH

12. PDRB PER KAPITA

PDRB PER KAPITA
= JUMLAH NILAI TAMBAH YANG DIHASILKAN OLEH SELURUH UNIT USAHA PER JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (DATA DHARMASRAYA DALAM ANGKA)
= 58.71 Juta Rupiah

12.1.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.33 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
40.48	55.95	58.71	104.93%	Memuaskan	47.72	123.03%

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Pada tahun 2020, indikator awal menunjukkan angka 40,48. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 55,95, sementara realisasi mencapai 58,71 atau 104,93% dari target, sehingga memperoleh predikat "Memuaskan." Dengan target akhir RPJMD sebesar 47,72, capaian tahun 2024 telah mencapai 123,03% dari target tersebut, menunjukkan kinerja yang melampaui harapan dan progres yang signifikan menuju sasaran akhir.

Perbandingan beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menganalisis tren kinerja, mengidentifikasi efektivitas kebijakan atau program yang telah diterapkan, serta mengevaluasi

pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian PDRB perkapita dari hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

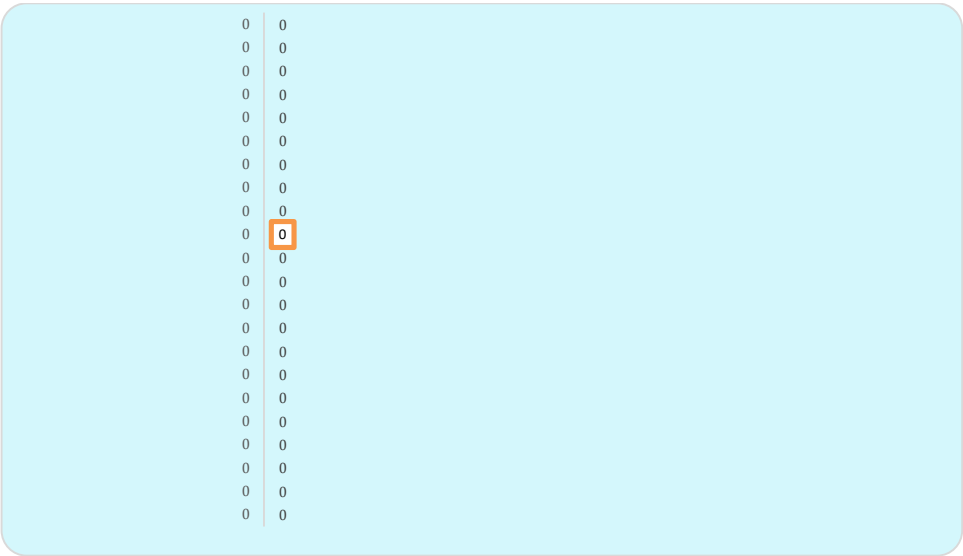
Tabel 3.34 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	42.83	46.449	108.45	➡	Memuaskan
2022	43.81	51.885	118.40%	⬇	Memuaskan
2023	44.79	55.62	124.19%	⬆	Memuaskan
2024	55.95	58.71	104.93%	⬇	Memuaskan

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Tren kinerja PDRB per kapita dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat secara keseluruhan. Pada 2021, capaian kinerja mencapai 108,45% dari target dan terus meningkat pada 2022 hingga 118,40%, meskipun mengalami sedikit penurunan tren. Tahun 2023 mencatat capaian tertinggi sebesar 124,19% dengan tren meningkat, namun pada 2024 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 104,93%. Meskipun terdapat variasi dalam tren, secara keseluruhan kinerja tetap dalam kategori "Memuaskan" dengan pencapaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber data: Publish BPS (Sumatera Barat Dalam Angka. 2025)

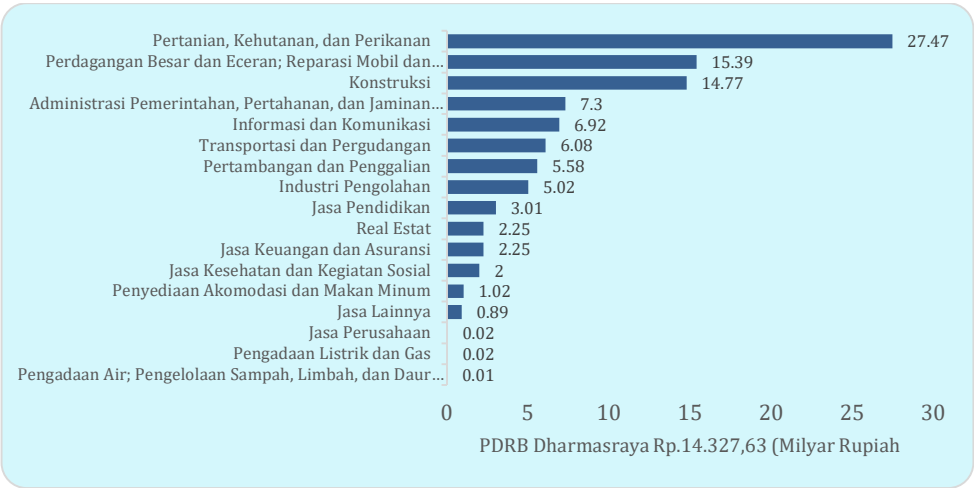
Kabupaten Dharmasraya memiliki PDRB per kapita sebesar 58.713,54, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 57.047,21. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Dharmasraya relatif lebih baik dibandingkan rata-rata

provinsi. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 78.620,00, capaian DharmaSraya masih berada di bawah standar Nasional. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang peningkatan dalam berbagai sektor ekonomi agar lebih kompetitif secara Nasional.

12.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator PDRB per kapita di Kabupaten DharmaSraya melibatkan beberapa faktor. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mempromosikan investasi, pengembangan sektor ekonomi yang potensial, dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memberikan kontribusi positif.

Grafik 3.9 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 (PDRB DharmaSraya)



Sumber: DharmaSraya Dalam Angka, 2025

Struktur PDRB per kapita berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar, yaitu 27,47%, mengindikasikan bahwa ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor signifikan kedua dengan 15,39%, diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 14,77%. Sektor-sektor lainnya, seperti Administrasi Pemerintahan (7,3%), Informasi dan Komunikasi (6,92%), serta Transportasi dan Pergudangan (6,08%), juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Sementara itu, sektor industri pengolahan hanya menyumbang 5,02%, menunjukkan bahwa hilirisasi industri masih perlu ditingkatkan. Dengan dominasi sektor primer dan perdagangan,

diversifikasi ekonomi, terutama melalui peningkatan sektor industri dan jasa, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan PDRB per kapita secara lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, kegagalan dalam mencapai target PDRB per kapita disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang potensial, kendala dalam pengembangan infrastruktur yang memadai, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan promosi investasi, mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan PDRB per kapita dan mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja PDRB perkapita:

1. Pengembangan sektor unggulan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan PDRB perkapita. Diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong adopsi teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja.
4. Investasi dalam Infrastruktur. Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB perkapita. Tenaga kerja yang terampil dan produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Program ini memiliki alokasi anggaran yang besar dan bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dalam rangka mendukung sektor perikanan. yang merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan PDRB per kapita.
7. Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan. kemitraan. dan penguatan kelembagaan. program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro. kecil. dan menengah (UMKM). yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
8. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri lokal. yang dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita.
9. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan. program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. yang merupakan salah satu sektor utama dalam kontribusi terhadap PDRB per kapita.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program di atas termasuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program. optimalisasi penggunaan anggaran. penguatan kerjasama antar instansi terkait. serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian. diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.

13. PDRB RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

$$= \frac{\text{Jumlah PDRB perkapita net ekspor}}{\text{PDRB per Kapita Tahun } n} * 100\%$$

$$= \frac{12.22}{14.327.63} * 100\% = 8.83\%$$

PDRB perkapita net ekspor Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 adalah 1.265,22 juta rupiah dari total PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sebesar 14.327,63 juta rupiah. jadi. PDRB perkapita net ekspor di Kabupaten Dharmasraya berkontribusi sekitar 8.83% terhadap total PDRB perkapita. Ini menunjukkan seberapa besar peran ekspor dalam menyumbang pendapatan per kapita di Kabupaten Dharmasraya. Semakin tinggi persentasenya. semakin besar kontribusi ekspor terhadap ekonomi lokal.

13.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.08	8.05%	8.83%	109.7	Memuaskan	3.8	232.39

Sumber Data : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Secara garis besar, Kabupaten Dharmasraya berkontribusi terhadap ekspor Provinsi Sumatera Barat. dari data BPS bulan Januari 2024 menunjukkan pola ekspor yang menjanjikan dengan fokus pada beberapa golongan barang utama. Pada bulan tersebut, golongan barang yang paling banyak diekspor adalah lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US\$100.01 juta, diikuti oleh berbagai produk karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US\$8.87 juta, dan sari bahan samak dan celup (HS 32) sebesar US\$5.24 juta.

Komoditi Dharmasraya utama untuk mendukung ekspor adalah Produk Karet dan Barang dari Karet (HS 40). Ekspor produk karet menunjukkan bahwa Dharmasraya memiliki potensi yang signifikan dalam industri karet. Produk karet dari daerah ini mungkin memiliki kualitas yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Dukungan dari pemerintah dan inisiatif swasta dalam pengembangan industri karet juga dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ekspor golongan ini.

Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Dharmasraya menurut data BPS tahun 2020 seluas 40.909 hektar atau 409 km². sedangkan luas daerah di Kabupaten Dharmasraya seluas 2.961.19 Km². artinya 13.8% Kawasan di Kabupaten Dharmasraya adalah Perkebunan karet. sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB

Tabel 3.37 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	3.15	3.06	97.10%	➡	Sangat Berhasil
2022	3.25	6.32	194%	⬆	Memuaskan
2023	3.4	8.05	236.65%	⬆	Memuaskan
2024	8.05	8.83	109.70%	⬇	Memuaskan

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Tren rasio net ekspor terhadap PDRB menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, capaian kinerja masih di bawah target dengan 97,10%, namun terjadi lonjakan drastis pada 2022 dengan capaian 194%, menandakan peningkatan ekspor yang signifikan dibandingkan impor. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan capaian 236,65%, mencerminkan kinerja ekspor yang semakin kuat. Namun, pada 2024, meskipun realisasi masih melampaui target dengan 109,70%, terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi untuk menjaga daya saing ekspor, mengoptimalkan nilai tambah produk lokal, serta menekan ketergantungan terhadap impor agar kontribusi net ekspor terhadap PDRB tetap stabil dan berkelanjutan.

13.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Dharmasraya memiliki peran dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jika rasio net ekspor terus meningkat, maka peran sektor ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin signifikan. Sebaliknya, jika nilai ini menurun, maka ketergantungan terhadap impor bisa menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan daya saing produk unggulan serta peningkatan nilai tambah komoditas ekspor menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.38 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Dharmasraya (miliar rupiah)

NO	Jenis Pengeluaran / Type of Expenditure	Nilai (Miliar Rp)	Persentase (%)
1	Perubahan Inventory / Changes in Inventories	-20,66	-0,14
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT / NPISH Consumption Expenditure	140,53	0,98
3	Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	1.265,22	8,83
4	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / Government Consumption Expenditure	1.102,38	7,70
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	4.116,18	28,73
7	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption Expenditure	7.723,98	53,92

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka, 2025

Rasio net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya mencapai 8,83%, menunjukkan bahwa sektor perdagangan luar negeri memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Nilai ini mencerminkan surplus ekspor barang dan jasa, yang berarti nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Kontribusi net ekspor yang cukup besar menunjukkan potensi Dharmasraya dalam menghasilkan produk yang kompetitif di pasar luar daerah atau internasional. Namun, jika dibandingkan dengan komponen lain seperti konsumsi rumah tangga (53,92%) dan investasi melalui PMTB (28,73%), peran ekspor masih relatif kecil dalam struktur PDRB. Optimalisasi sektor ekspor, baik melalui peningkatan produksi komoditas unggulan maupun perluasan pasar, dapat menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Penyebab keberhasilan rasio net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya yang dapat dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi performa ekspor. antara lain:

1. Kualitas dan Daya Saing Produk Ekspor. Salah satu penyebab utama keberhasilan ekspor Dharmasraya adalah kualitas produk yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Produk unggulan seperti produk karet (HS 40) Dharmasraya memiliki standar produksi yang tinggi dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain.
2. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur. antara lain Pembangunan akses jalan tani. irigasi. infrastruktur lainnya merupakan beberapa bentuk adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. termasuk fasilitasi perizinan dan insentif pajak. serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor jaringan transportasi.
3. Inovasi dan Pengembangan Produk. Upaya dalam inovasi produk dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor juga dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspor Dharmasraya. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

Dengan kombinasi dari faktor-faktor di atas. Kabupaten Dharmasraya telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekspor. yang pada gilirannya berkontribusi secara signifikan terhadap rasio net ekspor terhadap PDRB. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Namun. dalam pencapaian indikator ini. masih ditemukan beberapa masalah antara lain dalam beberapa kemungkinan. produk ekspor mengalami masalah kualitas atau tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh pasar tujuan. Serta akses pasar atau jaringan distribusi yang efisien masih belum maksimal juga menjadi penyebab kegagalan dalam meningkatkan ekspor di Kabupaten Dharmasraya.

Dari masalah yang ditemui dapat disusun beberapa alternatif Solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB antara lain

1. Peningkatan kualitas dan standar produk serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan ekspor.
2. Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari peluang di pasar baru atau mengembangkan kemitraan dengan perusahaan asing dapat membantu mengurangi risiko kegagalan ekspor.
3. Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan kemampuan produksi. serta dukungan dalam penerapan inovasi teknologi. akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk ekspor.

Untuk mencapai kinerja ini, tidak dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah, hal ini didukung oleh kolaborasi beberapa perangkat daerah, antara lain:

1. Dinas Koperasi. UMKM. Perindustrian. dan Perdagangan. dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produksi komoditi ekspor. Hal ini termasuk penggunaan teknologi modern. peningkatan proses produksi. dan pemenuhan standar kualitas. Melalui program pengembangan industri kecil dan menengah. dinas ini membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran. sehingga mereka dapat memproduksi komoditi ekspor dengan kualitas yang lebih baik. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi juga dilakukan untuk melakukan riset dan pengembangan terkait inovasi produk dan proses produksi untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. memberikan fasilitasi dalam proses perizinan dan investasi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperkenalkan inovasi dalam produksi komoditi ekspor. Pelayanan yang cepat. efisien. dan terpadu akan membantu perusahaan untuk segera memulai atau memperluas usahanya tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
3. Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas komoditi pertanian yang diekspor. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang teknik bertani yang baik. penggunaan pupuk yang tepat. dan pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Pemilihan varietas tanaman yang unggul dan adaptif serta pemantauan secara berkala terhadap kualitas hasil panen juga menjadi tanggung jawab dinas ini.

Rasio net ekspor terhadap PDRB didukung oleh Dinas Terkait antara lain Dinas Koperasi. UMKM. Perindustrian. dan Perdagangan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dan Dinas Pertanian dalam hal peningkatan kualitas komoditi ekspor. Program-program pada dinas ini memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian indikator kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya Berikut adalah analisis mengenai kontribusi masing-masing program:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini akan membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk-produk ekspor. Sarana distribusi yang baik akan memastikan produk-produk dapat mencapai pasar ekspor dengan cepat dan efisien. mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Perluasan Usaha Industri (IUI). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Dengan memberikan izin usaha industri secara efisien. program ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan industri akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan. dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Program ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro lokal. Dengan mendorong kemitraan dan kolaborasi antara usaha mikro dengan pihak lain seperti pemerintah. lembaga keuangan. dan perguruan tinggi. program ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro yang berorientasi ekspor.
4. Pembuatan Peta Potensi Investasi. Program ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang potensi investasi di Kabupaten Dharmasraya Dengan menarik investasi ke sektor-sektor yang mendukung ekspor. seperti industri manufaktur dan pertanian. program ini akan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.
5. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal. Melalui kegiatan promosi penanaman modal. program ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Dharmasraya. Investasi baru akan membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekspor dan meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB.
6. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Dengan menyediakan layanan perizinan yang cepat. mudah. dan terpadu. program ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses investasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor ekspor dengan menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor.

SASARAN STRATEGIS 3.1.2 MENGURANGI PENGANGGURAN

14. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

= PERSENTASE JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH ANGKATAN KERJA (DATA BPS)

= 6.02%

14.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.07	5.3	6.02	86.42%	Sangat Berhasil	4.9	77.14%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2024

Pada tahun 2020, kondisi awal indikator tercatat sebesar 6,07, dengan target tahun 2024 ditetapkan sebesar 5,3, namun realisasi yang dicapai justru lebih tinggi, yakni 6,02, dengan capaian 86,42%, yang mendapat predikat "Sangat Berhasil". Meskipun demikian, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,9, pencapaian tahun 2024 baru mencapai 77,14% dari target tersebut, sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapainya. Keberhasilan ini menunjukkan tren positif, namun perlu strategi yang lebih optimal agar target akhir RPJMD dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

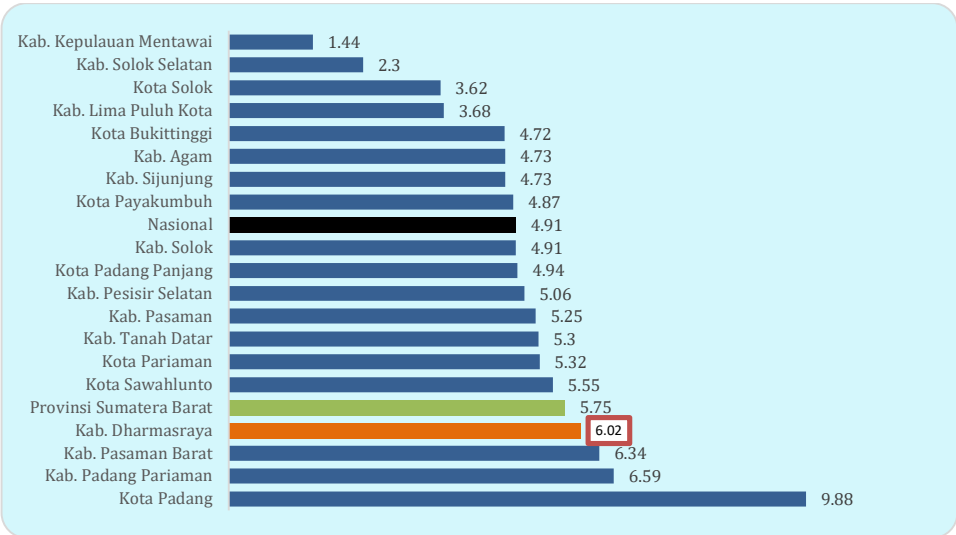
Tabel 3.40 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	6.07	5	117%	➡	Memuaskan
2022	5.68	6.23	90.30%	⬇	Sangat Berhasil
2023	5.49	6.22	86.70%	⬇	Sangat Berhasil
2024	5.3	6.02	86.42%	⬇	Sangat Berhasil

Sumber : BPS diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2024

Tren capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian target. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 5, melampaui target 6,07 dengan capaian 117 persen, memperoleh predikat memuaskan. Namun, sejak 2022 hingga 2024, meskipun realisasi tetap di atas target, capaian kinerjanya mengalami penurunan, dengan tren menurun dan predikat sangat berhasil. Pada tahun 2022, realisasi 6,23 dengan capaian 90,30 persen, sementara tahun 2023 mencapai 6,22 dengan 86,70 persen, dan pada 2024 sedikit menurun menjadi 6,02 dengan 86,42 persen. Meskipun tren menunjukkan penurunan capaian, indikator ini tetap berada dalam kategori sangat berhasil, menandakan bahwa meskipun tantangan ada, kinerja secara umum masih cukup kuat dalam mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



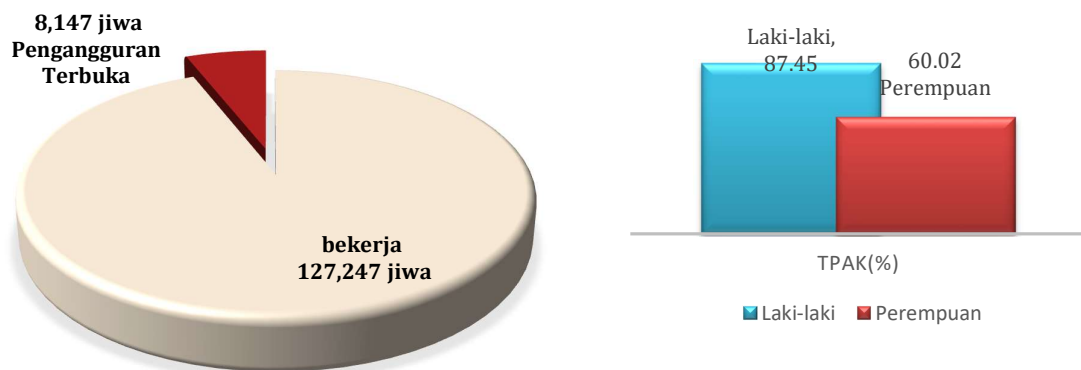
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 6.02, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5.75 serta rata-rata nasional sebesar 4.91. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Dharmasraya masih lebih serius dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Dharmasraya menempati peringkat keempat tertinggi setelah Kota Padang (9.88), Kabupaten Padang Pariaman (6.59), dan Kabupaten Pasaman Barat (6.34). Kondisi ini mengindikasikan perlunya langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih inklusif guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Dharmasraya.

14.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tahun 2024, penduduk Dharmasraya berusia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja berperan penting dalam mendukung penurunan tingkat pengangguran di daerah ini. Peningkatan partisipasi angkatan kerja mencerminkan adanya lebih banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun informal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong sektor usaha produktif, serta memperkuat program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja. Dengan meningkatnya kesempatan kerja dan terserap nya lebih banyak tenaga kerja, angka pengangguran dapat ditekan, mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Grafik 3.11 Penduduk Dharmasraya Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2025

Berdasarkan data pada Grafik 3.11, jumlah penduduk Dharmasraya berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja pada tahun 2024 mencapai 135.394 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.247 jiwa telah bekerja, sementara 8.147 jiwa tergolong sebagai

pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, di mana TPAK laki-laki mencapai 87,45% sedangkan perempuan hanya 60,02%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat keterlibatan laki-laki dalam pasar kerja lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk angkatan kerja telah terserap dalam dunia kerja, meskipun masih terdapat pengangguran yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk sebesar 240,16 ribu jiwa. Penduduk usia kerja atau biasa disebut tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2024 berjumlah 135.394. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan sektor jasa.

Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi yang masih kurang dan dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan banyak penduduk memilih untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk Kabupaten Dharmasraya yang memilih bekerja di sektor informal daripada di sektor formal.

Walau hasil kinerja belum mencapai 100%, namun, beberapa kiat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Mengadakan kegiatan Skill Development Center (SDC) yaitu lembaga rujukan untuk keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program pengembangan SDM kompetensi. cipta kerja dan potensi tenaga kerja di daerah. dalam rangka penanggulangan pengangguran peningkatan produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi daerah. SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak. promotor dan fasilitator peningkatan kerjasama.koordinasi. keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase angkatan kerja dan pencari kerja dalam mengasah keterampilan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing. Untuk pelatihan BLK pada Tahun 2024 mendapat 21 Paket Pelatihan dengan sumber dana dari APBN dan 2 Paket Pelatihan sumber dana APBD.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. dengan indikator jumlah pencari kerja yang terdaftar di SISNAKER ada sebanyak 388 orang

Namun, meskipun telah melaksanakan berapa kiat, terdapat beberapa penyebab tidak tercapainya indikator ini termasuk faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Terbatasnya Lowongan Kerja dan Tingginya kebutuhan kerja, salah satu penyebab utama Tingkat Pengangguran yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Persaingan yang ketat antara para fresh graduate dan tenaga kerja yang berpengalaman juga semakin kuat.
2. Rendahnya kualitas dan ketidaksesuaiannya kualitas pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif.

Dari permasalahan yang ditemui, dapat disusun beberapa alternatif Solusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan industri lokal dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Maksimalisasi pelatihan pada Balai Latihan Kerja di kabupaten Dharmasraya sehingga meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dapat meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan teknis, akses ke pasar, dan sumber daya finansial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi dan teknologi informasi, dapat membuka akses ke wilayah yang terpencil dan meningkatkan konektivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.
5. Pemerintah setempat perlu merancang kebijakan yang mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, serta memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Melalui implementasi solusi-solusi ini, diharapkan tingkat pengangguran di Dharmasraya dapat dikurangi secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 3.1.3 MENGURANGI KEMISKINAN

15. TINGKAT KEMISKINAN

TINGKAT KEMISKINAN	= JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
	BADAN PUSAT STATISTIK
	= 5.32 %

Tingkat kemiskinan menjadi indikator kinerja yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini karena kemiskinan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memantau tingkat kemiskinan, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga menjadi indikator kinerja yang penting karena mencerminkan tingkat keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, tetapi juga mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

15.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.21	5.4	5.32	101.4%	Memuaskan	5.87	94.52%

Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 6.21%. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 5.4%, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 5.32%, menunjukkan bahwa capaian ini telah melampaui target dengan tingkat pencapaian 101.4% dan memperoleh predikat Memuaskan. Sementara itu, target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2026 adalah 5.87%, dan berdasarkan capaian saat ini, persentase pencapaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 94.52%. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya berada di jalur yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan kinerja yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

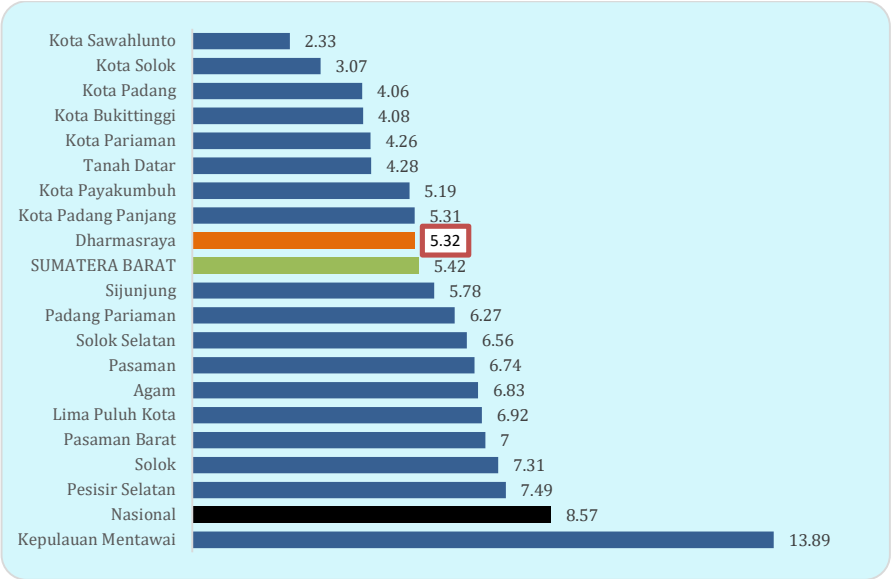
Tabel 3.42 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	6.14	6.57	92.99%	→	Sangat Berhasil
2022	6.08	5.56	108.60%	↑	Memuaskan
2023	6.02	5.56	107.60%	↓	Memuaskan
2024	5.4	5.32	101.40%	↓	Memuaskan

Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi yang secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2021 target belum tercapai, perbaikan signifikan terjadi sejak 2022 hingga 2024, dengan capaian kinerja selalu di atas 100% dan predikat Memuaskan. Tren penurunan kemiskinan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, serta menempatkan Dharmasraya di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir RPJMD.

Grafik 3.12 Tingkat Kemiskinaan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



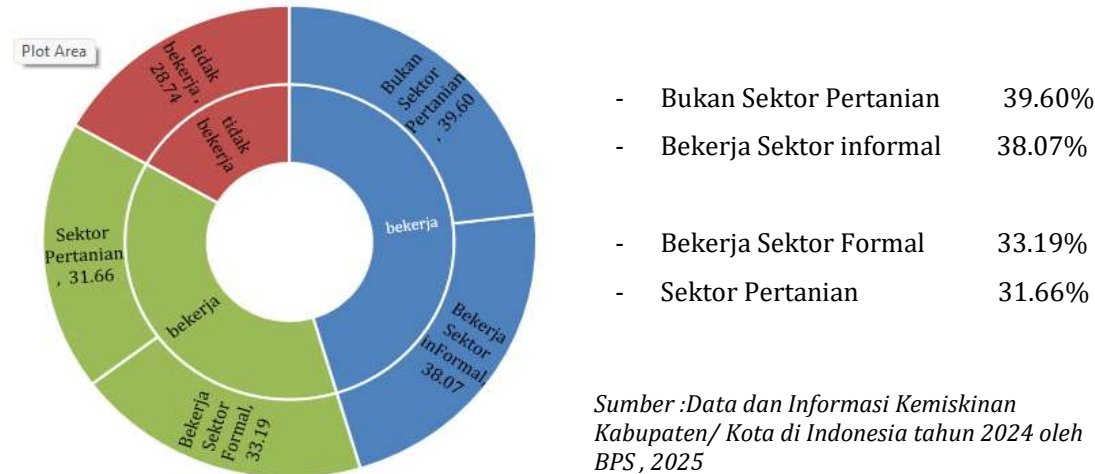
Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 5.32%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5.42% dan jauh di bawah angka nasional sebesar 8.57%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Dharmasraya berada di posisi menengah, dengan capaian lebih baik dari beberapa daerah namun masih tertinggal dibandingkan kota-kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Dharmasraya.

15.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tingkat kemiskinan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas masyarakat usia produktif yang bekerja. Semakin banyak penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan layak, semakin besar kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggerakkan roda perekonomian. Sebaliknya, jika banyak dari mereka yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, maka angka kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan, akses terhadap lapangan kerja, serta dukungan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.13 Persentase Penduduk Miskin Dharmasraya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, 2024



Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di luar sektor pertanian (39.60%) dan di sektor informal (38.07%), yang umumnya memiliki pendapatan tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Sementara itu, pekerja di sektor formal mencapai 33.19%, sedangkan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 31.66%. Tingginya proporsi penduduk miskin di sektor informal menunjukkan bahwa ketidakpastian pekerjaan dan rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi faktor utama yang

mempengaruhi tingkat kemiskinan di Dharmasraya. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih stabil, produktif, dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan secara efektif.

Tabel 3.43 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Σ Penduduk Miskin (000)	%Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
1	Kota Sawahlunto	1.52	2.33	524,196
2	Kota Solok	2.40	3.07	569,869
3	Kota Padang	41.40	4.06	736,786
4	Kota Bukittinggi	5.82	4.08	658,640
5	Kota Pariaman	4.01	4.26	609,286
6	Tanah Datar	15.00	4.28	554,665
7	Kota Payakumbuh	7.62	5.19	648,230
8	Kota Padang Panjang	3.06	5.31	634,303
9	Dharmasraya	15.25	5.32	622,190
10	Sijunjung	14.99	5.78	565,067
11	Padang Pariaman	26.76	6.27	580,392
12	Solok Selatan	12.33	6.56	551,340
13	Pasaman	20.01	6.74	515,608
14	Agam	34.82	6.83	558,963
15	Lima Puluh Kota	27.72	6.92	582,794
16	Pasaman Barat	34.60	7	657,354
17	Solok	28.18	7.31	569,605
18	Pesisir Selatan	36.05	7.49	589,787
19	Kepulauan Mentawai	14.19	13.89	461,088
SUMATERA BARAT		315.43	5.42	714,991
Nasional		24.054,72	8.57	595,242

Sumber Data: laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS Sumatera Barat. 2024

Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 5.32%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera Barat yang mencapai 5.42%, namun masih lebih baik daripada tingkat kemiskinan nasional sebesar 8.57%. Jumlah penduduk miskin di Dharmasraya mencapai 15.25 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp622.190 per kapita per bulan, yang berada di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp714.991. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan Dharmasraya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kota di Sumatera Barat seperti Kota Sawahlunto (2.33%), Kota Solok (3.07%), dan Kota Padang (4.06%). Kondisi ini menunjukkan

bahwa meskipun Dharmasraya memiliki angka kemiskinan yang relatif terkendali, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan daya beli dan akses terhadap lapangan kerja yang lebih produktif.

Upaya yang telah dilakukan antara lain Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati Dharmasraya. Dengan adanya Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ada beberapa Hal yang telah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data;
2. Saling berkoordinasi melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Tim;
3. Melakukan advokasi dan kerja sama dengan perusahaan serta lembaga dan perbankan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penanganan kemiskinan melalui CSR.

Selain itu, beberapa kegiatan dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, di antaranya:

1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan Memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dalam bentuk sosialisasi peningkatan ekonomi, pendampingan petugas sosial, serta monitoring dan evaluasi.
2. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dan Kewirausahaan untuk mendorong masyarakat miskin untuk berwirausaha sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.
3. Bantuan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang telah diseleksi oleh Kementerian Sosial, menyediakan makanan dan pakaian bagi masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas.
4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
5. Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan dan Korban Bencana Alam dan Sosial
6. Pendataan dan Verifikasi Masyarakat Miskin dengan melakukan pendataan dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara rutin untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Semakin rendah angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya membuktikan semakin baik penanganan yang sudah dilakukan.

MISI 4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien

Tujuan 4.1 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS 4.1.1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

16. INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI

INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI = PENILAIAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK)
= 3.83

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat perilaku dan kebijakan anti-korupsi di suatu negara atau wilayah tertentu. IPAK mengukur sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi.

Penggunaan IPAK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anti-korupsi suatu daerah, memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

16.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.9	3.92	3.83	97.70%	Memuaskan	3.6	106.39%

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Peningkatan signifikan dalam Indeks Perilaku Antikorupsi juga bisa dianggap sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang tepat, pemantauan yang ketat, serta pendidikan dan pelatihan yang terus menerus terkait dengan etika dan integritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran juga berperan dalam mencapai capaian yang memuaskan ini.

Tabel 3.45 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	3.066	3.38	92.99%	➡	Sangat Berhasil
2022	3.02	3.9	129.14%	⬆	Memuaskan

2023	3.322	3.92	118.00%	↓	Memuaskan
2024	3.92	3.83	97.70%	↓	Sangat Berhasil

Sumber :Badan Pusat Statistik. 2025

Tingginya capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi selama tiga tahun terakhir ini mencerminkan efektivitas dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Upaya-upaya seperti peningkatan pemahaman akan hukum dan regulasi terkait korupsi, pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan dana publik, serta promosi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

16.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Dharmasraya telah membawa kesuksesan dalam meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Berikut adalah analisis beberapa penyebab keberhasilan:

1. Pelaporan LHKPN secara menyeluruh oleh seluruh pejabat tinggi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan integritas individu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Publikasi data melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), data publik di Kabupaten Dharmasraya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Transparansi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana publik, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi.
3. Pengawasan oleh inspektorat. Peran aktif inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pemerintahan menjadi penopang penting dalam mencegah dan menindak potensi tindak korupsi. Pengawasan yang efektif dapat memberikan sinyal jelas bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.
4. Tingkatkan level Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Dharmasraya sudah mencapai level 3. hal ini menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. Ini memastikan bahwa penegakan aturan dan standar integritas tinggi dijalankan secara konsisten.
5. Penanganan laporan temuan secara efektif. Penanganan laporan temuan dengan cepat dan tepat menunjukkan responsif nya pemerintah terhadap masalah korupsi. Tindakan yang transparan dan tegas memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi.
6. Pengawasan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring pelaksanaan kinerja. Pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan

perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, potensi kecurangan dan korupsi dapat diminimalkan.

Dengan implementasi berbagai langkah ini secara komprehensif, Kabupaten Dharmasraya telah berhasil membangun lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, selain itu, Penggunaan Sumber Daya di Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan indeks perilaku anti-korupsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang tepat. Berikut adalah analisisnya:

1. Peningkatan Transparansi melalui Website PPID. Ketersediaan website PPID Dharmasraya (<https://ppid.dharmasrayakab.go.id>) memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada publik untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan, anggaran, dan program pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan sumber daya publik, yang dapat mengurangi peluang praktik korupsi.
2. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3. Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3 menandakan adanya sistem pengawasan yang matang dan berkualitas di Kabupaten Dharmasraya. Dengan memiliki jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap setiap aktivitas pemerintah, termasuk penggunaan sumber daya, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi.
3. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di pemerintahan. Dengan mengelola website PPID, informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Dengan adanya implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang efisien, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya. Dengan demikian, indeks perilaku anti-korupsi dapat terus meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

16.3 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disebutkan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisisnya:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini memberikan fokus pada pengawasan terhadap area-area yang dianggap memiliki risiko tinggi terkait dengan praktik korupsi. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan area-area tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencegah dan menanggulangi potensi praktik korupsi. Langkah ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Program ini menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pengawasan internal dan eksternal di Kabupaten Dharmasraya. Dengan merumuskan kebijakan teknis yang jelas dan terarah, pemerintah dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi para pelaksana pengawasan. Langkah ini membantu memastikan konsistensi dan standar yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Melalui program ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Dharmasraya memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Pengawasan internal yang kuat dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Langkah ini memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.

Dengan menggabungkan program-program ini dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah ini membantu membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya.

17. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

= HASIL EVALUASI/OPINI BPK RI PADA TAHUN -N TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN -1N

= WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah daerah menandakan bahwa entitas tersebut telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan dan transparansi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, serta menunjukkan bahwa entitas tersebut telah mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. Opini WTP menjadi prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah, karena menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik

dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik.

Prestasi ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Opini WTP juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan masyarakat umum, terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan opini WTP sebagai landasan untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

17.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
WTP	WTP	WTP	100%	Memuaskan	WTP	100%

Sumber Data :Badan Keuangan Dharmasraya (BPK).2024

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangannya. Capaian 100% opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dianggap memadai, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 3.47 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%
2024	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Dharmasraya. 2025

Dari Tabel 17.2.1, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021-2024, Capaian kinerja ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

Dengan mencapai opini WTP sebanyak 100% setiap tahunnya. Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Capaian ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, kesimpulan dari tabel tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya telah mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, yang tercermin dari capaian opini WTP yang mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan publik.

17.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keputusan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya yang diberikan melalui oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menegaskan bahwa tidak ditemukan ketidakpatuhan atau kekurangan yang signifikan dalam laporan keuangan tersebut. Opini WTP dari BPK mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai tingkat memuaskan dalam mempertahankan kualitas dan transparansi laporan keuangannya, yang tercermin dari opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini menjadi pencapaian yang penting dan membanggakan bagi Kabupaten Dharmasraya, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Penyebab keberhasilan laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian karena Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, beberapa penyebab keberhasilan Kabupaten Dharmasraya yang lainnya antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Proses ini melibatkan penyiapan data, analisis, dan dokumentasi yang cermat, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Internal dalam rangka pengawasan internal yang efektif dan peningkatan kapasitas staf keuangan telah membantu memastikan efisiensi

penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan memiliki tim yang terlatih dan kompeten. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan produktivitas dalam proses persiapan laporan keuangan.

3. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menerima dan menerapkan rekomendasi BPK secara tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminimalkan risiko penundaan atau ketidaksempurnaan dalam proses audit, sehingga menghemat sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian laporan keuangan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan telah membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi sistem yang terintegrasi dan otomatis. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengolahan data, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses tersebut.

Program-program yang dialokasikan seperti Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah memberikan landasan yang kuat untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data keuangan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diajukan kepada BPK.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah membantu dalam menjamin bahwa anggaran pemerintah daerah dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan yang baik juga memastikan kelancaran dalam pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menjalankan proses akuntansi yang tepat dan tepat waktu. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik. Dengan mengatur pengelolaan aset dan keuangan dengan efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko penyelewengan, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

18. HASIL EVALUASI AKIP

HASIL EVALUASI AKIP	=	NILAI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN PAN RB
		BERDASARKAN HASIL PENILAIAN EVALUASI SISTEM
		AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
		= B (67.24)

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses yang dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi AKIP pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, pemerintah daerah dapat meraih hasil yang memuaskan jika terbukti berhasil mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika terdapat kekurangan atau hambatan dalam mencapai target kinerja, evaluasi AKIP juga dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

18.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.48 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
B 63.44	70	67.24	96.06%	Sangat Baik	A (80)	84.04%

Sumber data : Kemenpan diolah oleh Bagian Organisasi. 2024

Pada tahun 2020, kinerja nilai AKIP berada di angka 63,44 dengan predikat B. Pada tahun 2024, ditetapkan target sebesar 70, sementara realisasi capaian mencapai 67,24 atau 96,06% dari target yang telah ditentukan, dengan predikat sangat baik. Target akhir dalam RPJMD tahun 2026 adalah mencapai nilai A dengan skor 80, dan hingga tahun 2024, pencapaian ini telah mencapai 84,04% dari target akhir tersebut. Untuk melihat tren kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

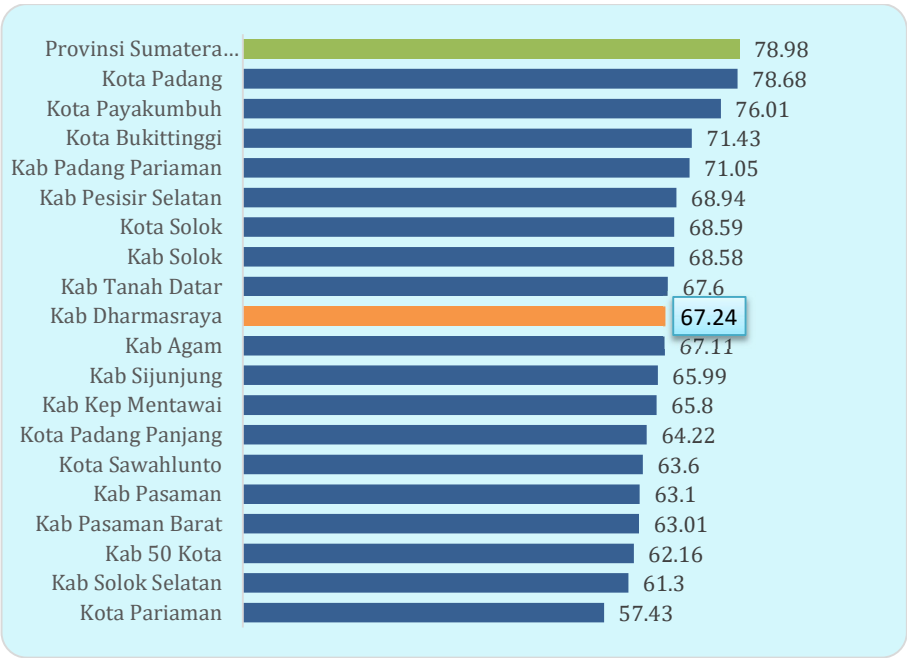
Tabel 3.49 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	70	63.98	91.40%	→	Sangat Berhasil
2022	70	64.07	91.53%	↑	Sangat Berhasil
2023	70	64.65	92.35%	↑	Sangat Berhasil
2024	70	67.24	96.06%	↑	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2024

Kinerja nilai AKIP dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan capaian setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 63,98 atau 91,40% dari target yang ditetapkan, dengan tren stagnan. Tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 64,07 atau 91,53% dari target, diikuti oleh tahun 2023 yang mencapai 64,65 atau 92,35%. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dengan capaian 67,24 atau 96,06% dari target. Selama empat tahun berturut-turut, predikat yang diperoleh tetap sangat berhasil, menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kinerja nilai AKIP.

Grafik 3.14 Nilai SAKIP Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, 2024

Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 67,24 dalam evaluasi kinerja AKIP, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, nilai ini masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 78,98. Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain, Dharmasraya berada di peringkat yang cukup kompetitif, sedikit lebih tinggi dari Kabupaten

Agam (67,11) dan Kabupaten Sijunjung (65,99), tetapi masih tertinggal dari beberapa daerah seperti Kota Bukittinggi (71,43) dan Kabupaten Padang Pariaman (71,05). Capaian ini menunjukkan adanya progres, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai nilai optimal sesuai target RPJMD.

Tabel 3.50 Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	KOMPONEN SAKIP				TOTAL NILAI
		PERENCA NAAN	PENGUKUR AN	PELAPO RAN	EVALUASI AKUNTABILITAS	
1	KOTA PAYAKUMBUH	25,04	19,93	12,86	18,18	76,01
2	KOTA PADANG	25,4	22,01	12,62	18,65	78,68
3	KAB DHARMASRAYA	22,75	19,54	11,52	13,43	67,24
4	KAB PESISIR SELATAN	24,19	18,05	11,4	15,3	68,94
5	KAB PADANG PARIAMAN	22,84	22,27	11,11	14,83	71,05
6	KOTA SOLOK	22,83	21,21	10,89	13,66	68,59
7	KAB SOLOK	23,65	18,11	10,55	16,27	68,58
8	KAB AGAM	21,89	18,69	10,55	15,98	67,11
9	KAB TANAH DATAR	22,49	19,92	10,45	14,74	67,6
10	KAB SIJUNJUNG	22,36	19,73	10,4	13,5	65,99
11	KOTA BUKITTINGGI	22,57	21,9	10,35	16,61	71,43
12	KAB 50 KOTA	22,37	17,29	10,26	12,24	62,16
13	KAB SOLOK SELATAN	19,93	15,73	10,25	15,39	61,3
14	KOTA SAWAHLUNTO	22,49	15,03	10,21	15,87	63,6
15	KAB PASAMAN	22,55	19,46	10,18	10,91	63,1
16	KAB PASAMAN BARAT	23,44	13,75	9,98	15,84	63,01
17	KOTA PADANG PANJANG	22,93	16,39	9,92	14,98	64,22
18	KOTA PARIAMAN	18,38	16,98	9,66	12,41	57,43
19	KAB KEP MENTAWAI	24,27	17,55	9,35	14,63	65,8

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, 2025

Kabupaten Dharmasraya memperoleh total nilai 67,24 dalam evaluasi SAKIP, dengan rincian nilai perencanaan 22,75 dari maksimal 30, pengukuran 19,54 dari maksimal 35, pelaporan 11,52 dari maksimal 15, dan evaluasi internal 13,43 dari maksimal 25. Dari komponen tersebut, pelaporan memiliki capaian tertinggi dibandingkan bobot maksimalnya, yaitu 76,8%, sedangkan evaluasi internal menjadi aspek dengan nilai terendah, hanya mencapai 53,7% dari bobot maksimal. Jika dibandingkan dengan daerah lain, nilai pelaporan Dharmasraya masih cukup kompetitif, meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lain seperti Kota Payakumbuh (12,86) dan Kota Padang (12,62). Hasil ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan terutama pada aspek evaluasi internal untuk memperkuat akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

18.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2022 hingga 2024. Tabel ini mencakup empat komponen utama yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal, beserta bobot masing-masing komponen serta perubahan nilai dari tahun ke tahun.

Tabel 3.51 Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	yang bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.28	22.75
2	Pengukuran Kinerja	30	18.19	18.64	19.54
3	Pelaporan Kinerja	15	10.78	10.81	11.52
4	Evaluasi Internal	25	12.90	12.92	13.43
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.07	64.65	67.24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Sumber Data : Kementerian PAN-RB. 2024

Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk perbaikan kinerja di Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan cascading (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan critical success factor (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya

4. Mereview kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi- yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut
5. Melakukan monitoring terhadap rencana aksi PD untuk memastikan kualitas pencapaian kinerjanya secara berkala
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kabupaten Dharmasraya diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD, serta memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari untuk media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara real time
7. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga keter capaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan efisiensi anggaran telah mengukur seluruh biaya capaian kinerja
9. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi
10. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkan nya kepala pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
11. Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD
12. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD

Tabel 3.52 Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B

No	Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	86.96	A
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.95	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.51	A
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.32	A
5	Dinas Pertanian	80.29	A

No	Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.24	BB
7	Dinas Lingkungan Hidup	79.19	BB
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.09	BB
9	Dinas Kesehatan	78.98	BB
10	Kecamatan Koto Baru	78.15	BB
11	Kecamatan Sungai Rumbai	78.12	BB
12	Inspektorat	77.14	BB
13	Dinas Pendidikan	76.55	BB
14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	76.29	BB
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75.95	BB
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	75.85	BB
17	Kecamatan Asam Jujuhan	74.62	BB
18	Kecamatan Koto Besar	73.81	BB
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	73.37	BB
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.03	BB
21	Dinas Perhubungan	72.84	BB
22	Badan Keuangan Daerah	72.21	BB
23	Kecamatan Pulau Punjung	72.09	BB
24	Kecamatan Padang Laweh	71.94	BB
25	Dinas Pangan dan Perikanan	71.75	BB
26	RSUD Sungai Dareh	70.97	BB
27	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	70.77	BB
28	Kecamatan Tiumang	69.89	B
29	Kecamatan Timpeh	69.89	B
30	Kecamatan Koto Salak	69.33	B
31	Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya	68.66	B
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.25	B
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66.34	B
34	Kecamatan Sitiung	66.08	B
35	Kecamatan Sembilan Koto	62.62	B
36	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	62.31	B
37	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya	61.51	B

Sumber : Inspektorat Dharmasraya. 2024

Dari 38 OPD masing-masing sudah seluruh OPD memiliki tim evaluasi kinerja internal. tim penyusun laporan kinerja. dan tim implementasi SAKIP perangkat daerah. dan dari tim yang

telah dibentuk. seluruh OPD sudah memiliki Rencana Strategis tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Rencana Aksi Kinerja tahun 2024. pohon kinerja. cascading dan dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas kinerja lainnya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Dari Analisa terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan antara lain:

1. *Basic dimension* dalam penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan. dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan serta meningkatkan rasa kepemilikan pimpinan OPD terhadap kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun. maka dilaksanakan Penandatanganan komitmen kinerja yang telah ditandatangani oleh seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk komitmen kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan strategi berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya.
2. Integrasi dari Sekretariat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam penggunaan e-SAKIP Dharmasraya. pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan hak guna pakai aplikasi e-Sakip Dharmasraya guna meningkatkan nilai publikasi serta pendokumentasian dokumen kinerja.
3. Pembentukan dua tim inti dalam percepatan pelaksanaan SAKIP antara lain Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dalam SK Bupati Dharmasraya No 188.45/ /KPTS-BUP/2024 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024. dimana anggota nya terdiri dari SEKRETARIAT DAERAH BAPPERIDA. INSPEKTORAT, BKPSDM, BKD, KOMINFO.

Dalam memastikan implementasi SAKIP di Kabupaten Dharmasraya. salah satu Upaya yang dilakukan adalah Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan melalui SK Bupati Dharmasraya No 188.45/69/KPTS-BUP/2024. Dengan melibatkan kolaborasi dari BAPPERIDA, INSPEKTORAT. dan SEKRETARIAT DAERAH. tim ini memiliki cakupan yang luas dalam memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan baik dan efektif.

Melalui kerja tim yang terkoordinasi. berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya. BAPPERIDA dapat memberikan masukan terkait perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. sementara INSPEKTORAT dapat melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu. SEKRETARIAT DAERAH dapat memberikan dukungan administratif dan koordinasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim.

Dengan adanya sinergi antara berbagai instansi yang terlibat. diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan. sementara sistem akuntabilitas kinerja dapat diperkuat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya

dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan penunjang yang difokuskan pada pengembangan kinerja reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan daerah, dan peningkatan pengawasan di Kabupaten Dharmasraya memiliki peran yang krusial dalam mencapai indikator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertama, pengembangan kinerja reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan memperkenalkan inovasi dan perbaikan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan sistem manajemen, pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan daerah juga merupakan faktor kunci dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melakukan perencanaan yang matang, berbasis data, dan partisipatif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang jelas, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, dan mengukur kinerja secara lebih akurat. Selain itu, perencanaan yang baik juga membantu dalam meminimalkan risiko ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Terakhir, peningkatan pengawasan merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan secara dini, serta mengambil tindakan korektif yang tepat. Pengawasan yang efektif juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, program/kegiatan penunjang yang difokuskan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Dharmasraya adalah langkah-langkah strategis dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melaksanakan program-program ini dengan efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

19. NILAI LPPD

NILAI LPPD	= SKOR EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH = 3.5036
------------	---

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan laporan yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan pembangunan. pelayanan publik. serta pemanfaatan sumber daya dan keuangan daerah. Nilai LPPD pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. termasuk kualitas penyelenggaraan pemerintahan. efektivitas program pembangunan. kualitas pelayanan publik. serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.

Secara umum. semakin tinggi nilai LPPD suatu pemerintah daerah. semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam aspek transparansi. akuntabilitas. dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu. nilai LPPD merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

19.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.53 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.5138	3.75	3.5036	93.43%	Sangat Baik	3.9000	89.83

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2024

capaian ini masuk dalam kategori sangat baik. Nilai LPPD merupakan salah satu nilai yang membentuk Pemerintahan lebih maju dan tertata dengan baik. Nilai LPPD Kabupaten pada tahun 2024 menduduki peringkat 1 di Tingkat Provinsi dan Peringkat 9 di Tingkat Nasional.

Tabel 3.54 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	3.6	3.51	97.20%	→	Sangat Berhasil
2023	3.65	3.51	96.20%	↓	Sangat Berhasil
2024	3.7	3.5036	94.69%	↓	Sangat Berhasil
2024	3.75	3.5036	93.43%	↓	Sangat Berhasil

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2024

Capaian kinerja nilai LPPD dalam empat tahun terakhir mengalami tren penurunan, meskipun tetap berada dalam kategori *Sangat Berhasil*. Pada tahun 2024, meskipun target naik menjadi 3.7 dan 3.75, realisasi berada di angka 3.5036, menyebabkan capaian kinerja turun menjadi 94.69% dan 93.43%. Namun, pencapaian ini tetap membanggakan, karena meskipun mengalami penurunan, nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya berhasil menempati peringkat ke-9

secara nasional untuk tingkat kabupaten/kota, menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan daerah masih berada dalam kategori unggul dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang.

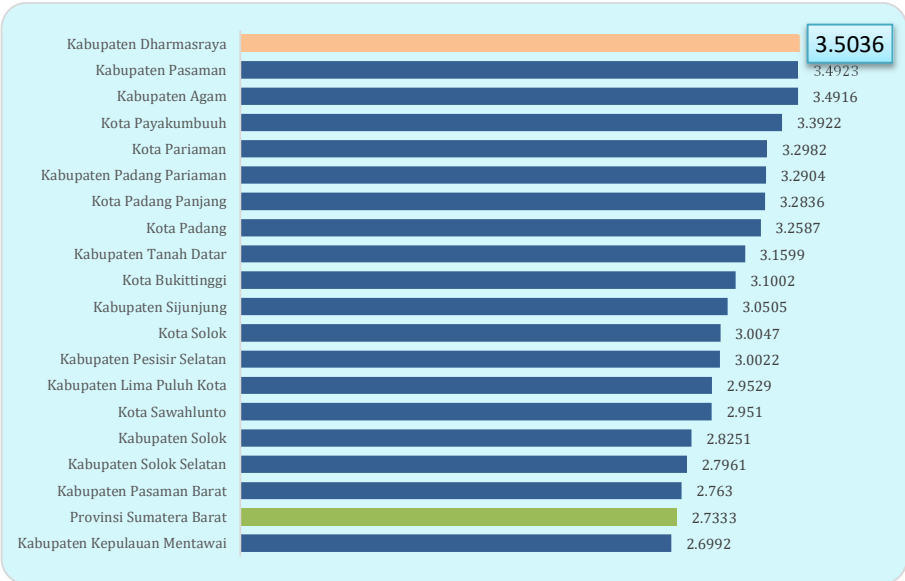
Tabel 3.55 Perbandingan capaian kinerja LPPD Dharmasraya dengan Kabupaten Nilai LPPD Tertinggi dan Provinsi Sumatera Barat

No	Pemerintah Daerah	NILAI	Peringkat Nasional
1	Kabupaten Banyuwangi	3.8118	1/414
2	Kabupaten Dharmasraya	3.5036	9/414
4	Provinsi Sumatera Barat	2.7333	25/34

Sumber :Kepmendagri No.100.2.1.7.6646 tahun 2024

Capaian kinerja LPPD Kabupaten Dharmasraya menunjukkan hasil yang membanggakan dengan perolehan nilai 3.5036 dan menempati peringkat ke-9 dari 414 kabupaten/kota secara Nasional. Meskipun masih berada di bawah Kabupaten Banyuwangi yang meraih nilai tertinggi sebesar 3.8118 dan menempati peringkat pertama, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki tata kelola pemerintahan yang sangat baik. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai LPPD sebesar 2.7333 dan berada di peringkat ke-25 dari 34 provinsi. Prestasi ini menegaskan bahwa Kabupaten Dharmasraya mampu bersaing di tingkat nasional dan terus menunjukkan peningkatan dalam kinerja pemerintahan daerah. Untuk perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.15 Nilai LPPD Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber :Kepmendagri No.100.2.1.7.6646 tahun 2024

Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat ke-9 dari total 414 pemerintah daerah yang dievaluasi. Dengan nilai LPPD sebesar 3.5036. Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kinerja

yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Peringkat ini mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terus ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam upaya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peringkat ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat terus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi mereka.

19.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai nilai LPPD yang tinggi di Kabupaten Dharmasraya dapat diatribusikan kepada dukungan dan kerjasama yang solid antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Kerjasama yang kuat antar-OPD memungkinkan terciptanya sinergi dalam pengumpulan data, analisis informasi, dan penyusunan laporan. Dengan demikian, setiap OPD dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan dalam LPPD, sehingga menciptakan capaian kinerja yang memuaskan.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam pencapaian nilai LPPD, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, yaitu seringnya terlambatnya pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan sebagai penyusun LPPD di tingkat kabupaten. Keterlambatan ini dapat menghambat proses penyusunan laporan dan mengganggu ketepatan waktu dalam penyampaian informasi kepada publik. Penyebab keterlambatan pengiriman data dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kesibukan, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya koordinasi antar-OPD.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bagian Pemerintahan dan OPD-OPD terkait dalam hal pengumpulan dan pengiriman data. Langkah-langkah ini dapat meliputi penyelenggaraan rapat rutin, pelatihan tentang pentingnya keteraturan pengiriman data, dan pembentukan tim kerja lintas-OPD untuk memantau dan memastikan kelancaran prosesnya.
2. Menerapkan sistem informasi atau aplikasi yang memungkinkan OPD untuk secara langsung mengirimkan data secara real-time kepada Bagian Pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dipercepat, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam penyusunan laporan.

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keteraturan pengiriman data. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada staf OPD tentang pentingnya keteraturan dan kecepatan dalam pengiriman data untuk penyusunan LPPD. Menekankan pada konsekuensi dari keterlambatan pengiriman data dan manfaat dari keteraturan pengiriman data dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen dari setiap OPD.

Dengan menerapkan alternatif solusi di atas, diharapkan dapat mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan serta meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan LPPD di tingkat kabupaten. Dengan demikian, Kabupaten Dharmasraya dapat terus mempertahankan capaian kinerja yang baik dalam hal LPPD serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai LPPD yaitu update data melalui aplikasi SI ELPPD oleh Operator SI ELPPD di Bagian Pemerintahan, melalui kegiatan update data melalui aplikasi SI ELPPD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam LPPD adalah akurat, terkini, dan relevan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memiliki data yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat memperkuat pertanggungjawaban mereka terhadap penggunaan sumber daya publik, serta memfasilitasi proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dengan demikian, program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja LPPD. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 4.1.2 BIROKRASI YANG BERKUALITAS

20. INDEKS KELEMBAGAAN

TIDAK ADA PENILAIAN INDEKS KELEMBAGAAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKUKAN ANALISA LEBIH LANJUT

21. INDEKS SPBE

INDEKS SPBE = NILAI INDEKS YANG MEREPRESENTASIKAN TINGKAT PELAKSANAAN SPBE
SECARA KESELURUHAN. = 3.61

21.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
1.09	2.83	3.61	127.56%	Memuaskan	3	120.3%

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2024

Capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari kondisi awal tahun 2020 dengan nilai 1.09 menjadi 3.61 pada tahun 2024. Realisasi ini melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2.83, dengan capaian mencapai 127.56%, sehingga memperoleh predikat *Memuaskan*. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan pada angka 3, capaian tahun 2024 ini sudah mencapai 120.3% dari target tersebut.

Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan pesat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan komitmen yang kuat dalam digitalisasi layanan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, untuk melihat tren selama beberapa terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

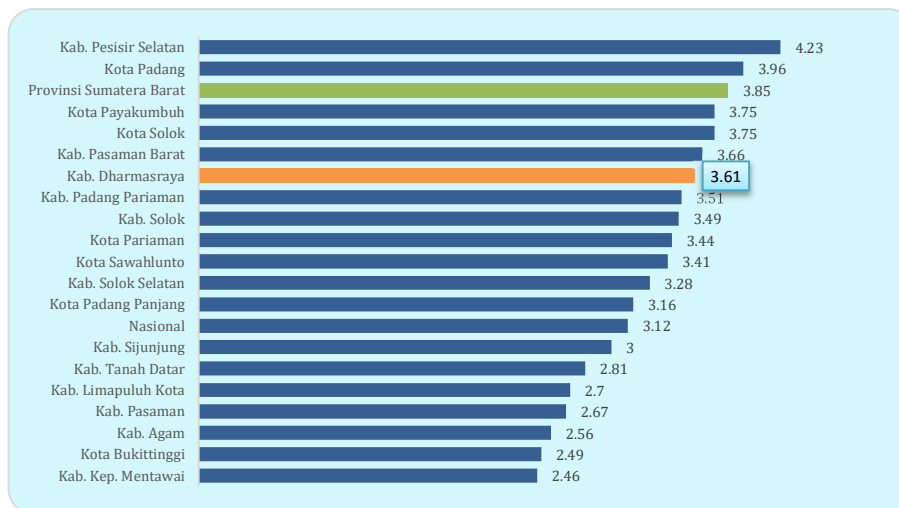
Tabel 3.57 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	1.625	1.09	67.08%	➡	Cukup Berhasil
2022	1.9	2.41	127.89%	⬆	Memuaskan
2023	2.41	2.83	117.43	⬆	Memuaskan
2024	2.83	3.61	127.56%	⬇	Memuaskan

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2024

Capaian kinerja Indeks SPBE dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, meskipun terdapat sedikit penurunan capaian kinerja di tahun 2024. Realisasi indeks mencapai 3.61 dari target 2.83 dengan capaian kinerja 127.56%, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan karena kinerja yang melemah, melainkan akibat peningkatan target yang lebih ambisius dan bahkan jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transformasi digital pemerintahan.

Grafik 3.16 Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat tahun 2024



Sumber Data : Kepmenpan RB No.633/2024

Berdasarkan grafik, Kabupaten Dharmasraya meraih skor Indeks SPBE sebesar 3.61, menempatkannya di peringkat ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dharmasraya berada di atas Kabupaten Padang Pariaman (3.51) dan Kabupaten Solok (3.49), namun masih berada di bawah Kabupaten Pesisir Selatan (4.23), Kota Padang (3.96), serta Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan (3.85). Capaian ini menunjukkan bahwa Dharmasraya telah berhasil meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mencapai peringkat lebih tinggi di masa mendatang.

21.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari tahun 2021. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya berada di angka 1.09 (kurang) dan menduduki peringkat kedua terendah di Propinsi Sumatera Barat. pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan berada pada indeks 2.41 (kurang). dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup significant yaitu di angka 3.61 (Sangat baik). Adapun usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan angka indeks SPBE yang telah dilakukan adalah dengan melengkapi Data dan Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. seperti Dokumen Regulasi SPBE. Kebijakan yang telah dimiliki. sistem Manajemen SPBE serta Layanan SPBE yang telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mendukung kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk tim yang berperan penting dalam penilaian indeks SPBE. pada tahun 2022. belum ada Peraturan Daerah terkait SPBE. namun di tahun 2023 telah terbit peraturan Daerah terkait SPBE. tim terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sekretariat Daerah. Inspektorat. serta

OPD lainnya yang terkait dalam mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya. selain itu Perlu keseriusan serta kerjasama seluruh Perangkat Daerah yang terkait dalam Evaluasi SPBE untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

keberhasilan peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Pemanfaatan Sistem Digital dalam Administrasi dan Layanan Publik
 - a. Dinas Kominfo mendorong penggunaan sistem digital dalam layanan administrasi dan layanan publik, baik yang didukung langsung maupun tidak langsung oleh instansi tersebut.
 - b. Tahun 2023 terdapat 77 layanan berbasis elektronik, meningkat menjadi 111 layanan pada tahun 2024 dengan capaian 179%, yang dikategorikan sebagai memuaskan.
2. Integrasi Layanan dengan Domain Pemerintah Daerah
 - a. Pada tahun 2024, dari 111 layanan SPBE, terdapat 40 aplikasi dan 71 website yang telah terintegrasi dalam domain dharmastrayakab.go.id.
 - b. Integrasi ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan digital di lingkungan pemerintahan.
3. Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
 - a. Peningkatan sistem berbasis elektronik ini juga ditunjang dengan serapan anggaran yang baik, meskipun fokusnya lebih pada pemeliharaan jaringan daripada peningkatan infrastruktur baru.
 - b. Pendanaan tambahan juga diperoleh melalui APB Nagari, yang membantu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Solusi yang Diterapkan
 - a. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kemampuan programmer untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan OPD.
 - b. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Kominfo telah mengambil langkah-langkah seperti pelatihan teknis dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh digitalisasi layanan, integrasi sistem, pendanaan yang memadai, serta upaya adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya manusia.

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks SPBE di Kabupaten Dharmasraya adalah adopsi aplikasi dan layanan berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah. Melalui penerapan teknologi informasi. Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan efisiensi. transparansi. dan kualitas layanan publik. Beberapa program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini meliputi:

1. Implementasi Aplikasi Administrasi Publik: Penggunaan aplikasi administrasi publik memungkinkan perangkat daerah untuk mengelola data. proses administrasi. dan layanan

publik secara lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kepegawaian, keuangan, perizinan, dan layanan publik lainnya.

2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik. Melalui pelatihan yang tepat, pegawai di berbagai perangkat daerah dapat memahami dan menggunakan aplikasi tersebut secara efektif.
3. Penyediaan Infrastruktur TIK: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mendukung penggunaan aplikasi dan layanan berbasis elektronik. Ini termasuk penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
4. Monitoring dan Evaluasi: Pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi dan layanan berbasis elektronik tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan evaluasi, Kabupaten Dharma Raya dapat mengidentifikasi kendala, masalah, dan area yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut.

22. INDEKS PROFESIONALISME ASN

INDEKS PROFESIONALISME ASN

= PENILAIAN KUALITAS ASN BERDASARKAN KESESUAIAN KUALIFIKASI, KOMPETENSI, KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

= 82.77

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi, integritas, etika kerja, kedisiplinan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan kerja.

Tingkat profesionalisme ASN pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memiliki ASN yang profesional, pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap Indeks Profesionalisme ASN merupakan bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

22.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
58.04	71.7	82.77	115.44%	Memuaskan	77	107.49

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2025

Pada tahun 2020, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Dharmasraya berada pada angka 58.04. Seiring dengan berbagai upaya peningkatan kompetensi dan reformasi birokrasi, target untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 71.7. Namun, realisasinya melampaui ekspektasi dengan mencapai 82.77, atau 115.44% dari target yang ditetapkan. Capaian ini memperoleh predikat "Memuaskan", menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 77, realisasi tahun 2024 telah mencapai 107.49%, menandakan bahwa target jangka panjang telah terlampaui lebih awal. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pengembangan SDM aparatur yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.59 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	62	62.86	101.40%	→	Memuaskan
2022	65	71.7	110.30%	↑	Memuaskan
2023	71.7	71.7	100%	↓	Sangat Berhasil
2024	71.7	82.77	115.44%	↑	Memuaskan

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2025

Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir. Capaian meningkat dari **101.40%** di 2021 menjadi **110.30%** di 2022 dengan predikat "**Memuaskan**". Meskipun tren sempat menurun di 2023 (**100%**, "**Sangat Berhasil**"), pada 2024 kembali meningkat signifikan hingga **115.44%**, tetap dengan predikat "**Memuaskan**". Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pengembangan ASN dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

22.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Komponen penilaian yang mendukung pencapaian indeks profesionalisme ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

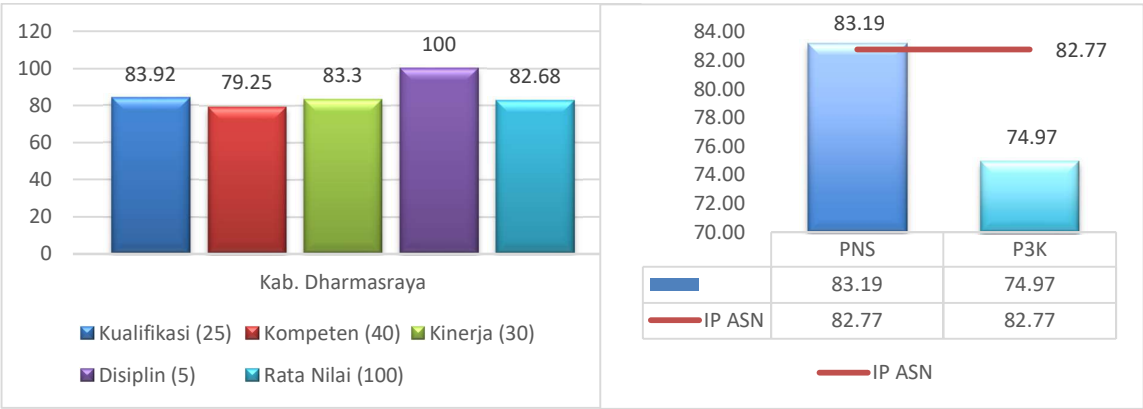
Tabel 3.60 Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2024

No	Nama Instansi	Σ ASN	Kualifikasi (25)	Kompeten (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Kota Padang Panjang	1.822	21.59	33.3	25.03	5	84.92	tinggi
2	Kab. Tanah Datar	4.566	21.95	32.1	25	5	84.05	tinggi
3	Kab. Sijunjung	3.399	20.85	32.3	25	5	83.15	tinggi
4	Kab. Dharmasraya	3.188	20.98	31.7	25	5	82.68	tinggi
5	Kota Solok	1.942	22.23	29.89	24.98	5	82.1	tinggi
6	Kota Padang	7.678	21.63	27.77	25	5	79.4	sedang
7	Kab. Pasaman Barat	5.441	21.72	27.83	24.65	5	79.2	sedang
8	Kab. Pesisir Selatan	7.279	21.78	27.69	24.53	5	79	sedang
9	Kab. Agam	5.996	20.87	27.95	25	5	78.82	sedang
10	Kab. Pasaman	6.14	21.48	27.7	24.5	5	78.68	sedang
11	Kota Sawahlunto	1.983	21.72	26.89	24.98	5	78.59	sedang
12	Kota Payakumbuh	2.638	21.46	26.95	25.1	5	78.51	sedang
13	Kab. Solok	4.931	21.76	27.24	24.5	5	78.5	sedang
14	Kab. Solok Selatan	3.169	21.05	27.6	24.55	5	78.2	sedang
15	Kab. Padang Pariaman	5.301	21.46	25.19	25.1	5	76.75	sedang
16	Kab. Kep. Mentawai	2.583	21.37	21.96	21.63	5	69.97	sedang
Provinsi Sumatera Barat		16.67	21.49	28.91	24.98	5	80.38	Sedang

Sumber Data: Laporan Hasil Pengukuran IPASN, BKN Regional XII .2024

Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat ke-4 dalam indeks profesionalitas ASN di Sumatera Barat dengan skor 82.68, termasuk dalam kategori "Tinggi". Dengan jumlah ASN sebanyak 3.188, Dharmasraya mencatat nilai yang cukup baik dalam aspek kualifikasi (20.98), kompetensi (31.7), kinerja (25), dan disiplin (5). Meskipun berada di bawah Kota Padang Panjang (84.92), Kabupaten Tanah Datar (84.05), dan Kabupaten Sijunjung (83.15), capaian ini menunjukkan bahwa Dharmasraya memiliki standar profesionalitas ASN yang kuat. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki rata-rata 80.38, Dharmasraya berada di atas nilai provinsi, menandakan bahwa pengelolaan dan pengembangan ASN di daerah ini sudah cukup baik dan kompetitif.

Grafik 3.17 Komponen Penilaian IP ASN dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024



Sumber Data: Laporan Hasil Pengukuran IPASN, BKN Regional XII .2024

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara keseluruhan tercatat sebesar 82,77. Dalam kontribusinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyumbang nilai lebih tinggi dengan skor 83,19, melampaui rata-rata IP ASN. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki nilai 74,97, yang berada di bawah rata-rata IP ASN. Hal ini menunjukkan bahwa PNS berperan lebih besar dalam meningkatkan tingkat profesionalitas ASN dibandingkan dengan P3K. dalam pencapaian nya beberapa faktor penyebab keberhasilan antara lain:

- Pengembangan Kompetensi ASN**
 - Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.
 - Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya pengembangan kompetensi.
 - Program pelatihan seperti Diklat PKA/PKN, uji kompetensi, dan pelatihan dasar bagi CPNS.
 - Fasilitasi tugas belajar dan izin belajar bagi ASN.
- Dukungan Anggaran**
 - Alokasi Dana Mandatory sebesar 0,16% dari APBD atau Rp 1,55 miliar untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN.
 - Upaya peningkatan pemahaman Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai pentingnya peningkatan kompetensi ASN.
- Kolaborasi dengan Pihak Ketiga**
 - Kerja sama dengan BKD Provinsi Riau untuk pelaksanaan uji kompetensi ASN.
 - Kerja sama dengan BPSDM Bukittinggi untuk pelaksanaan Diklat PIM bagi pejabat eselon II dan III.
 - Kerja sama dengan UPT BKN Padang dalam pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

Dalam mencapai indikator kinerja indeks profesionalitas ASN. dapat di simpulkan penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator antara lain:

1. Kualifikasi ASN sudah bertambah
2. Kompetensi ASN sudah meningkat
3. Kinerja ASN sudah Profesional
4. Kedisiplinan ASN sudah patuh dan taat

Selain keberhasilan pencapaian. terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain keterbatasan Anggaran untuk meningkatkan Kualitas. Kompetensi. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN. Dari masalah yang teridentifikasi. dapat disusun solusi antara lain Meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menambah Alokasi Anggaran untuk meningkatkan Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN.

Pencapaian ini didukung oleh profesionalisme ASN baik PNS maupun P3K di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara umum serta pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia, kegiatan tersebut antara lain Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan dan Pra jabatan. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

SASARAN STRATEGIS 4.1.3 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

23. PUBLIK SERVICE INDEKS

PUBLIK SERVICE INDEKS

= PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA
=3.21

Indeks Publik Service Indeks merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan seberapa baik pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indeks ini dapat diukur melalui berbagai parameter. seperti ketersediaan layanan. waktu respons. kepuasan pelanggan. dan efisiensi biaya.

Dengan mengamati dan menganalisis Indeks Publik Service Indeks. pemerintah dan lembaga publik dapat mengidentifikasi area-area di mana layanan publik dapat ditingkatkan. serta membuat kebijakan dan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu. Indeks Publik Service Indeks merupakan alat penting dalam pengukuran dan peningkatan kualitas layanan publik yang memainkan peran krusial dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

23.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.61 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.85	3.21	3.21	100%	Memuaskan	3.4	94.41

Sumber Data : Kepmenpan RB No.659/2024 diolah oleh Bagian Organisasi.2024

Berdasarkan data, capaian PSI Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sebesar 3,21 berada pada kategori "Memuaskan". Namun, pencapaian ini masih berada di bawah target akhir RPJMD 2026 sebesar 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam kualitas layanan publik, masih ada celah yang harus ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.62 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

2022	2.94	2.94	100%	→	Sangat Berhasil
2023	3.02	3.93	129.70%	↑	Memuaskan
2024	3.12	3.86	123.70%	↓	Memuaskan
2024	3.21	3.21	100%	↓	Sangat Berhasil

Sumber Data : Bagian Organisasi. 2024

Capaian Publik Service Indeks (PSI) Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 hingga 2023, di mana realisasi capaian naik dari 2,94 menjadi 3,93 atau 129,70% dari target, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan publik. Namun, pada tahun 2024, capaian mengalami sedikit penurunan dengan realisasi 3,86 atau 123,70% dari target, meskipun masih dalam kategori Memuaskan. Pada akhir tahun 2024, capaian menurun lagi menjadi 3,21, tepat di angka target (100%), yang mengindikasikan bahwa meskipun target terpenuhi, tidak ada peningkatan signifikan seperti tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan agar strategi peningkatan pelayanan publik dapat terus dioptimalkan dan tidak mengalami stagnasi di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.63 Hasil IPP 2024 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	IPP	IPP	IPP	IPP	KATEGORI
		DINSOS	RSUD	DUKCAPIL	KAB/KOTA	
1	Kota Payakumbuh	4.51	4.48	4.48	4.5	A-
2	Kab. PESISIR SELATAN	4.53	4.39	4.47	4.46	A-

3	Kab. SOLOK	4.51	4.32	4.55	4.46	A-
4	Kab. SIJUNJUNG	4.41	4.42	4.25	4.36	A-
5	Kota Pariaman	4.22	4.21	4.21	4.32	A-
6	Kab. PADANG PARIAMAN	4.23	4.47	4.17	4.29	A-
7	Kab. LIMA PULUH KOTA	4.52	4.32	3.96	4.27	A-
8	Kab. TANAH DATAR	3.86	4.4	4.53	4.26	A-
9	Kota Padang Panjang	3.51	4.45	4.45	4.17	A-
10	Kab. PASAMAN	3.68	4.16	4.54	4.13	A-
11	Kota Bukittinggi	3.62	4.44	4.44	4.13	A-
12	Kota Solok	3.9	NA	4.26	4.08	A-
13	Kab. SOLOK SELATAN	3.52	4.22	3.77	3.84	B
14	Kab. PASAMAN BARAT	3.57	3.16	3.77	3.5	B-
15	Kota Padang	2.98	3.52	3.68	3.44	B-
16	Kab. Kepulauan Mentawai	3.41	3.49	2.9	3.27	B-
17	Kab. Agam	3.26	3.82	2.66	3.25	B-
18	Kab. Dharmasraya	4.2	2.41	3.03	3.21	B-
19	Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	NA
Provinsi Sumatera Barat		2,83	4,49	3,59	3,64	B

Sumber :Kepmenpan RB No 659/2024

Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat ke-18 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam pencapaian PSI, dengan nilai 3,21 (kategori B-). Jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki indeks di atas 4,0 seperti Kota Payakumbuh (4,5) dan Kabupaten Pesisir Selatan (4,46), terlihat bahwa Dharmasraya masih memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik nya.

23.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Indeks pelayanan publik atau publik indeks service di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan pencapaian, khususnya pada IPP RSUD Sungai Dareh, hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM di Kabupaten Dharmasraya yang mampu melakukan pembinaan dalam peningkatan capaian kinerja ini, selain itu, anggaran yang dialokasikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tidak rasional untuk mencapai kinerja ini secara maksimal.

Namun, meskipun mendapat nilai no 2 terendah se-Sumatera Barat, beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Pembinaan kepada Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN RB atau perangkat daerah lokus penilaian
2. Pendampingan pengisian kuesioner penilaian indeks pelayanan publik di 3 Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara Perangkat Daerah lokus dan Tim penilai yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah telah mendapatkan penilaian tinggi untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, hasil penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.64 Nilai Kepatuhan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1	Kab Solok	97.73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Kota Payakumbuh	97.6	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Kab Agam	95.48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Kota Padang Panjang	94.46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kota Padang	93.67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kab Tanah Datar	93.51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Kab Pesisir Selatan	92.7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Provinsi Sumatera Barat	91.65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9	Kab Pasaman	91.23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10	Kab Dharmasraya	91.14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11	Kota Pariaman	90.98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12	Kota Solok	90.49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13	Kab Padang Pariaman	89.86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14	Kota Bukittinggi	89.55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15	Kota Sawahlunto	89.46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16	Kab 50 Kota	89.44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17	Kab Sijunjung	89.33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18	Kab Pasaman Barat	88.85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19	Kab Kep Mentawai	88.42	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20	Kab Solok Selatan	87.06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan data evaluasi, Kabupaten Dharmasraya mendapatkan nilai 91,14 dengan kategori zona hijau dan opini "Kualitas Tertinggi." Meskipun masuk dalam kelompok tertinggi,

peringkat Dharmasraya berada di posisi ke-9 dari total 19 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini hanya sedikit berada di bawah Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh nilai 91,65 dan menduduki peringkat ke-8.

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Dharmasraya masih memiliki potensi untuk memperbaiki peringkat dengan peningkatan nilai yang lebih kompetitif. Kabupaten Solok, yang menduduki posisi teratas, memiliki nilai 97,73, menunjukkan jarak capaian yang cukup besar dari Dharmasraya. Meski demikian, keberhasilan Dharmasraya mencapai zona hijau dengan kualitas tertinggi tetap merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Fokus ke depan dapat diarahkan pada strategi perbaikan pelayanan publik yang lebih inovatif untuk menyaingi daerah dengan skor tertinggi di Sumatera Barat.

24. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT = Hasil dari Survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya

$$\text{IKM Konversi} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 21 = 84.65$$

24.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai Indeks Kinerja terkait Kepuasan Masyarakat. Data ini mencerminkan evaluasi kinerja suatu pemerintahan atau organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat

Tabel 3.65 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
79	84.35	84.65	100.35	Memuaskan	85	99.59

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2024 oleh BAPPERIDA

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat peningkatan capaian dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 79 menjadi realisasi 84,65 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,35 dengan capaian 100,35%. Dengan predikat "Memuaskan," capaian ini menunjukkan tren positif dalam pencapaian target kinerja. Namun, untuk mencapai target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85, masih diperlukan upaya berkelanjutan, mengingat persentase terhadap target akhir RPJMD saat ini telah mencapai 99,59%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran akhir hampir tercapai, namun tetap membutuhkan konsistensi dalam peningkatan kinerja.

Tabel 3.66 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	80	81	101.25	→	Memuaskan
2023	81	83.7	103.33	↑	Memuaskan
2024	83.7	84.35	102.77	↓	Memuaskan
2024	84.35	84.65	100.35	↓	Memuaskan

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2024 oleh BAPPERIDA

Data menunjukkan tren capaian kinerja yang secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 81 dengan capaian kinerja 101,25%, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 83,7 dengan capaian 103,33%, menunjukkan tren positif. Namun, pada tahun 2024, meskipun target terus meningkat, tren capaian mengalami sedikit penurunan, dari 102,77% pada target 83,7 menjadi 100,35% pada target 84,35. Meskipun demikian, seluruh capaian tetap berada dalam kategori "Memuaskan," menandakan pencapaian kinerja yang masih sesuai dengan harapan. Ke depan, diperlukan upaya strategis untuk menjaga tren peningkatan agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

24.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh kinerja sembilan unsur pelayanan, yaitu: (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) spesifikasi jenis produk pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta (9) sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya tiga unsur pelayanan yang memperoleh respons dengan kategori sangat baik atau baik, yaitu unsur persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, serta biaya/tarif.

Sementara itu, unsur yang dominan terhadap belum optimal nya pencapaian IKM adalah: (1) sarana dan prasarana, yang dikeluhkan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Camat Koto Baru, Kantor Camat Sitiung, Puskesmas Koto Baru, dan RSUD Sei Dareh; (2) kompetensi pelaksana, yang menjadi keluhan pada empat unit pelayanan publik, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, Dinas Sosial P3PPKB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) perilaku pelaksana, yang dikeluhkan pada Dinas Sosial P3PPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung; dan (4) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yang dikeluhkan pada Kantor Wali Nagari Koto Baru, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, serta Puskesmas Koto Baru.

Sebagai upaya perbaikan, unit pelayanan publik yang masih mendapat nilai rendah dalam aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan diharapkan dapat melakukan pembenahan dengan membuka kanal pengaduan yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, diperlukan penguatan kontrak kinerja antara unit pelayanan publik dengan masyarakat melalui penerapan *citizen charter* sebagai bentuk konkret komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya lainnya mencakup peningkatan alokasi anggaran pada tiga unsur utama, yakni: (1) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (2) peningkatan kompetensi pelaksana, serta (3) perbaikan sarana dan prasarana.

Penilaian Survey Kepuasan Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan akademisi agar survey lebih reliabel, untuk pelaksanaan survey ini menggunakan anggaran pada program penelitian dan pengembangan daerah yang berfokus pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan serta pengkajian peraturan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data serta pengkajian peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp333.505.100. Realisasi anggaran yang telah dicapai adalah sebesar Rp331.361.686 atau 99,36% dari total anggaran yang dialokasikan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat adalah :

1. Transformasi pelayanan publik menuju SPBE
2. Pemanfaatan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP dalam sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik
3. Pembentukan Tim Satsus (Satuan Khusus) yang bertugas menjawab dan dan menjelaskan pengaduan. saran dan masukan yang diberikan dan dipublikasikan kembali di media sosial UPP atau media pajang luar ruang yang ada di UPP sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan pengaduan. saran dan masukan yang mereka sampaikan ke UPP
4. Kebijakan pengaturan angkutan umum dalam menjangkau UPP
5. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2019 yang menjadi panduan bagi BAPPERIDA dalam membangun kinerja maupun kualitas pelayanan publik. sekaligus menjadi pedoman publik untuk melakukan pemantauan. evaluasi. serta penilaian.
6. Reviu secara periodik dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang berkinerja rendah dan hasil reviu dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan layanan oleh UPP telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan

Hambatan yang mempengaruhi capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 :

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik. terutama pelayanan publik yang banyak dikunjungi masyarakat seperti Dinas Pendidikan. Dinas Dukcapil. Dinas PMPTSP dan layanan di Puskesmas
2. Informasi pelayanan publik yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Kualitas sarana dan prasarana di UPP belum memadai
4. Kualitas SDM UPP publik masih ada yang kurang responsif. kurang kompeten. kurang ramah serta terlalu lambat dalam melakukan pelayanan.
5. Umpan balik atau penanganan pengaduan. saran. masukan Masyarakat penggunaan layanan belum terkelola sebagaimana mestinya
6. Akses lokasi UPP susah dijangkau kendaraan umum

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja antara lain:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik dengan memanfaatkan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP seperti pemberitahuan informasi layanan melalui web UPP. facebook. dan WA pada layanan RSUD Sei. Dareh
2. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan pengadaan sarana parasana. serta optimalisasi pemeliharaan secara berkala.
3. Peningkatan kompetensi pegawai (SDM) UPP secara periodik melalui pendidikan ataupun pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPP.
4. Melengkapi seluruh kegiatan UPP dengan Standar Operation Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan
5. Melakukan perbaikan layanan sesuai hasil evaluasi dari hasil capaian IKM tahun sebelumnya

Tujuan 4.2 Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari

SASARAN STRATEGIS 4.2.1 MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL. EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI

25. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

= NILAI KETAHANAN SOSIAL YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

=0.8651

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat

sasaran. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL), yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

25.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0.8108	0.8464	0.8651	102.21%	Memuaskan	0.8607	100.51

Sumber : KEMENDES DPTT diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Capaian kinerja rata-rata Indeks Ketahanan Sosial menunjukkan tren positif, meningkat dari 0,8108 pada 2020 menjadi 0,8651 pada 2024, melampaui target 0,8464 dengan capaian 102,21%. Dengan predikat "Memuaskan," target akhir RPJMD 2026 sebesar 0,8607 telah

tercapai lebih awal dengan pencapaian 100,51%. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

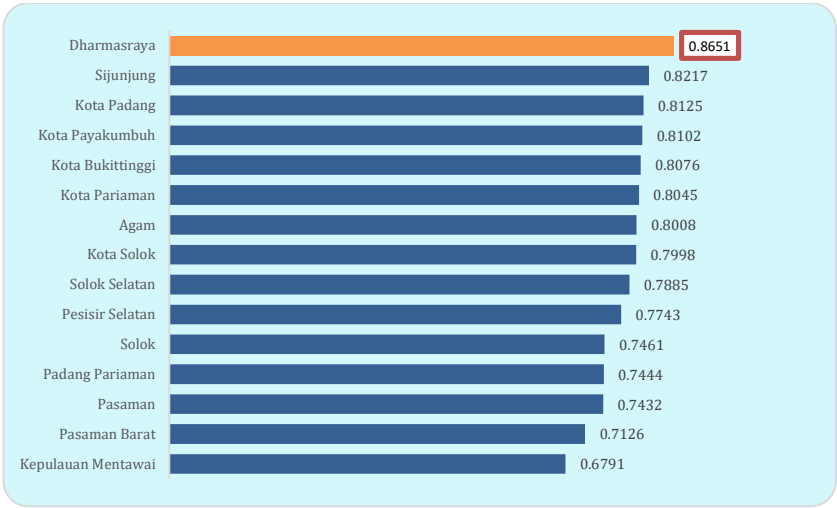
Tabel 3.68 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.8189	0.828	101%	→	Memuaskan
2022	0.8195	0.8474	103%	↑	Memuaskan
2023	0.8354	0.8464	101.32%	↓	Memuaskan
2024	0.8464	0.8651	102.21%	↑	Memuaskan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Capaian kinerja menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan realisasi yang terus melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, capaian mencapai 101% dari target, kemudian meningkat menjadi 103% pada 2022. Meskipun mengalami sedikit penurunan capaian pada 2023 sebesar 101,32%, kinerja kembali meningkat pada 2024 dengan capaian 102,21%. Seluruh periode ini mendapatkan predikat "Memuaskan," yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja. Untuk melihat perbandingan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.18 Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PDTT No 400/2024

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Sosial di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya mencatatkan nilai tertinggi sebesar 0.8651, unggul dibandingkan daerah lainnya. Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial di Dharmasraya berada dalam kondisi yang sangat baik, mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan dalam memperkuat aspek

sosial masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

25.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan penting, di antaranya :

1. Ketersediaan sarana kesehatan yang telah terpenuhi.
2. Akses pendidikan bagi jenjang PAUD dan pendidikan dasar (SD) yang sudah memadai.
3. Adanya budaya gotong royong, sikap toleransi, serta ketersediaan layanan keamanan warga seperti pos ronda dan sistem keamanan lingkungan.
4. Fasilitas MCK yang telah memenuhi standar kesehatan.
5. Ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi yang baik.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, masih terdapat kendala yang menghambat pencapaian indikator, antara lain:

1. Sebaran tenaga kesehatan (bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya) yang belum merata.
2. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.
3. Beberapa nagari masih belum memiliki akses pendidikan jenjang SMP, SMA, serta program pendidikan nonformal seperti Paket A, B, C, dan kegiatan kursus.
4. Kurangnya kelompok olahraga yang dapat mendukung kesehatan masyarakat.
5. Beberapa nagari masih memiliki akses internet yang kurang optimal di kantor wali nagari, sehingga menghambat proses entri data.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi faktor penghambat di atas. Salah satunya adalah dengan menyediakan data perkembangan Indeks Ketahanan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi bersama OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Selain itu, Dinas PMD bersama tenaga ahli juga memberikan rekomendasi mengenai aspek yang perlu ditingkatkan kepada OPD yang berwenang agar nilai Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada aspek Indeks Ketahanan Sosial, dapat meningkat. Dengan demikian, nilai IDM Kabupaten Dharmasraya dapat bertambah dan statusnya dapat naik dari Kabupaten Maju menjadi Kabupaten Mandiri.

Untuk mencapai target kinerja ini, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Nagari (PN) dan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP). Bidang PN menugaskan personel ke nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sedangkan Bidang PKP melakukan koordinasi lintas OPD dengan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, tim dari kedua bidang ini telah bekerja secara efektif dan efisien, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Bidang Pemerintahan Nagari telah melaksanakan sosialisasi serta pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa dan tata cara penyaluran Dana Desa sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar Dana Desa dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 meliputi:

1. Program Padat Karya Tunai
2. Penanganan stunting
3. Ketahanan pangan
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
5. Peningkatan ekonomi melalui BUMDes/BUMNag

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melaksanakan beberapa kegiatan strategis, seperti:

1. Rapat koordinasi lintas OPD untuk percepatan pengumpulan data IDM.
2. Monitoring dan evaluasi ke kecamatan terkait entry data IDM.
3. Pendampingan kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa bersama TAPD dalam proses entry data IDM.

26. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI
= NILAI INDEKS KETAHANAN EKONOMI YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA
= 0.7798

Indeks Ketahanan Ekonomi merupakan indeks kedua yang diukur untuk membentuk Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

26.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.69 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0.6917	0.7436	0.7798	104.87%	Memuaskan	0.7343	106.2

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Capaian kinerja rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 0,6917 pada tahun 2020 menjadi 0,7798 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,7436 dengan capaian 104,87%. Dengan predikat "Memuaskan," pencapaian ini tidak hanya menunjukkan tren positif tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD 2026 sebesar 0,7343, dengan persentase pencapaian mencapai 106,2%. Keberhasilan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

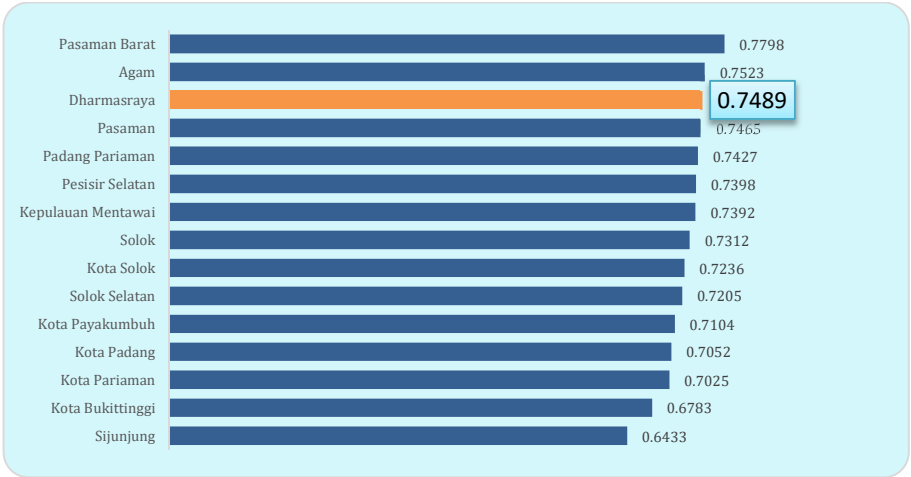
Tabel 3.70 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.6986	0.7087	101%	→	Memuaskan
2022	0.7056	0.7221	102%	↑	Memuaskan
2023	0.7127	0.7436	104%	↑	Memuaskan
2024	0.7436	0.7798	104.87%	↑	Memuaskan

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Kenaikan Indeks Ketahanan Sosial Dharmastraya didorong oleh peningkatan pada Dimensi Akses Distribusi dan Akses Kredit. Pada Akses Distribusi, jumlah nagari yang memiliki Kantor Pos dan Jasa Logistik meningkat dari 7 nagari (2022) menjadi 9 (2023) dan 18 (2024). Sementara itu, pada Akses Kredit, jumlah nagari dengan Lembaga Perbankan Umum dan BPR bertambah dari 16 (2022) menjadi 17 (2023) dan 18 (2024). Akses penduduk ke kredit juga terus meningkat, dari 20 nagari (2022) menjadi 21 Nagari (2023) dan 28 Nagari (2024).

Grafik 3.19 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PD TT No 400/2024

Indeks Ketahanan Ekonomi DharmaSraya berada pada angka **0.7489**, menempatkannya di posisi tengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Meskipun belum menjadi yang tertinggi, capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah memiliki daya tahan yang cukup baik. Untuk meningkatkan indeks ini, perlu dilakukan penguatan sektor ekonomi lokal, akses terhadap modal usaha, serta optimalisasi infrastruktur ekonomi.

26.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator didukung faktor internal maupun eksternal yang saling berpengaruh, berbagai aspek yang berperan secara signifikan, antara lain:

1. Akses penduduk ke pusat perdagangan yang sudah memadai.
2. Tersedianya lembaga ekonomi rakyat, seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Keterbukaan akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Meskipun terdapat faktor pendukung, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian indikator, yaitu:

1. Belum tersedianya angkutan umum yang memadai.
2. Kondisi usaha kedai makan, restoran, dan perhotelan yang masih kurang berkembang.
3. Terbatasnya ketersediaan lembaga perbankan dan perkreditan.
4. Minimnya akses distribusi logistik, seperti kantor pos dan layanan jasa logistik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan menyajikan data perkembangan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan (Kumperdag) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, Dinas PMD beserta tenaga ahli juga memberikan rekomendasi terkait aspek yang perlu ditingkatkan kepada OPD yang memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya Indeks Ketahanan Ekonomi, Dinas PMD telah melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). BUMDes/BUMNag diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi serta IDM Kabupaten DharmaSraya, sehingga status Kabupaten DharmaSraya dapat meningkat dari Kabupaten Maju menjadi Kabupaten Mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai indikator ini antara lain:

1. Sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa serta tata cara penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaannya dapat lebih tepat sasaran.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yang mencakup:
 - a. Program Padat Karya Tunai
 - b. Penanganan stunting
 - c. Ketahanan pangan
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - e. Peningkatan ekonomi melalui BUMDes/BUMNag

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan menjalankan berbagai kegiatan untuk mempercepat pengumpulan dan entry data IDM, antara lain:

1. Rapat koordinasi lintas OPD guna mempercepat pengumpulan data IDM.
2. Monitoring dan evaluasi ke kecamatan, khususnya dalam proses entry data IDM.
3. Pendampingan oleh TAPD terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses entry data IDM.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pencapaian indikator kinerja dapat terus meningkat, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat mencapai status Kabupaten Mandiri dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

27. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN						
= NILAI INDEKS KETAHANAN EKOLOGI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA						
=0.7154						

27.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0,5833	0.6667	0.7154	107.3	Memuaskan	0.6192	115.54

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Capaian kinerja rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 0,5833 pada tahun 2020 menjadi 0,7154 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,6667 dengan capaian 107,3%. Dengan predikat

"Memuaskan," pencapaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD 2026 sebesar 0,6192, dengan persentase pencapaian mencapai 115,54%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan ekologi. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

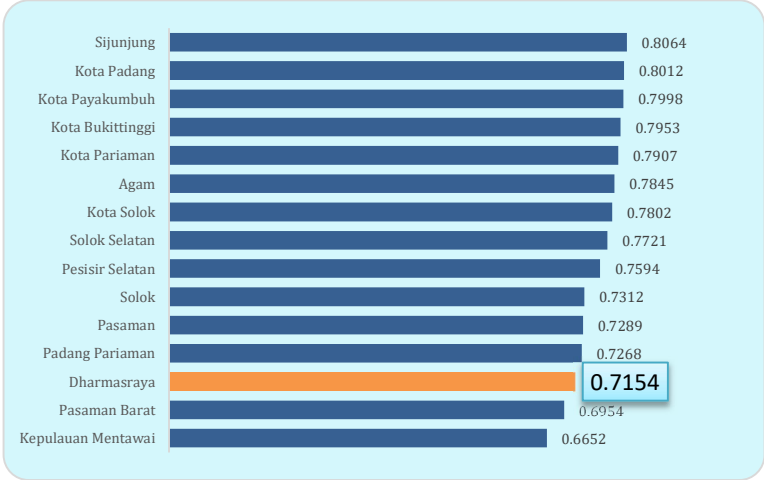
Tabel 3.72 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.5891	0.6039	103%	→	Memuaskan
2022	0.595	0.6282	106%	↑	Memuaskan
2023	0.601	0.6667	111%	↑	Memuaskan
2024	0.6667	0.7154	107.30%	↓	Memuaskan

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Peningkatan ini terjadi pada Dimensi Potensi tanggap bencana khususnya pada item penilaian Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam. Pada tahun 2022 baru 3 nagari yang memenuhi item ini, masih ada 42 nagari yang masuk dalam skala Super Prioritas dan 7 Nagari yang masuk dalam kategori Prioritas. Di tahun 2023 sudah terdapat 9 Nagari yang sudah memenuhi item ini, 35 Nagari masuk skala Super Prioritas dan 8 Nagari masuk skala Prioritas. Selanjutnya pada tahun 2024, sudah ada 13 Nagari yang memenuhi unsur item ini, dengan 24 Nagari masuk skala Super Prioritas dan 15 Nagari di skala Prioritas.

Grafik 3.20 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PD TT No 400/2024

Indeks Ketahanan Ekonomi Dharmasraya tercatat **0.7154**, menempatkannya di posisi bawah dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan indeks ini, perlu dilakukan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta pengembangan infrastruktur ekonomi yang lebih merata.

27.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Salah satu faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator adalah telah adanya beberapa nagari yang memiliki fasilitas mitigasi bencana, baik berupa alat keselamatan maupun jalur evakuasi bencana. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator, antara lain:

1. Masih banyak nagari yang belum memiliki fasilitas mitigasi bencana, baik berupa alat keselamatan maupun jalur evakuasi bencana.
2. Masih terdapat masyarakat yang membuka lahan baru dengan cara pembakaran, yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah menyampaikan data perkembangan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selain itu, Dinas PMD bersama Tenaga Ahli memberikan rekomendasi kepada OPD yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut mengenai item-item yang perlu ditingkatkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, sehingga nilai IDM Kabupaten Dharmasraya dapat meningkat. Dengan demikian, status Kabupaten Dharmasraya yang saat ini berstatus sebagai Kabupaten Maju dapat naik menjadi Kabupaten Mandiri.

Upaya pencapaian kinerja ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari (PN) dan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP). Bidang Pemerintahan Nagari menugaskan personel ke nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sementara Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melakukan kerja sama lintas OPD dengan dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.

Di Bidang Pemerintahan Nagari, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa serta tata cara penyaluran Dana Desa sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup beberapa program utama, yaitu:

1. Program Padat Karya Tunai

2. Penanganan Stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
5. Peningkatan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya rapat koordinasi lintas OPD dalam percepatan pengumpulan data IDM, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan terkait entry data IDM, serta pendampingan terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses entry data IDM.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, diharapkan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus berlanjut, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

MISI 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)

SASARAN STRATEGIS 5.1.1 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

28. KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan (ha)}}{\text{Jumlah sisa ruang yang dapat dimanfaatkan}} * 100\%$$

$$= \frac{21.110 \text{ Ha}}{194.219 \text{ Ha}} * 100\% = 10.89\%$$

28.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat diukur melalui perbandingan antara luas rekomendasi perizinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan dan sisa ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Berdasarkan data yang tersedia, luas rekomendasi perizinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan mencapai 21.110 hektare.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023–2043, luas wilayah budidaya tercatat sebesar 270.754 hektare. Dari total tersebut, terdapat 68.633 hektare kawasan hutan produksi serta 7.905 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga sisa ruang yang masih dapat

dimanfaatkan mencapai 194.219 hektare, capaian Kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.73 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0	10	10.89%	108.9%	Memuaskan	35 %	31.11%

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan perkembangan positif, dari kondisi awal 0 pada tahun 2020 menjadi 10,89% pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 10% dengan capaian 108,9%. Dengan predikat "Memuaskan," pencapaian ini mencerminkan kemajuan dalam penataan ruang yang lebih terarah. Namun, untuk mencapai target akhir RPJMD 2026 sebesar 35%, masih diperlukan upaya berkelanjutan, mengingat persentase terhadap target akhir baru mencapai 31,11%. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

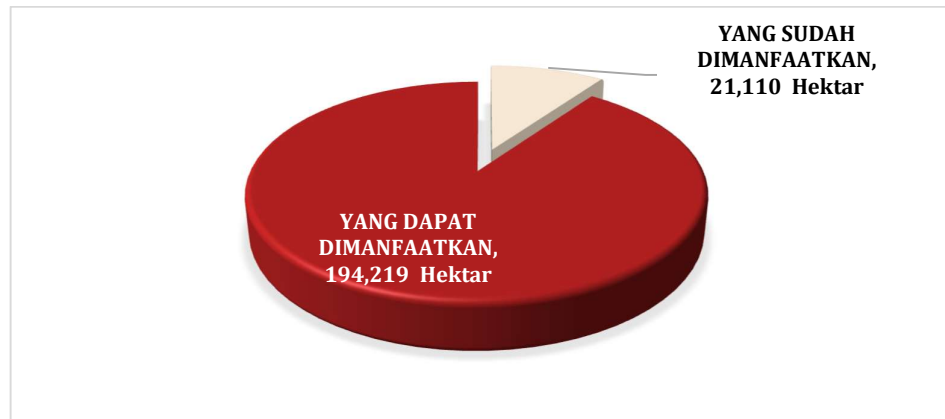
Tabel 3.74 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	5%	6.40%	128%	→	Memuaskan
2023	10%	7.45%	74.50%	↓	Cukup Berhasil
2024	10%	7.74%	77.41%	↑	Cukup Berhasil
2024	10%	10.89%	108.90%	↑	Memuaskan

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, capaian mencapai 128% dengan kategori Memuaskan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 74.50% dengan predikat Cukup Berhasil. Tren kembali meningkat di tahun 2024, dengan capaian 77.41% (Cukup Berhasil) pada salah satu pengukuran dan 108.90% (Memuaskan) pada pengukuran lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pemanfaatan ruang yang lebih optimal di tahun 2024.

Grafik 3.21 Jumlah Lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

Diagram di atas menunjukkan perbandingan antara luas lahan yang dapat dimanfaatkan dengan yang sudah dimanfaatkan. Dari total 194.219 hektar lahan yang tersedia untuk pemanfaatan, baru 21.110 hektar yang telah dimanfaatkan. Ini berarti pemanfaatan lahan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang ada.

28.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dengan melakukan langkah seperti Ketersediaan anggaran yang mendukung. Rekomendasi tata ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

Tujuannya untuk menjamin setiap tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang (yang telah diperdakan) dapat tercapai. Setiap kegiatan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. sehingga setiap kegiatan alih fungsi lahan harus dibarengi dengan rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Berdasarkan Permendagri 116 tahun 2007 tentang koordinasi penyelenggaraan ruang. Tugas pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya adalah :

1. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

3. Hal diatas merupakan dasar dalam setiap penerbitan rekomendasi penataan ruang.

masalah atau kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang adalah :

1. Bangunan yang belum berizin dan tidak mengajukan izin. serta tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
2. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB

Dari masalah yang ditemui, solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

Untuk mewujudkan indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan program penyelenggaraan penataan ruang dengan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang. pemberian insentif dan disinsentif. serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin. dikenai sanksi administratif. sanksi pidana. dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang Perda RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031. sejalan dengan rencana tata ruang. baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut. antara lain.

3. berupa keringanan pajak.
4. pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur).

5. pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
6. Disinsentif dimaksudkan kepada perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
7. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya. Rekomendasi Tata Ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

SASARAN STRATEGIS 5.1.2 MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

29. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kualitas lingkungan di suatu daerah

$$IKLH = (0.376 \times 51,11) + (0.405 \times 91,97) + (0.219 \times 42,55)$$

$$IKLH = 19,22 + 37,25 + 9,32$$

$$IKLH = 65,79$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah daerah. IKLH ini mencakup berbagai aspek lingkungan hidup, seperti

kualitas udara. air. tanah. keberlanjutan sumber daya alam. biodiversitas. serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

29.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.75 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.94	66	65.79	99.68	Sangat Baik	66.55	98.86

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 mencapai 65,79, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 66, dengan capaian 99,68%. Dibandingkan kondisi awal tahun 2020 yang berada di angka 67,94, terjadi sedikit penurunan, meskipun predikatnya tetap "Sangat Baik." Selain itu, pencapaian ini masih mendekati target akhir RPJMD 2026 sebesar 66,55, dengan persentase terhadap target akhir mencapai 98,86%. Ke depan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.76 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

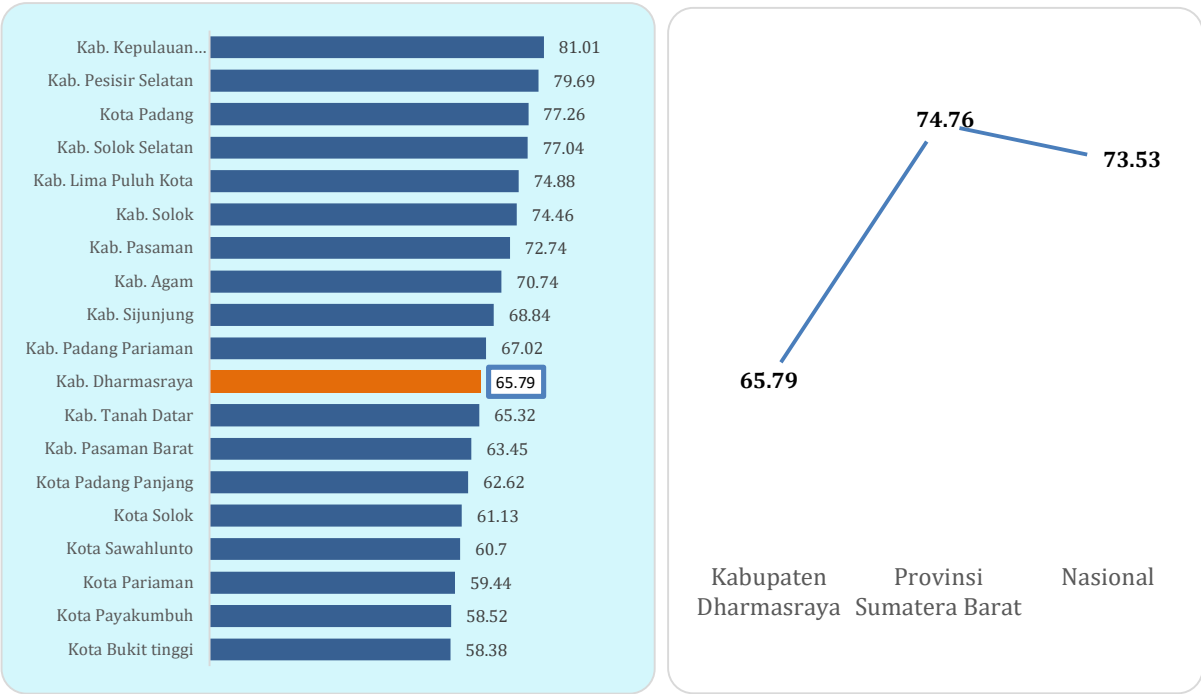
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	64.45	61.12	94.83	➡	Memuaskan
2022	64.93	63.23	97.38	⬆	Memuaskan
2023	65.47	63.48	96.96	⬇	Memuaskan
2024	66	65.79	99.68	⬆	Memuaskan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2024

Tren kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam empat tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang stabil dan memuaskan, dengan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2021, capaian kinerja mencapai 94,83%, kemudian meningkat menjadi 97,38% pada 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 96,96%, capaian kembali meningkat signifikan pada 2024 dengan 99,68%, mendekati target penuh. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, dengan potensi peningkatan lebih lanjut di masa depan.

Untuk melihat capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 mencapai 65,79, yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (74,76) dan nasional (73,53). Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Dharmasraya berada di posisi menengah ke bawah, tertinggal dari daerah seperti Kepulauan Mentawai (81,01), Pesisir Selatan (79,69), dan Kota Padang (77,26). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan IKLH agar dapat mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dan Nasional.

29.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Dharmasraya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Keberhasilan dalam menjaga kualitas udara yang baik di wilayah ini didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Efektivitas pengawasan terhadap industri yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
2. Keberadaan vegetasi hijau yang cukup melimpah di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, yang berperan dalam menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara.

3. Program penghijauan yang telah dilaksanakan di lingkungan perkantoran, sehingga menciptakan ruang terbuka hijau yang berkontribusi terhadap kualitas udara yang lebih baik.
4. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga vegetasi hijau di lingkungan perumahan, yang turut membantu mengurangi emisi gas pencemar udara.

Meskipun terdapat berbagai capaian positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai, seperti penambangan pasir, batu, dan emas yang dilakukan tanpa izin, yang berpotensi menyebabkan pencemaran air serta degradasi lingkungan.
2. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan sebagai penyerap karbon dan penyangga ekosistem.
3. Kurangnya sistem pengelolaan limbah domestik, di mana masih ditemukan praktik pembuangan limbah langsung ke sungai, baik berupa buang air besar sembarangan, limbah kotoran ternak (sapi dan kerbau), maupun limbah rumah tangga yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai strategi dan solusi telah dirancang guna meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta dampak negatif pencemaran.
2. Edukasi berkelanjutan terkait pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga terkait.
3. Penguatan program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah guna meningkatkan tutupan vegetasi serta memperbaiki kualitas udara dan ekosistem.

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Akreditasi laboratorium daerah, sehingga biaya pemeriksaan sampel dapat dikembalikan ke daerah sebagai sumber PAD. Dengan demikian, layanan pengujian kualitas lingkungan dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
2. Penguatan pengawasan terhadap perusahaan, terutama yang berpotensi menghasilkan limbah, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta menekan tingkat pencemaran.

Untuk memastikan implementasi strategi yang efektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, beberapa langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun pencemar udara, guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
2. Memperluas program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah, guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
3. Penerbitan surat edaran larangan penebangan pohon di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, kawasan sekolah, serta lingkungan perumahan, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.
4. Penataan lahan tambang masyarakat, agar dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih optimal dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan implementasi strategi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, diharapkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor lingkungan dapat lebih dioptimalkan.

SASARAN STRATEGIS 5.1.3 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

30. INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH

INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH
 = INDEKS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGGAMBARAKAN TENTANG TINGKAT RESIKO KEJADIAN BENCANA DI SUATU DAERAH
 =130.03*

Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD) adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang memengaruhi potensi terjadinya bencana serta dampak yang mungkin timbul.

30.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.77 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
143.2	130	130.03*	99.98	Sangat Baik	110	81.79

Ket: * Data Sementara

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja Indeks Risiko Bencana Daerah menunjukkan penurunan dari 143,2 pada tahun 2020 menjadi 130,03 pada tahun 2024, mendekati target yang ditetapkan sebesar 130 dengan capaian 99,98%. Dengan predikat "Sangat Baik," tren ini mencerminkan upaya mitigasi bencana yang berjalan efektif. Namun, untuk mencapai target akhir RPJMD 2026 sebesar 110, masih diperlukan strategi berkelanjutan, mengingat pencapaian saat ini baru mencapai 81,79% dari target akhir. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

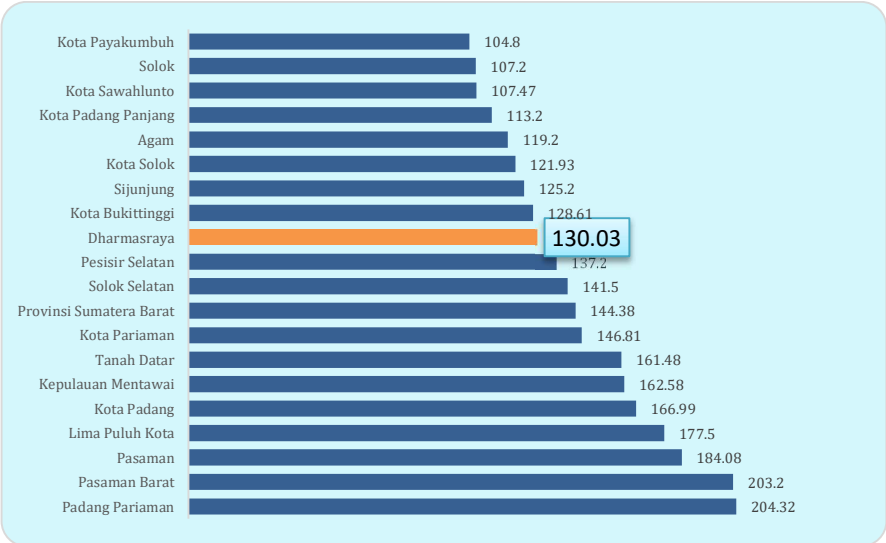
Tabel 3.78 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	135	137.2	98.37%	→	Sangat Berhasil
2022	130	137.69	94.09%	↓	Sangat Berhasil
2023	125	130.02	95.84%	↑	Sangat Berhasil
2024	130	130.03*	99.98%	↑	Sangat Berhasil

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2024

Capaian kinerja indikator ini menunjukkan tren yang secara keseluruhan tetap berada dalam kategori Sangat Berhasil selama empat tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya (94,09%), tren kembali meningkat pada tahun 2023 (95,84%) dan mencapai 99,98% pada tahun 2024, yang hampir menyentuh target secara penuh. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, dengan realisasi yang konsisten di atas 94% setiap tahunnya, menandakan adanya perbaikan dan stabilitas dalam kinerja.

Grafik 3.23 Indeks Kualitas Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

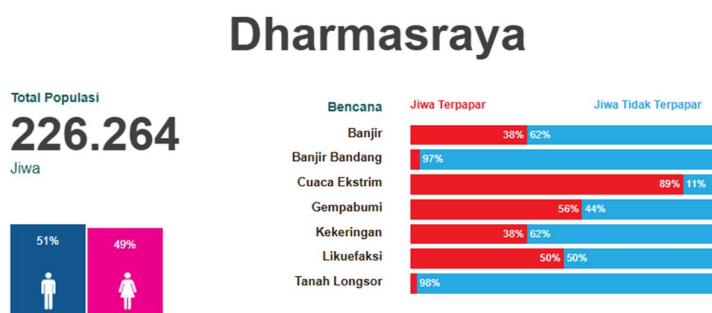


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Indeks kinerja Kabupaten Dharmasraya sebesar 130,03 menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibanding beberapa daerah dengan nilai indeks yang lebih tinggi, seperti Padang Pariaman dan Pasaman Barat. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di 144,38, Dharmasraya masih memiliki tantangan untuk terus menekan angka indeks agar menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Tren yang stabil dan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya mengindikasikan adanya perbaikan, namun upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan kinerja semakin membaik.

30.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Grafik 3.24 Tingkat Paparan Penduduk Dharmasraya terhadap Berbagai Bencana



Sumber ; Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Kabupaten Dharmasraya memiliki total populasi 226.264 jiwa, dengan distribusi gender yang hampir seimbang (51% laki-laki dan 49% perempuan). Dari sisi risiko bencana, mayoritas penduduk paling terdampak oleh cuaca ekstrem (89%), banjir bandang (97%), dan tanah longsor (98%), menunjukkan bahwa wilayah ini sangat rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana hydrometeorology. Sementara itu, bencana seperti gempa bumi (56%) dan likuefaksi (50%) juga memiliki tingkat paparan yang signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan bencana hydrometeorology. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis.

Penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya melibatkan berbagai sumber daya yang dapat berperan dalam proses pencapaian kinerja. Berikut ini beberapa sumber daya yang penting dalam pencapaian penurunan indeks risiko bencana daerah:

1. Keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana sangat penting. Pelatihan kesiapsiagaan, edukasi tentang tindakan mitigasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dapat memainkan peran kunci dalam menurunkan risiko bencana.

2. Alokasi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan program-program pengurangan risiko bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan rehabilitasi pasca-bencana sangat penting. Dana ini dapat berasal dari pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan sumbangan masyarakat.
3. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memprediksi, memantau, dan mengurangi dampak bencana. Teknologi juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan bencana, seperti bangunan yang dirancang untuk menahan gempa atau banjir.
4. Kerjasama antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga riset, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam mengurangi risiko bencana. Jaringan ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman terkait pengurangan risiko bencana.
5. Kebijakan yang kuat dan peraturan yang diterapkan secara efektif dapat mempromosikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, manajemen lahan, penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur.

Kombinasi yang efektif dari sumber daya-sumber daya ini dapat membantu dalam mencapai penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya, serta meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain

1. Langkah-langkah untuk menegakkan peraturan daerah terkait pengurangan risiko bencana bisa mencakup pengawasan terhadap pembangunan yang sesuai dengan standar tahan bencana, pelaksanaan zonasi risiko bencana, dan penegakan aturan terkait penggunaan lahan yang aman dari risiko bencana.
2. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bisa mencakup pembentukan tim pemadam kebakaran, pelatihan untuk masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran, peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran, dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.
3. Inspeksi berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran seperti hydrant, alat pemadam api, dan alarm kebakaran untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan.
4. Melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

5. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran. cara menggunakan peralatan pemadam kebakaran. serta mengorganisir komunitas untuk saling membantu dalam situasi kebakaran.
6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum di daerah. termasuk pencegahan terhadap tindak kriminal yang dapat menyebabkan kebakaran atau situasi bencana lainnya.
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Menyediakan informasi tentang potensi risiko bencana di daerah. tanda-tanda peringatan dini. dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil oleh masyarakat.
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Menyelenggarakan program pencegahan bencana seperti pelatihan evakuasi. simulasi tanggap darurat. dan kampanye kesadaran bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Memiliki rencana dan tim yang siap untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cepat dan efisien saat terjadi bencana.

30.3 Rekomendasi Perbaikan yang dapat dilaksanakan

Berdasarkan analisa data capaian kinerja indeks resiko bencana daerah, dapat disusun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Tabel 3.79 Rekomendasi Perbaikan Indeks Resiko Bencana Daerah

Prioritas	Uraian
Prioritas 1	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	2. Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
	7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Penguatan Forum PRB

	9. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
Prioritas 2	1. Penyusunan Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
	2. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
	4. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
	5. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut
	6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
	7. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
	8. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
	9. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
Prioritas 3	1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
	2. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
	3. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga
	4. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
	5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana
Prioritas 4	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
	2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
	3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
	4. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
	5. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
	6. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
	7. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota di daerah berisiko banjir
Prioritas 5	1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
	2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
	3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
	4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
	5. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Konservasi Vegetatif DAS

Prioritas 6	1. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
	2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
	3. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
	4. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah
	5. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
	6. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
	7. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah
	8. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
	9. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
Prioritas 7	1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
	2. Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana
	3. Perencanaan Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
	4. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana
	5. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
	6. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
	7. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana
	8. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
	9. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
	10. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan Bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat terdampak Bencana
	11. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana

MISI 6. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Daerah

Tujuan 6.1 Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya

SASARAN STRATEGIS 6.1.1 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

31. PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT $\frac{(\text{Jumlah Zakat Tahun } n - \text{jumlah zakat tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah Zakat tahun sebelumnya}} * 100\%$ PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT = $\frac{(5.904.401,542 - 4.945,654,119,00)}{4.945,654,119,00} * 100\% = 19.39\%$

31.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2	6	19.39	323.09	Memuaskan	2	969.5%

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2024

Terdapat beberapa faktor yang mungkin mendukung pencapaian ini. Pertama. upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua. adanya program-program edukasi dan promosi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga terkait. yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

Meskipun capaian ini sangat memuaskan. tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di masa mendatang. Ini termasuk upaya untuk terus meningkatkan kesadaran. pendidikan. dan kepercayaan masyarakat. serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat untuk manfaat yang maksimal bagi kaum duafa dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.81 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 2 (Dua) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2023	2	6.31	315.5%
2024	6	19.39	323.09%

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2024

Tren peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya zakat. efektivitas program-program edukasi. dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Dharmasraya.

Tabel 3.82 Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya

No	PROGRAM	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	DHARMASRAYA CERDAS	1,610,278,565.00	1,732,651,500.00
2	DHARMASRAYA SEHAT	633,778,000.00	498,178,800.00
3	DHARMASRAYA MAKMUR	283,075,000.00	507,937,000.00
4	DHARMASRAYA PEDULI	1,317,834,053.00	2,074,860,255.00
5	DHARMASRAYA TAQWA	1,100,688,501.00	1,090,773,987.00
Total		4,945,654,119.00	5,904,401,542.00

Pada tahun 2024, total anggaran untuk program Dharmasraya Cerdas, Sehat, Makmur, Peduli, dan Taqwa mengalami peningkatan sebesar 19,38% dibandingkan tahun 2023, dari Rp4,94 miliar menjadi Rp5,90 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada Dharmasraya Peduli, yang naik lebih dari Rp750 juta atau sekitar 57,4%, mencerminkan peningkatan perhatian terhadap program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dharmasraya Makmur juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 79,5%, menunjukkan dorongan untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Sebaliknya, Dharmasraya Sehat mengalami penurunan alokasi sebesar 21,4%, sementara Dharmasraya Taqwa sedikit menurun 0,9%. Secara keseluruhan, peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi masyarakat.

31.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan 5 Program penyaluran bantuan amil zakat yang dihimpun oleh Baznas, antara lain Dharmasraya Cerdas, Dharmasraya Sehat, Dharmasraya Makmur, Dharmasraya Peduli, Dharmasraya Taqwa, selain itu, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Mereka dapat mengkoordinasikan program-program edukasi dan promosi zakat. serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat untuk memperluas cakupan program tersebut.

2. Baznas Dharmasraya memiliki peran kunci dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Mereka dapat mengoptimalkan upaya pengumpulan zakat melalui program-program promosi dan edukasi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dalam agama Islam. Mereka dapat memberikan ceramah, khutbah, dan nasehat kepada jamaah untuk mendorong mereka membayar zakat secara rutin.
4. Media massa, baik cetak maupun online, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat luas. Liputan, artikel, dan iklan yang mengangkat tema zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
5. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran tentang zakat. Mereka dapat menyelenggarakan program-program pendidikan agama yang mencakup materi tentang zakat, serta mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan membayar zakat secara konsisten.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase peningkatan zakat pada tahun 2024, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan
 - a. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi.
 - b. Efektivitas Program Promosi dan Edukasi: Program-program promosi dan edukasi yang efektif telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi.
2. Faktor Penghambat
 - a. Target Kinerja yang Tidak Realistis. Target kinerja awal yang ditetapkan terlalu rendah, tidak mencerminkan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
 - b. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program promosi dan edukasi tentang zakat serta dalam memastikan efisiensi pengelolaan dana zakat.
3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
 - a. Dilakukan perubahan target kinerja agar lebih sesuai dengan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai konsistensi antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual serta memotivasi kinerja yang lebih tinggi.

- b. Meningkatkan intensitas dan efektivitas program-program promosi dan edukasi tentang zakat untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat zakat serta meningkatkan partisipasi dalam pembayarannya.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan program promosi dan edukasi, serta memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan melakukan perubahan target kinerja yang lebih realistis dan mengoptimalkan program promosi dan edukasi serta pengelolaan dana zakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan mencapai pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Program dan kegiatan penunjang yang efektif merupakan faktor kunci dalam pencapaian indikator kinerja persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisis beberapa program dan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam mencapai target tersebut:

1. Program Edukasi Zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui seminar, ceramah, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat serta dampak positifnya bagi kesejahteraan sosial.
2. Promosi zakat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye publik lainnya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat serta memberikan informasi tentang cara pembayaran zakat yang mudah dan transparan.
3. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas Dharmasraya dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui sinergi ini, dana zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta digunakan untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang memungkinkan penghimpunan zakat langsung dari gaji ASN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat, tetapi juga menciptakan budaya dan kesadaran zakat di kalangan pegawai negeri.
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan program-program zakat untuk memastikan efektivitasnya. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi guna meningkatkan pencapaian indikator kinerja persentase zakat di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disebutkan di atas secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya dapat

terus meningkat. sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

32. PERSENTASE MDA/TPA/TPSA YANG AKTIF

Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

$$= \frac{\text{Jumlah MDA/TPA/TPSA yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh MDA/TPA/TPSA}} * 100\%$$
$$= \frac{38}{42} * 100\% = 90.48 \%$$

32.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.83 Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
75	90.47	90.48	100.01	Memuaskan	100	90.48%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2024

Capaian yang sangat baik ini menandakan adanya kesuksesan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA. Dengan demikian. program-program yang dilaksanakan telah efektif dalam menarik minat dan keterlibatan masyarakat. yang mungkin mencerminkan kualitas implementasi yang baik dan strategi komunikasi yang efektif. Ini adalah indikasi positif untuk keberlanjutan program-program tersebut dan menunjukkan adanya potensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Tabel 3.84 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	77	70	90 %
2022	80	80	100 %
2023	85	90.48	106.4 %
2024	90.47	90.48	100.01%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2024

Kinerja indikator yang diukur menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian kinerja masih berada di bawah target dengan **90%**, namun pada tahun berikutnya, kinerja meningkat signifikan hingga mencapai **100%** di 2022. Tren terus membaik di 2023 dengan realisasi **106,4%**, yang berarti kinerja melampaui target. Pada 2024, capaian tetap optimal dengan **100,01%**, menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan pencapaian yang telah diraih. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan

efektivitas dan konsistensi dalam pencapaian target indikator kinerja selama empat tahun terakhir.

32.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai indikator persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif dapat memberikan wawasan penting dalam mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keberhasilan dalam meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sering kali tergantung pada sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam kegiatan tersebut dan seberapa aktif mereka berpartisipasi. Kegagalan dapat terjadi jika kesadaran masyarakat rendah atau jika ada hambatan yang menghalangi partisipasi aktif.
2. Kegagalan juga dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Ini bisa termasuk kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya sumber daya yang memadai, atau kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut juga tergantung pada keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kegagalan bisa terjadi jika tidak ada komitmen yang cukup dari pihak-pihak terkait atau jika tidak ada koordinasi yang baik antara mereka.
4. Faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit atau perubahan budaya di masyarakat dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif antara lain:

1. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran yang menyasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran mereka dalam MDA/TPA/TPSA dan mendorong partisipasi aktif.
2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan program-program yang ada dengan memperbaiki koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan MDA/TPA/TPSA.

4. Merancang program-program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik partisipasi masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif mencerminkan sejauh mana sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi ini meliputi:

1. Alokasi Anggaran yang Efektif untuk program-program yang bertujuan meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan yang direncanakan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, termasuk personel yang terlibat dalam pelaksanaan program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Hal ini mencakup penempatan yang tepat, pelatihan yang diperlukan, dan manajemen kinerja yang efisien.
3. Penggunaan Infrastruktur dan Teknologi yang Tepat dalam mendukung kegiatan MDA/TPA/TPSA. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang tersedia digunakan secara optimal untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.
4. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk terus memantau kinerja program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual masyarakat.

Melalui program ini, berbagai kegiatan seperti pelatihan, ceramah, dan kegiatan sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama. Misalnya, pembentukan MDA/TPA/TPSA dilakukan dengan memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan, serta memfasilitasi kegiatan sosial yang menggalang partisipasi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkaya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Melalui pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara spiritual, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA secara keseluruhan.

Dengan demikian, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat telah terbukti menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sambil memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 6.1.2 MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN. ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

33. JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA

JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA	= JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA YANG DITETAPKAN OLEH SURAT KEPUTUSAN BUPATI
	= 2 Nagari

33.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.85 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
-	3	2	66.67	Cukup Berhasil	17	11.76%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. 2024

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab dari ketidaksesuaian ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.86 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1	-	0 %
2022	3	2	66.66 %
2023	4	2	50 %
2024	3	2	66.67%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. 2024

Capaian kinerja indikator **Nagari Beradat Berbudaya** dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan realisasi yang belum mencapai target secara optimal. Pada 2021, tidak ada realisasi yang dicapai (**0%**). Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan **66,66%**, namun pada

2023 capaian menurun menjadi **50%**, menunjukkan adanya hambatan dalam pencapaian target. Pada 2024, capaian kembali naik menjadi **66,67%**, tetapi masih belum mencapai target penuh. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun pertama, tren ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten.

33.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tahun 2024 telah direncanakan untuk pembetulan Percontohan Nagari Beradat dan Berbudaya yaitu Nagari Padang Laweh dan Nagari IV Koto Pulau Punjung, namun dalam pelaksanaannya belum tercapat karena beberapa faktor yang mempengaruhi :

1. belum terdapat kesepakatan antara pemerintah daerah dan wali Nagari beserta pemangku adat yang ada di Nagari Padang Laweh dan Nagari IV Koto Pulau Punjung,
2. Indikator untuk pelaksanaan Nagari Beradat dan Berbudaya perlu disempurnakan lagi,
3. Belum terdapatnya Indikator – indikator tentang yang di butuhkan dalam pembentukan Nagari Beradat dan Berbudaya.
4. Belum tersedianya anggaran Pada tahun 2024 untuk pelaksanaan Nagari Beradat dan Berbudaya

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat memberikan wawasan penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa mendatang. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

5. Salah satu penyebab utama kegagalan bisa saja terletak pada keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan nagari beradat dan berbudaya. Keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur pendukung lainnya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan upaya revitalisasi atau pemeliharaan terhadap nagari tersebut.
6. Kegagalan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya nagari beradat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat lokal, upaya untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya akan sulit untuk berhasil.
7. Kendala administratif seperti peraturan atau regulasi yang membatasi pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya juga dapat menjadi hambatan. Proses birokrasi yang rumit atau kurangnya koordinasi antara lembaga terkait juga bisa memperlambat progres dalam mencapai target.

8. Faktor-faktor alam atau lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam menjaga dan mempertahankan nagari beradat dan berbudaya.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target jumlah nagari beradat dan berbudaya. beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk program revitalisasi dan pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya.
2. Melakukan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya lokal.
3. Merevisi atau memperbarui regulasi yang menghambat pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya. serta membuat kebijakan yang mendukung pengembangan dan pelestarian nya.

Analisis penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana upaya pemeliharaan dan pengembangan nagari berjalan secara optimal. Berikut adalah beberapa poin analisis yang relevan:

1. Efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari beradat dan berbudaya perlu dievaluasi.
2. Ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari harus dievaluasi.
3. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dan metode kerja dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari perlu dilakukan.
4. Analisis terhadap kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). komunitas lokal. atau institusi pendidikan juga penting.
5. Sistem monitoring dan evaluasi perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa progress dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat terukur dengan jelas.

Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran yang cukup besar. menunjukkan realisasi anggaran yang sedikit di bawah target. mengindikasikan potensi penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran yang signifikan. namun realisasi anggaran yang lebih rendah menunjukkan adanya perluasan penggunaan sumber daya yang belum optimal.

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran lebih rendah. menunjukkan realisasi anggaran yang mendekati target. menandakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu. Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan realisasi anggaran yang relatif baik. mendekati target yang telah ditetapkan. Kesimpulan nya. sementara beberapa program

menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya yang diharapkan.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi program dan identifikasi potensi perbaikan akan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

3.4 REALISASI ANGGARAN

3.4.1 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.87 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		Prog.	Keg.
		PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	53,855,410,513	53,347,564,251	3	5
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	8,297,639,237	8,225,165,998	6	10
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	5,253,325,104	4,789,472,775	3	4
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,216,374,527	61,801,639,549	15	34
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	96,562,020,504	56,434,245,241	7	13
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	659,020,650	621,556,542	2	3
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	10,680,003,271	7,845,039,187	15	22
8	Mengurangi pengangguran	1,241,310,300	1,051,284,656	6	8
9	Mengurangi kemiskinan	1,227,220,950	1,217,501,865	5	7
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	158,913,067,560	101,207,696,777	7	21
11	Birokrasi yang berkualitas	2,441,528,350	2,266,087,527	5	10
12	Pelayanan publik yang prima	2,379,253,700	2,344,703,282	7	16
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	1,353,756,902	1,329,135,220	7	27

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		Prog.	Keg.
		PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	10,181,473,175	4,451,313,410	6	11
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	406,896,515	364,022,266	7	8
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	7,556,080,950	7,496,945,858	7	27
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	2,231,712,300	1,114,907,441	2	2
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	10,415,553,324	10,103,011,593	5	6
Belanja Operasional		586,812,807,697	501,436,557,432		
TOTAL ANGGARAN		1,060,684,455,529	827,447,850,870		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2024

3.4.2 ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN PROGRAM

Tingkat Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat dihitung menggunakan formula berikut, sebagaimana digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left(\frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \right) \times 100$$

- **PA (Pagu Anggaran)** merupakan total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- **CK (Capaian Kinerja)** dinyatakan dalam persentase, dengan batas maksimal perhitungan sebesar 120%.
- **RA (Realisasi Anggaran)** adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan, tingkat efisiensi memiliki rentang nilai antara **-20% hingga 20%**, di mana:

- Nilai **positif** menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, yaitu capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi.
- Nilai **negatif** mengindikasikan adanya ketidakefisienan, yakni penggunaan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Tabel 3.88 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	99.06	94.21	-4.85	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	99.13	97.07	-2.06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	91.17	91.11	-0.06	Tidak Efisien
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	61.67	102.78	20.00	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	58.44	102.38	20.00	Efisien
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	94.32	100.27	5.95	Efisien
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	73.46	107.32	20.00	Efisien
8	Mengurangi pengangguran	84.69	86.42	1.72	Efisien
9	Mengurangi kemiskinan	99.21	101.48	2.27	Efisien
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	63.69	96.80	20.00	Efisien
11	Birokrasi yang berkualitas	92.81	121.50	20.00	Efisien
12	Pelayanan publik yang prima	98.55	100.18	1.63	Efisien
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	98.18	104.79	6.61	Efisien
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	43.72	108.69	20.00	Efisien
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	89.46	99.68	10.22	Efisien
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	99.22	99.98	0.76	Efisien
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	49.96	211.55	20.00	Efisien

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	97.00	66.67	-20.00	Tidak Efisien
Total		78.01	105.16	27.15	Efisien

Sumber : Badan Keuangan Daerah Dharmasraya diolah oleh Bagian Organisasi, 2024

Dari total 18 sasaran strategis, sebanyak 14 sasaran dinyatakan efisien, sementara 4 sasaran masih tergolong tidak efisien. Sasaran yang tidak efisien terutama terkait dengan infrastruktur, pemukiman, pengelolaan sumber daya air, serta penerapan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai 105,16%, dengan tingkat efisiensi keseluruhan sebesar 27,15%, yang menunjukkan bahwa secara agregat pelaksanaan program cukup efisien. Namun, masih ada beberapa sasaran yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi pencapaian target.

3.4.3 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Tabel 3.89 LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED ANGGARAN TAHUN 2024

URAIAN	Tahun 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	26,432,781,411.00	25,087,546,325.58	94.91
Pendapatan Retribusi Daerah	78,258,242,617.00	65,934,612,330.00	84.25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,347,929,006.00	5,347,929,006.00	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,199,230,000.00	12,007,270,531.21	98.43
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	122,238,183,034.00	108,377,358,192.79	88.66
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	11,920,351,000.00	14,676,153,000.00	123.12

URAIAN	Tahun 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18,103,314,000.00	22,402,073,000.00	123.75
Dana Alokasi Umum (DAU)	519,999,606,000.00	512,944,707,932.00	98.64
Dana Alokasi Khusus (DAK)	170,139,551,644.00	166,360,138,484.00	97.78
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	720,162,822,644.00	716,383,072,416.00	99.48
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	20,744,862,000.00	20,745,042,000.00	100.00
Dana Desa	55,320,687,000.00	55,320,687,000.00	100.00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	76,065,549,000.00	76,065,729,000.00	100.00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	796,228,371,644.00	792,448,801,416.00	99.53
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84,698,208,159.00	58,241,057,201.00	68.76
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	84,698,208,159.00	58,241,057,201.00	68.76
Total Pendapatan Transfer	880,926,579,803.00	850,689,858,617.00	96.57
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	100,000,000.00	71,350,441.00	71.35
Pendapatan Dana Darurat			
Pendapatan Lainnya	11,764,153,215.00	11,690,998,858.00	99.38
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	11,864,153,215.00	11,762,349,299.00	99.14
JUMLAH PENDAPATAN	1,015,028,916,052.00	970,829,566,108.79	95.65

URAIAN	Tahun 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
	(1)	(2)	
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	469,211,518,709.00	454,925,701,972.94	96.96
Belanja Barang dan Jasa	324,625,008,037.00	304,013,952,063.19	93.65
Bunga	-		
Subsidi	-		
Hibah	34,593,015,000.00	34,253,926,757.00	99.02
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	828,429,541,746.00	793,193,580,793.13	95.75
BELANJA MODAL			
Tanah			
Peralatan dan mesin	27,871,180,864.00	24,238,374,788.00	86.97
Gedung dan Bangunan	35,814,155,477.00	28,954,072,575.16	80.85
Jalan, irigasi dan jaringan	45,373,640,452.00	45,054,989,838.00	99.30
Aset Tetap lainnya	3,812,797,200.00	3,810,397,200.00	99.94
Aset lainnya	131,674,000.00	131,000,000.00	99.49
Jumlah Belanja Modal	113,003,447,993.00	102,188,834,401.16	90.43
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	2,485,520,287.00	82.85
Jumlah Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	2,485,520,287.00	82.85
JUMLAH BELANJA	944,432,989,739.00	897,867,935,481.29	95.07
TRANSFER			
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	2,651,291,150.00	1,809,666,373.00	68.26
Bagi Hasil Retribusi	269,402,000.00	174,703,451.00	64.85
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	113,330,772,640.00	113,330,772,640.00	100.00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	116,251,465,790.00	115,315,142,464.00	99.19

URAIAN	Tahun 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,060,684,455,529.00	1,013,183,077,945.29	95.52

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Unaudited Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.

3.4.4 PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS

TABEL 3.90 ANGGARAN DAN PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

Indikator Kinerja	PROGRAM	Anggaran	
		PAGU	REALISASI
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Pengembangan Jasa Konstruksi	70,250,000.00	44,359,421.00
	Penyelenggaraan Jalan	53,357,011,493.00	52,875,930,730.00
	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	428,149,020.00	427,274,100.00
	Kawasan Permukiman	35,265,000.00	33,923,700.00
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	7,348,136,087.00	7,294,145,753.00
	Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	68,000,000.00	67,559,552.00
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	117,259,000.00	111,620,100.00
	Pengembangan Perumahan	211,204,550.00	200,197,088.00
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	517,774,600.00	517,719,805.00
	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	3,821,042,000.00	3,788,502,838.00
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	804,227,750.00	693,579,309.00
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	628,055,354.00	307,390,628.00
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudian	190,328,000.00	186,948,800.00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,649,728,214.00	1,528,248,885.00
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	130,441,000.00	129,696,300.00
	Peningkatan Kualitas Keluarga	34,692,700.00	34,303,650.00
	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	55,766,000.00	53,275,900.00
	Perlindungan Khusus Anak	488,885,750.00	412,911,150.00
	Pengendalian Penduduk	222,000,000.00	220,473,550.00
	Pembinaan Keluarga Berencana	2,684,470,000.00	

Indikator Kinerja	PROGRAM	Anggaran	
		PAGU	REALISASI
	(Kb)		2,598,782,260.00
	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,213,500,000.00	1,204,776,000.00
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91,186,791,963.00	53,273,358,953.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,518,846,900.00	1,450,689,620.00
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	372,331,000.00	363,319,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	361,790,000.00	238,241,481.00
	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	39,841,700.00	39,812,950.00
	Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	66,961,300.00	66,801,050.00
	Pembinaan Peustakaan	629,952,590.00	621,634,150.00
	Pengelolaan Arsip	117,530,000.00	107,916,017.00
	Pengelolaan Pendidikan	71,566,510,004.00	31,481,954,763.00
	Pengembangan Kurikulum	428,756,850.00	423,017,397.00
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	54,586,500.00	48,352,809.00
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,025,022,360.00	1,012,744,598.00
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	22,739,662,200.00	22,738,625,507.00
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	534,515,650.00	528,951,291.00
	Perlindungan Perempuan	124,505,000.00	92,605,251.00
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10,174,500.00	10,102,400.00
	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	52,212,250.00	51,942,444.00
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	7,301,750.00	7,288,450.00
	Promosi Penanaman Modal	393,061,350.00	391,942,161.00
	Pelayanan Penanaman Modal	159,676,000.00	158,931,492.00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	580,092,000.00	579,793,200.00
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	45,731,000.00	45,173,250.00
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,905,218,050.00	923,959,954.00
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5,414,842,351.00	3,586,240,350.00
	Penyuluhan Pertanian	378,867,620.00	

Indikator Kinerja	PROGRAM	Anggaran	
		PAGU	REALISASI
			378,828,650.00
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	349,296,800.00	337,630,162.00
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	63,815,250.00	63,527,050.00
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	121,211,300.00	120,897,250.00
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	45,412,500.00	44,282,950.00
	Perekonomian Dan Pembangunan	1,153,090,550.00	1,144,499,424.00
Mengurangi pengangguran	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18,376,000.00	14,583,600.00
	Pemasaran Pariwisata	103,980,000.00	103,775,183.00
	Hubungan Industrial	948,101,200.00	765,821,514.00
	Perencanaan Tenaga Kerja	23,957,600.00	23,220,400.00
	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	51,462,150.00	50,304,000.00
	Penempatan Tenaga Kerja	95,433,350.00	93,579,959.00
Mengurangi kemiskinan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	196,880,250.00	193,549,778.00
	Penanganan Kerawanan Pangan	187,059,300.00	185,444,400.00
	Pengawasan Keamanan Pangan	21,187,800.00	19,292,050.00
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	807,091,100.00	804,564,437.00
	Rogram Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15,002,500.00	14,651,200.00
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	27,788,372,300.00	27,259,704,330.00
	Penyelenggaraan Pengawasan	610,950,300.00	559,565,527.00
	Rogram Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	984,499,000.00	890,227,177.00
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,120,868,920.00	4,003,976,046.00
	Pengelolaan Keuangan Daerah	123,824,144,340.00	66,991,224,666.00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	349,934,250.00	338,648,034.00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,234,298,450.00	1,164,350,997.00
Birokrasi yang berkualitas	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	560,203,000.00	552,006,261.00
	Pendaftaran Penduduk	44,613,550.00	43,633,000.00
	Pencatatan Sipil	200,000,000.00	199,045,356.00
	Kepegawaian Daerah	1,330,065,800.00	1,200,699,746.00
	Pengembangan Sumber Daya	306,646,000.00	

Indikator Kinerja	PROGRAM	Anggaran	
		PAGU	REALISASI
Pelayanan publik yang prima	Manusia		270,703,164.00
	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,721,955,450.00	1,709,421,007.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43,721,650.00	30,990,297.00
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	21,124,000.00	19,118,750.00
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35,222,000.00	35,190,733.00
	Administrasi Pemerintahan Desa	534,465,600.00	529,067,495.00
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22,765,000.00	20,915,000.00
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Peningkatan Kerja Sama Desa	32,989,900.00	32,203,900.00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	169,820,550.00	169,137,900.00
	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76,769,000.00	75,289,230.00
	Pemberdayaan Sosial	75,984,079.00	75,931,000.00
	Rehabilitasi Sosial	400,403,823.00	397,283,398.00
	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	97,362,000.00	97,042,021.00
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	500,427,550.00	482,247,771.00
Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Penataan Bangunan Gedung	8,305,980,425.00	2,747,034,399.00
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	618,703,000.00	517,216,039.00
	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	750,739,100.00	682,974,273.00
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	356,178,600.00	354,413,952.00
	Perencanaan Lingkungan Hidup	40,115,000.00	40,047,900.00
	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	109,757,050.00	109,626,847.00
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	44,113,500.00	7,289,700.00
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15,005,000.00	15,005,000.00
	Pengelolaan Persampahan	28,488,000.00	28,256,400.00
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	234,990,015.00	230,168,066.00
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	64,053,000.00	63,755,100.00
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5,022,000.00	4,555,300.00

Indikator Kinerja	PROGRAM	Anggaran	
		PAGU	REALISASI
Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Penanganan Lingkungan Hidup	15,225,000.00	14,992,700.00
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	526,054,050.00	517,668,591.00
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	315,478,050.00	315,237,100.00
	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5,958,434,900.00	5,930,820,285.00
	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24,520,000.00	23,560,000.00
	Penanganan Bencana	77,548,450.00	76,947,800.00
	Penanggulangan Bencana	640,345,500.00	619,060,082.00
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	13,700,000.00	13,652,000.00
	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,118,334,500.00	1,114,907,441.00
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,113,377,800.00	-
Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Pengembangan Kesenian Tradisional	2,926,408,550.00	2,797,034,509.00
	Pengembangan Kebudayaan	6,458,174,774.00	6,287,821,294.00
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	68,969,000.00	56,722,200.00
	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	5,001,000.00	4,580,600.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	957,000,000.00	956,852,990.00
	Belanja Operasional	586,812,807,697.00	501,436,557,432.00
TOTAL		1,060,684,455,529.00	827,447,850,870.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah diolah Oleh Bagian Organisasi, 2024

BAB 4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari Implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi. misi. tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menunjukkan capaian yang bervariasi dalam berbagai indikator kinerja utama. Beberapa target telah tercapai atau bahkan melampaui target perubahan, seperti persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum layak yang mencapai 89.64% dari target 89.07%. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti rasio kemantapan jalan kabupaten, yang hanya mencapai 54.60% dari target 63%.

Dari hasil evaluasi, tantangan utama dalam pencapaian target kinerja meliputi:

1. Keterbatasan anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama pada sektor infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
2. Kurangnya sinergi antara OPD dalam menjalankan program strategis, yang menyebabkan keterlambatan dalam realisasi program.
3. Masih rendahnya efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemantauan kinerja.
4. Perubahan target yang tidak selalu diikuti dengan penyesuaian strategi operasional, sehingga mempengaruhi pencapaian sasaran.

Namun, secara keseluruhan, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Dharmasraya terus mengalami perbaikan, dengan peningkatan dalam beberapa aspek tata kelola pemerintahan, efektivitas perencanaan, dan transparansi pengelolaan anggaran.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program* Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai Stakeholders. Beberapa langkah yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2024 diantaranya :

1. Membentuk Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati Dharmasraya sebagai penanggung jawab dan terdiri dari BAPPERIDA pada kelompok kerja perencanaan dan pengukuran kinerja. Bagian Organisasi pada kelompok kerja pelaporan kinerja serta Inspektorat pada kelompok kerja Evaluasi Internal;
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada;
3. Melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan yang dihadapi serta langkah Konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Melakukan peningkatan kapasitas Tim Implementasi SAKIP serta SKPD secara berjenjang mulai dari Aparatur Perencana sampai ke tingkat Pimpinan SKPD sebagai pengambil keputusan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga berupaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
2. Menyempurnakan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerangka terpicik logis dengan mempertimbangkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor : B/112/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.
3. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
4. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 untuk mengawal Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Mengefektifkan pengawasan internal oleh Inspektorat.
6. Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke level individu/staf yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Melakukan penyempurnaan dalam pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Pulau Punjung, Maret 2025

BUPATI DHARMASRAYA



ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H.,LL.M